

**DINAMIKA PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUBAHAN DARI
PERTANIAN KONVENSIONAL KE AGROPOLITAN**

(Studi Kasus di Kota Batu).

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MOCHAMAD RIZKA NURHIDAYAH

NIM. 0910310084



Dosen Pembimbing:

1. Dr. Sarwono, M.Si.
2. Drs. A. B. Barrul Fuad, M.Si.

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG

2014

MOTTO

“Kompetisi memiliki 2 Konsekuensi, yaitu gagal atau sukses. Jadi jangan pernah menyerah ketika menghadapi suatu kegagalan dan jangan menjadi sombong ketika sukses tapi teruslah bersyukur”

“Kesuksesan menjadi milik manusia yang berani mencoba dan mendapat konsekuensi yang sudah diperhitungkan”

“Hidup bisa sukses atau gagal, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dan terus mencoba tanpa berputus asa”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian
Konvensional ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu)

Disusun Oleh : Mochamad Rizka Nurhidayah

NIM : 0910310084

Fakultas : Ilmu Administrasi

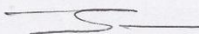
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 29 April 2014

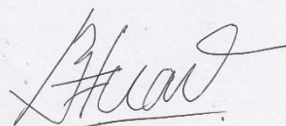
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Sarwono, M.Si.
NIP. 19570909 198403 1 002



Drs. A. B. Barrul Fuad, M.Si.
NIP. 19580320 19870 1 001

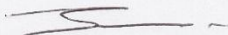
TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 03 Juli 2014
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Mochamad Rizka Nurhidayah
 Judul : Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu).

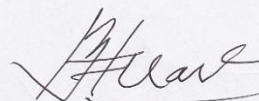
MAJELIS PENGUJI

KETUA



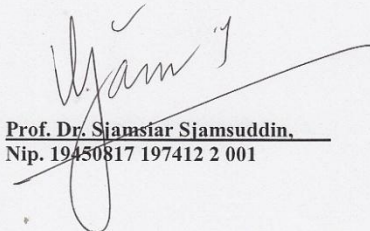
Dr. Sarwono, M.Si
 Nip. 19570909 198403 1 002

ANGGOTA



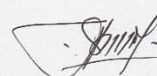
Drs. A.B. Barrul Fuad, M.Si
 Nip. 19580320 198701 1 001

ANGGOTA



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin,
 Nip. 19450817 197412 2 001

ANGGOTA



Drs. Siswidiyanto, MS
 Nip. 19600717 198601 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 Juni 2014

Mahasiswa



Mochamad Rizka Nurhidayah

NIM. 0910310084

RINGKASAN

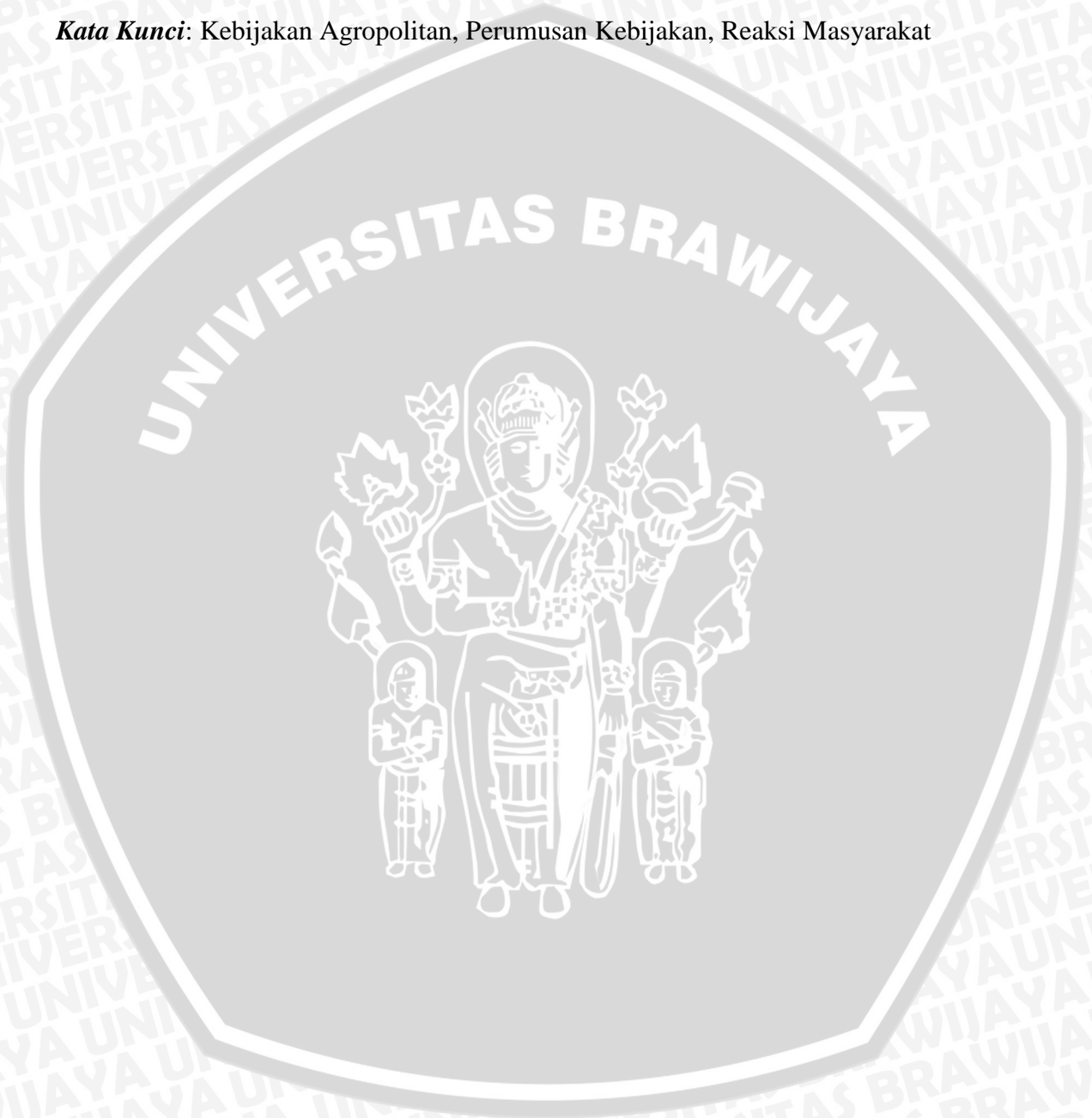
Mochamad Rizka Nurhidayah, 2014. **Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu)**. Dibawah bimbingan Dr. Sarwono, M.Si. dan Drs. A. B. Barrul Fuad, M.Si. 273 + xiii

Masalah utama yang menjadi pembahasan di Skripsi ini adalah bagaimana Perkembangan Agropolitan di Kota Batu dengan melihat Perumusan Kebijakan khususnya mengenai Agropolitan. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pertanian di Indonesia khususnya di Kota Batu bisa semakin meningkat dan bisa dijaga kelestarian lingkungannya. Karena sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwasannya perlu ada pelestarian lingkungan hidup khususnya Agropolitan. Namun dalam kenyataannya Agropolitan di Indonesia khususnya di Kota Batu masih belum berjalan sebagaimana mestinya, banyak masalah yang menjadi pemicu hal tersebut, diantaranya kurang meratanya pendistribusian peralatan dan sarana dan prasarana guna menunjang keberlangsungan Kebijakan Agropolitan di Kota Batu. selain itu, tingkat pendidikan di Kota Batu yang masih di jenjang Sekolah Dasar. Sehingga ketika kebijakan tersebut berjalan banyak yang tidak paham mengenai kebijakan tersebut karena pola pemikiran mereka yang masih tradisional, dan tidak jarang pula yang menolak atau tidak setuju dengan Kebijakan Agropolitan tersebut karena mereka menganggap pemerintah Kota Batu masih belum bisa menepati janjinya.

Berdasarkan masalah dan implikasi dari masalah yang ditimbulkan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber Data primer yang didapat dari wawancara secara intensif/mendalam dengan para responden dan Sumber Data Sekunder yang didapat dari observasi, dokumentasi dan data-data lain yang mendukung penelitian tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisa data miliki Miles and Hubberman yang melalui 4 tahap, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Untuk Situs Penelitian yang peneliti pilih adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo Kota Batu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyaknya masyarakat Kota Batu yang tidak memahami apa itu Kebijakan Agropolitan, karena tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat yang kurang. Selain itu, kurang tepat waktunya pemerintah Kota Batu dalam memberikan pelatihan dan workshop, walaupun ada pelatihan dan workshop pemerintah Kota Batu kurang memberikan evaluasi dan kontrol mengenai keberlanjutannya sehingga masyarakat banyak menjalankan sistem pertaniannya secara mandiri. Sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang menolak untuk bergabung dalam Kebijakan Agropolitan. Solusi tentang hasil

penemuan di lapangan mengenai Kebijakan Agropolitan ini adalah perlu adanya kontrol dan evaluasi tentang pelatihan dan workshop guna mendukung Kebijakan Agropolitan. Selain itu, mendistribusikan sarana dan prasarana secara merata tanpa adanya umbar janji dari pemerintah Kota Batu.

Kata Kunci: Kebijakan Agropolitan, Perumusan Kebijakan, Reaksi Masyarakat



SUMMARY

Mochamad Rizka Nurhidayah. 2014. **Dynamic of Policy Formulation in Change From Convensional Agriculture To Agropolitan Agriculture (Study Case in Batu)**, Under the guidance of Dr. Sarwono, M.Si and Drs. A.B. Barrul Fuad, M.Si 273+xiii

The Main problem of working through in this thesis is how the Development Agropolitan in Batu with see the Formulation Policy, Especially about Agropolitan. The background of this research is how potentation of agriculture in Indonesia especially in Batu can be increased and can be maintain of everlasting Environmental. Because according to the law number 26/2007 about National lay out, in this law truly indeed everlasting Environmental especially Agropolitan. But truly Agropolitan in Indonesia especially in Batu still have not walking as like as much, many problem become the trigger, is not spread evenly the distribution of instruments and infrastructures to keep the sustainability from Agropolitan policy in Batu. Otherwise, Education grade in Batu still have in Elementary school. So. When this policy operation many people have not understand about the policy, because the minded of many people still traditional, so not rarely refuse with Agropolitan policy, because they think the Government still can not keep the promises.

According the problem and implication appear, so researcher use Descriptive with Qualitative approach. The main data is from Primer data who get from in deep interview with all respondences and secunder data is get from observation, documentation, and another data can support this thesis. In Analysis Data, researcher use Miles and Hubberman analysis with four Phases, is Recording Data, Reduction Data, Presentation Data and Drawing the Conclusion. For the sites This thesis is take in BAPPEDA, DPRD, DISTANHUT, Gunungsari Village and Sidomulyo Village in Batu. The conclusion from this research is many people in Batu who is not understand what is Agropolitan Policy, because the grade of comprehension is not good. After that, the government is not on time if give the exercises and workshop-workshop, if government operate this exercises and workshop-workshop still not have give the evaluation and control about the sustainability until the society operate the agriculture system in a stand alone. Because This problem can influence society or people to push away the policy especially join to inside in the policy. So the solution of the result about Agropolitan policy is need the control and evaluation about exercises and workshop to advocate this policy. After that, the distribution of Infrastructures and equipments must be spread evenly without let loose the promise from government.

Keywords: Agropolitan Policy, Formulation Policy, Reaction from society

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa belajarnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Achmad Bambang Barrul Fuad, M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahnya untuk skripsi penulis dengan sabar disaat membimbing.
4. Bapak Simon Purwoali selaku Wakil Komisi B DPRD Kota Batu, seluruh pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu, khususnya Bidang Ekonomi, Bapak Pramono Anung selaku kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Serta Seluruh pegawai yang tergabung dalam struktur Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Batu, yang telah meluangkan waktu.

5. Masyarakat yang tergabung dalam 3 Kecamatan, khususnya di Desa Gunungsari dan Sidomulyo, yang telah menjawab wawancara dari peneliti, sehingga bisa menjadi hasil penelitian di lapangan.
6. Kedua orang tua saya, abi dan umik tercinta dan tersayang, mbakku Iva Agustin sekeluarga, Linda Ayu M.R sekeluarga, Tri Puspita sekeluarga, masku Ivan Ardiansyah sekeluarga, dan adekku Nadia Rahmatika yang masih Mondok. Terima kasih karena sudah mengoprak-opraki saya dan sabar menunggu menyelesaikan skripsi ini.
7. Saiful Ulum, Ahmaf Miftakhul Khoiri, Nasrun Annahar, Muhammad Faris Firdiansyah, Duo Putri (NPWP), Nur Afro, Muhammad Iqbal, Muhammad Arief, yang tergabung dalam Kelompok Belajar JSC (Jargon Study Club) yang telah menemani saya selama ini mulai dari semester 1 sampai sekarang. Serta seluruh teman-teman FIA Publik Angkatan 2009.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Konsep <i>Good Governance</i>	13
1. Pendahuluan	13
2. Konsep <i>Good Governance</i>	14
3. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> pada Sektor Publik.....	16
B. Partisipasi Masyarakat.....	19
1. Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat	21
C. Kebijakan Publik	23
1. Konsep Kebijakan	23



2. Konsep Kebijakan Publik.....	25
a. Pengertian Kebijakan Publik	25
b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	26
c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	26
D. Perumusan Kebijakan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrument Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Kota Batu.....	50
2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Batu.....	54
3. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Batu	59
4. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	65
5. Gambaran Umum Desa Gunungsari	71
6. Gambaran Umum Desa Sidomulyo	75
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	81
1. Proses Perumusan Kebijakan Tentang Agropolitan di Kota Batu	81
a. Model Pengamatan Terpadu dalam Perumusan Kebijakan Agropolitan di Kota Batu	99
b. Keterlibatan dan Peran dari Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.....	194
2. Reaksi yang Ditimbulkan oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.....	203



3. Skema/Mapping Antara Perumusan dan Reaksi Masyarakat Petani Kota Batu Mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu	211
C. Analisis Data	212
1. Proses Perumusan Kebijakan Tentang Agropolitan di Kota Batu	213
2. Reaksi yang Ditimbulkan oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.....	231
3. Skema/Mapping Antara Perumusan dan Reaksi Masyarakat Petani Kota Batu Mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu	246
BAB V PENUTUP	252
A. Kesimpulan	252
B. Saran.....	256
DAFTAR PUSTAKA	258



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Data Sawah di Kota Batu Tahun 2011	8
2.	Tahapan Proses Kebijakan Versi Dye	29
3.	Hasil Susenas Tahun 2007-2011	54
4.	Tujuan dan Sasaran Strategis Distanhut Tahun 2013-2018	68
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	72
6.	Tingkat Pendidikan di Desa Gunungsari	73
7.	Daftar Kepala Desa Sidomulyo	76
8.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	77
9.	Tingkat Pendidikan di Desa Sidomulyo	78
10.	Mata Pencaharian Masyarakat di Sidomulyo	79
11.	Tipologi Lahan Kawasan	85
12.	Lokasi Uji Adaptasi 12 Varietas Apel	110
13.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Apel	134
14.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat	136
15.	Daftar Kelompok Tani Penerima Saprodi	137
16.	Daftar Gapoktan Penerima Bantuan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen, dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2008.	139
17.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial PLA	144

18.	Daftar Penerima BLBU Padi Non Hibrida	147
19.	Daftar Penerima BLBU Padi Hibrida	148
20.	Daftar Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	157
21.	Daftar Kelompok Tani Penerima BLBU Tahun 2011	178
22.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Tani	180
23.	Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat	181
24.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Tani	188
25.	Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Masyarakat	190
26.	Produksi Pertanian Kota Batu Tahun 2012	211



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Sistem Politik David Easton	28
2.	Analisis Data Model Interaktif (Miles and Huberman)	48
3.	Peta Kota Batu	52
4.	Peta Sebaran Kawasan Agropolitan Tahun 2012	89
5.	Konsep Keruangan Kawasan Agropolitan	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara agraris yang memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah untuk produk pertanian. Karena di sektor pertanian ini Indonesia memiliki luas lahan pertanian kurang lebih 82,71% yang juga memiliki keberagaman jenis tanaman seperti, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan buah-buahan, sayur-mayur dan berbagai jenis varietas lainnya. Hal ini disebabkan dan didukung dengan kondisi iklim tropis (www.muliaalamorganik.com, 2011). Sektor pertanian yang dimiliki Indonesia merupakan sektor yang berperan secara signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dimana sektor pertanian Indonesia menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia (BPS, 2012). Fakta-fakta tersebut menguatkan bahwa pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Jadi sebagai salah satu Negara berwilayah tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika (bangkoor, 2012).

Selain itu, potensi perekonomian dari sektor pertanian Indonesia cukup meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PDB pertanian yang tumbuh secara signifikan dan berkontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang melebihi kontribusi dari sektor industri, hal ini dibuktikan dengan, tahun 2005. Sampai Triwulan III tahun 2007, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 4,62%, dibanding tahun 2006 dan merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

subsektor perkebunan (2,80 %), diikuti oleh peternakan (2,41 %) dan tanaman bahan makanan (2,30 %). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada tahun 2007 mencapai 10,40 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 16,30 persen, diikuti oleh subsektor perkebunan 2,00 persen dan subsektor peternakan 2,00 persen. Dari pemaparan diatas bahwa sektor pertanian menjadi bukti meningkatnya perekonomian Indonesia, sehingga menarik investor-investor asing untuk berinvestasi di Indonesia khususnya terhadap sektor pertaniannya.

Investasi yang terjadi selama periode tahun 2004-2006 menunjukkan peningkatan cukup tajam. Persetujuan PMDN mengalami meningkat dari Rp 1,92 triliun tahun 2004 menjadi Rp 6,71 triliun pada tahun 2006. Sementara itu, persetujuan PMA meningkat dari 208,30 juta dollar AS tahun 2004 menjadi 658,70 juta dollar AS tahun 2006, kemudian meningkat lagi sebesar 44,98 persen menjadi 658,70 juta dollar AS tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa prospek bisnis di sektor pertanian cukup baik karena disertai dengan iklim investasi yang kondusif (Departemen Pertanian, 2007:22).

Uraian Pemaparan mengenai potensi dan manfaat pertanian di Indonesia memberikan pemahaman bahwa potensi pasar yang menjanjikan baik itu pasar dalam negeri (domestik) dan pasar luar negeri (internasional). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melihat adanya kesempatan dalam mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada, sehingga perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Agropolitan dan

penetapan Kawasan Agropolitan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Agropolitan adalah upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Kebijakan Agropolitan tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika kawasan yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada. Beberapa persyaratan yang wajib dimiliki oleh daerah-daerah tersebut, diantaranya adalah memiliki sumber daya lahan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan). Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, Agropolitan salah satu konsep pengembangan ekonomi kawasan pedesaan (Pedoman Pengelolaan

Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan), 2007).

Berdasarkan persyaratan yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa daerah di Jawa Timur yang sesuai untuk ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan. Salah satunya adalah Kota Batu, Dikarenakan Kota Batu memiliki potensi pertanian yang menjanjikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007, dimana dalam penjelasannya bahwa sebuah kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produk pertanian sehingga upaya pengembangan kawasan pertanian bisa tumbuh dengan baik karena sistem dan usaha agribisnis yang berjalan secara seirama, sehingga dapat diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya dengan komoditas pertanian sebagai unggulan pertama dalam pembentukan kawasan Agropolitan.

Selain itu, peningkatan pesat PDRB Kota batu salah satunya disuplai oleh sektor pertanian. Sektor pertanian di Kota Batu dibagi menjadi dua, pertama pertanian Tanaman Pangan dengan hasil produksi berupa padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah dengan pusat produksi di Kabupaten Batu. Adapun hasil produksi terbesar yaitu padi dengan hasil produksi sebesar 5.958,46 Ton, sedangkan hasil produksi terkecil, yaitu kacang tanah sebesar 104,49 Ton. Selain produksi tanaman pangan padi dan palawija, kota Batu juga berpotensi besar sebagai daerah penghasil tanaman hias yang dominan berada di kecamatan Bumiaji. Kedua sektor pertanian Hortikultura, dimana sektor perkebunan yang ada di Kota Batu merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan besar

terhadap peningkatan perekonomian. Hasil produksi dari sektor perkebunan yang ada di kota batu antara lain buah alpukat, buah jeruk siam/keprok, buah pisang dan buah apel. Adapun hasil produksi terbesar yaitu buah apel sebesar 712.558 kuintal dengan daerah penghasil terbesar berada di kecamatan bumiaji, hal ini dikarenakan kondisi topografi serta klimatologi di kota batu sangat cocok untuk pengembangan tanaman holtikultura terutama buah apel. Sedangkan hasil produksi terkecil yaitu buah pisang sebesar 8.108 kuintal dengan persebaran di kecamatan batu (RT/RW Kota Batu 2010:19).

Bahwasannya dari pemaparan potensi pertanian Kota Batu dan ditetapkannya Kota Batu sebagai Program pengembangan kawasan Agropolitan, maka diharapkan Kebijakan Agropolitan yang akan mulai diterapkan lagi pada tahun 2013 mampu memberikan kontribusi yang positif. Oleh karena itu, indikator-indikator *Outcomes/manfaat* yang diharapkan oleh pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan Program Agropolitan ini adalah terjadi peningkatan baik itu peningkatan mengenai produktivitas, pendapatan, produk, investasi dan sebagainya baik itu milik masyarakat atau pemerintah bisa terealisasi dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi investor-investor domestik dan luar negeri.

Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di Masyarakat Kota Batu, dinamika mengenai perumusan kebijakan Agropolitan ini tidak berbanding lurus dengan pemerintah Kota Batu. Diantaranya adalah masyarakat petani di kota Batu belum merasakan dampak perubahan dari Konvensional ke Agropolitan. Hal ini dilihat berdasarkan *Pentagon Asset* bahwa

dengan sistem pengelolaan pertanian yang masih tradisional khususnya dalam hal teknologi yang digunakan. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam pengelolaan ini terbatas oleh pihak keluarga saja sedangkan pemerintah hanya memantau, serta tidak ada dukungan modal dari pihak pemerintah Kota Batu dan minimnya Ilmu Pengetahuan masyarakat Kota Batu mengenai Agropolitan. Selain itu Kebijakan Agropolitan di Kota Batu mulai digerakkan, dengan melakukan pembentukan Pokja-pokja pada tahun 2012, walaupun sebenarnya Kebijakan Agropolitan ini sudah bergulir tahun 2007. Akan tetapi di tataran masyarakat sendiri, dampak dari berlangsungnya Kebijakan Agropolitan ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan fakta mengenai kondisi petani kota Batu maka perlu adanya sebuah perumusan kebijakan khususnya mengenai Agropolitan Kota Batu. Masalah kebijakan sendiri adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Jadi dasar kebijakan publik adalah “intervensi” (Nugroho: 2012).

Melihat begitu pentingnya manfaat yang diperoleh dari adanya pembentukan Kawasan Agropolitan, seperti peningkatan terhadap perekonomian Kota Batu dan mewujudkan sebuah kemandirian daerah sesuai dengan

UU/32/2004 maka Pemerintah Kota Batu melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 menetapkan Kecamatan Bumiaji sebagai kawasan Agropolitan dengan Tanaman Holtikultura, dan Tanaman Hias sebagai kegiatan pertaniannya. Kemudian Kecamatan Batu dengan kegiatan pertaniannya sebagai penyedia tanaman hias. Serta kecamatan Junrejo sebagai penyedia Holtikultura. Oleh karena itu, demi mendukung terlaksananya kebijakan Agropolitan di Kota Batu maka perlu adanya penetapan struktur ruang Agropolitan.

Konsep pengembangan struktur ruang di wilayah perencanaan Agropolitan harus terdapat kawasan pertanian dan pelayanannya. Oleh karena itu di masing-masing kecamatan di Kota Batu telah ditunjuk beberapa desa sebagai pusat Agropolitan. Diantaranya sebagai berikut, Wilayah Kecamatan Batu dengan Desa Sidomulyo, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Pesanggrahan. Kemudian Wilayah kecamatan Bumiaji dengan Desa Tulungrejo, Desa Gunungsari, Desa Punten, dan Desa Sumbergondo. Serta Wilayah Kecamatan Junrejo dengan Desa Tlengkung dan Desa Torongrejo. Alasan penetapan desa dalam ketiga wilayah/kecamatan tersebut adalah, karena kawasan-kawasan tersebut sangat strategis dalam menghasilkan sektor unggulan pertanian Kota Batu. Selain itu juga sesuai persyaratan Agropolitan ketika kebijakan tersebut diterapkan.

Akan tetapi ketika Kebijakan pembangunan dan pengembangan pertanian Agropolitan ini dilaksanakan, juga tidak luput dari kendala-kendala/permasalahan, menurut Widiawati dalam penelitiannya tentang Agropolitan di Kabupaten Semarang pada tahun 2008, menyatakan bahwa permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi ketika Program tersebut diimplementasikan adalah.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan ketersediaan pendidikan yang ada di kawasan agropolitan Kabupaten Semarang, beberapa permasalahan yang muncul adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat di kawasan
- b. Ketersediaan pendidikan dan sarana prasarana penunjang yang belum memadai
- c. Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat kawasan yang dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar
- d. Belum terkelolanya potensi sumber daya alam yang ada di kawasan karena belum siapnya sumber daya manusia
- e. Belum dijadikannya pertanian di kawasan sebagai sektor yang mampu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat
- f. Masih adanya kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan (Widiawati, 2008).

Selain itu terdapat juga kendala-kendala/permasalahan yang dihadapi ketika sebuah program Agropolitan dilaksanakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari pada tahun 2011 yang diambil dari BAPPEDA Kota Batu Tahun 2009 bahwa luas lahan pertanian Kota Batu per Kecamatan semakin berkurang.

Tabel 1 Data Sawah di Kota Batu Tahun 2011

No	Kecamatan	Sawah teknis (Ha)	Sawah $\frac{1}{2}$ Teknis (Ha)	Sawah Sederhana (Ha)	Total Sawah	Tegal (Ha)
1.	Bumiaji	660	152	13	825	1.253,81
2.	Batu	445	131	18	594	778,56
3.	Junrejo	834	193	82	1.109	470,16
Kota Batu		1.939	476	113	2.528	2.500,53

Sumber: Puspitasari (2011)

Dari data-data yang telah dipaparkan oleh Widiawati dan Puspitasari, ternyata lahan pertanian yang dimiliki oleh Kota Batu per 2009 ini telah mengalami pengalih fungsian menjadi lahan bangunan. Seperti halnya yang terjadi di Bumiaji. Di wilayah tersebut wilayah pertanian sedikit demi sedikit

menjadi berkurang karena adanya alih fungsi untuk kawasan pembangunan seperti villa. Di sisi lain dengan berkurangnya lahan pertanian dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian di wilayah tersebut. Selain itu, dari aspek pendidikan, para petani di Kota Batu ini juga masih belum memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam hal mengembangkan Agropolitan karena tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani Kota Batu tergolong rendah, serta kurang tersedianya fasilitas demi mendukung program Agropolitan ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiawati dan puspitasari serta fakta di lapangan mengenai kendala dalam implementasi Agropolitan ini, maka peneliti ingin mengetahui perkembangan kebijakan Agropolitan di Kota Batu dan Reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat petani Kota Batu terhadap kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

B. Perumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang dan penjabaran mengenai potensi pertanian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses Perumusan Kebijakan Tentang Agropolitan di Kota Batu?
2. Bagaimana Reaksi yang ditimbulkan oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu?
3. Bagaimana Skema/Mapping antara Perumusan dan Reaksi Masyarakat Petani di Kota Batu, Mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa mengenai perumusan Agropolitan di Kota Batu.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Reaksi yang ditimbulkan oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan Kota Batu.
3. Mengetahui, dan mendeskripsikan skema/mapping antara perumusan dan reaksi masyarakat mengenai kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah.

1. Manfaat Akademis

Sebagai sarana/wacana mengenai Kebijakan khususnya kebijakan Agropolitan diterapkan di Kota Batu, melalui kesiapan para petani dan pemerintah Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi mengenai informasi, khususnya berkaitan dengan pengembangan potensi pertanian di Kota Batu, dan informasi tentang Agropolitan di Kota Batu.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang, diantaranya adalah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang ditunjuknya Kota Batu sebagai pusat Agropolitan di Jawa Timur. Sesuai dengan visi perencanaan ruang Kota Batu, yaitu “Kota Batu Sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di Jawa Timur”. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian juga menjelaskan tentang tujuan, kontribusi dan sistematikan penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan dasar uraian mengenai teori/pisau analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa teori, konsep, atau pendapat dari para ahli di bidangnya. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Good Governance*, kebijakan publik, analisis kebijakan publik..

BAB III METODE PENELITIAN

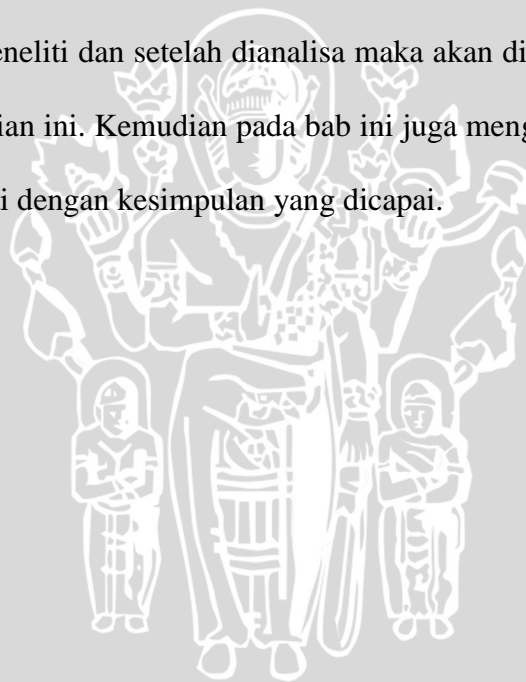
Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, selain itu juga membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, desain analisis dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta menggambarkan secara kompleks lokasi penelitian yang peneliti pilih. Selain itu, juga menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Setelah itu data yang diperoleh dianalisa dari teori yang telah ditetapkan oleh peneliti demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana data-data yang telah diperoleh oleh peneliti dan setelah dianalisa maka akan disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga menguraikan mengenai saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Good Governance

1. Pendahuluan

Pada dekade akhir dalam abad 20 dan dekade awal abad 21, bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi. Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan Negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien.

Dalam upaya untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip “good governance” demi mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat secara nyata terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang politik.

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan yang dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2004:1).

2. Konsep Good Governance

Pemerintah atau “*Government*” diartikan sebagai “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya”. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau kota dan sebagainya. Sedangkan istilah “*Governance*” berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Selain itu, menurut Kooiman (1993) bahwa *governance* adalah “....Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*”, (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social*

cohesion, integration, and ensure the well being of their population”.

(Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).

Secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. *Negara/Pemerintahan*: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

- b. *Sektor Swasta*: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. *Masyarakat Madani*: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi (Sedarmayanti, 2004).

3. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*Governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Selain itu, Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa “unsur utama *Governance*”, yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia.

Berikutnya, UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, Strategic Vision*. Sedangkan agenda aksi

reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Bintoro Tjokroaminoto (2000) perlu diarahkan kepada beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Perubahan sistem politik kearah sistem politik yang demokratis, partisipatif, dan egalitarian.
2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) dimana kekuatan militer ini harus menjadi kekuatan yang profesional dan independen.
3. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman dan pelayanan publik.
4. Reformasi pemerintah yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi.
5. Agenda reformasi lain yang juga strategi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih baik itu dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disiplin dalam penerimaan dan penggunaan uang, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur Negara.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang, maka bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani walaupun sudah mulai dilakukan, namun belum atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Dari sinilah muncul

pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Atau lebih dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintah menjadi pemerintahan (*Governance*), sebagai wujud interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakatnya (Kooiman, 1993).

Berlandaskan konsepsi pemerintahan yang baik yang pada hakekatnya terdiri dari tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, maka arah kebijaksanaan tersebut sejalan pula dengan konsepsi dan prinsip "*Reinventing Government*" sebagaimana direkomendasikan oleh Osborne dan Gaebler (1992), bahwa pemerintah hendaknya berperan sebagai katalis dimana pemerintah hanya akan dibatasi pada peran "*steering rather than rowing*". (Sedarmayanti, 2004).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka karakteristik *clean and good governance*, diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*, yaitu:

1. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat
2. Pokok pikiran *community information planning system*, dapat diwujudkan dengan "*sharing*" sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat

3. Lembaga legislatif perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat
4. Birokrat harus menjalin kerjasama dengan masyarakat, yaitu dengan membuat program-program yang sesuai
5. Birokrasi harus berdialog dengan masyarakat,

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain: (Kartasmita, 1997)

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu
- c. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut T. Ndraha partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan;
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan. Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu

kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

1. Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur,

jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143). Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi
- b. seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- c. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

- d. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- e. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- f. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.
- b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program (Yulianti, 2012).

C. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan menurut banyak pakar mempunyai beberapa pengertian sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing. Namun, dari banyaknya

pengertian tersebut mempunyai makna yang sama dalam bentuk yang berbeda. Menurut James E. Anderson dalam Islamy (2004:17) kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Sedangkan pandangan lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl J. Frederick dalam Winarno (2005:19), yaitu “*...a proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize or purpose*” (“...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).

Menurut Amara Raksataya dalam Islamy (2004:17-18) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapa tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

2. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian mengenai Kebijakan Publik banyak dikemukakan oleh tokoh/sarjana Administrasi Publik. Diantaranya adalah dikemukakan oleh Harold Lasswell dan Abraham Kaplan (1970:71) dalam Nugroho yang mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu. Sedangkan menurut Carl I. Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1963:79).

Thomas R. Dye dalam Nugroho (2012:120) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Pada dasarnya memang kebijakan publik memiliki banyak definisi. Akan tetapi ada baiknya kita merumuskan definisi yang sederhana. Pertama, kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Sedangkan publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan

suatu isu tertentu. Jadi “publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar *stakeholders*. Publik adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*.”

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah: “... setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”.

b. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

dalam memahami suatu konsep tentu terdapat karakteristik atau ciri khas yang menunjukkan konsep tersebut sehingga menjadi pembeda dengan konsep lain. Disini, kebijakan publik sebagai suatu konsep juga memiliki karakteristik. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Wahab (2008:16), yaitu:

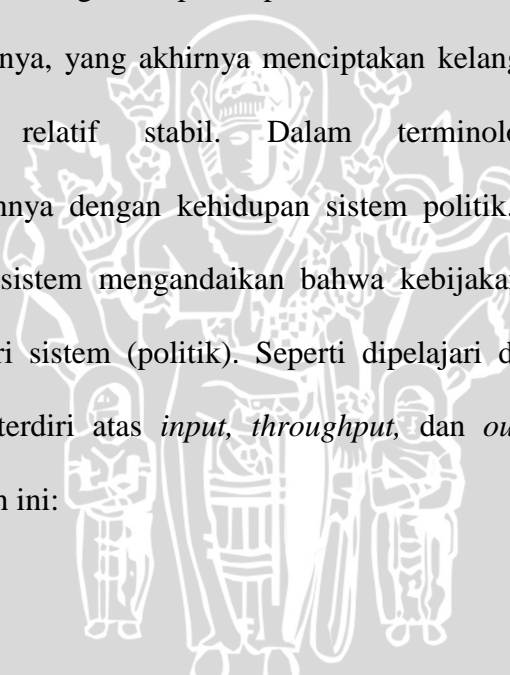
1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu
4. Kebijakan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif

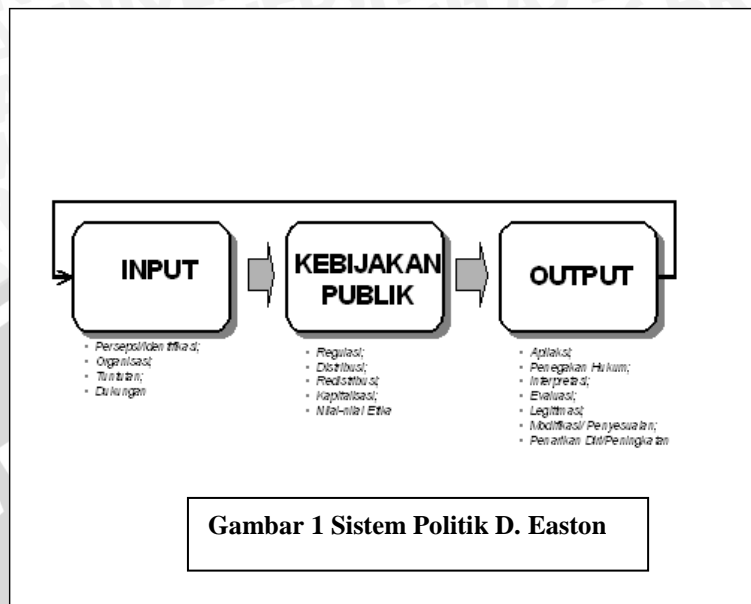
c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik sebagai proses terdiri atas tiga dimensi pokok, yaitu perumusan, implementasi, dan pengendalian. Bagian terakhir

bersifat khusus dan sedikit berbeda karena lazimnya pada proses kebijakan yang ada hanyalah monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pencapaian kebijakan akan paripurna jika dikendalikan termasuk bagaimana kebijakan dimonitor, dievaluasi, diberikan ganjaran dan hukuman dan apabila diperlukan dilakukan revisi kebijakan.

Model proses kebijakan yang paling klasik dikembangkan oleh David Easton. Easton melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri atas *input*, *throughput*, dan *output*. Seperti pada gambar dibawah ini:





Dari gambar tersebut dipahami bahwa proses formulasi kebijakan publik berada dalam sistem politik dengan mengandalkan pada masukan (input) yang terdiri atas dua hal, yaitu tuntutan dan dukungan. Model Easton inilah yang dikembangkan oleh para akademisi di bidang kebijakan publik, seperti Anderson, Dunn, Patton & Savicky, dan Effendy.

Model proses kebijakan dari Patton dan Savicky ini terdiri atas 6 proses/tahapan, pertama adalah menemukan masalah yang menjadi *concern*/perhatian di masyarakat, kedua adalah menentukan macam-macam kriteria evaluasi, ketiga mengidentifikasi alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang ada, keempat mengevaluasi alternatif kebijakan, kelima menentukan dan mengambil kebijakan yang sesuai dari alternatif yang ada, serta yang keenam

mengimplementasikan/melaksanakan alternatif kebijakan yang telah dipilih.

Thomas R. Dye juga mengembangkan proses kebijakan dalam enam tahap yaitu *Problem Identification*, *Agenda Setting*, *Policy formulation*, *Policy Legitimation*, *Policy Implementation*, dan *Policy Evaluation*.

Tabel 2 Tahapan Proses Kebijakan versi Dye

Step	Process	Activity	Participants
1	Problem Identification	Publicizing societal problems; Expressing demands for government action	Mass media; Interest groups; Citizen initiatives; Public opinion
2	Agenda Setting	Deciding what issues will be decided, what problems will be addressed by government	Elites; Including President; Congress
3	Policy Formulation	Developing policy proposals to revolve issues and ameliorate problems	Think tanks; President and executive office; Congressional committess; Interest groups
4	Policy Legitimation	Selecting proposals; developing political supportfor it; Enacting it into law; Deciding on its constitutintly	Interest groups; President; Congress; Courts
5	Policy Implementation	Organizing departments and agencies; Providing payments or services; Levying taxes	President and White House staff; executive departments and agencies
6	Policy Evaluation	Reporting outputs of governments programs; Evaluating impacts of policies on target and non-target groups; Proposing changes and “reforms”	Executive departments and agencies; Congressional oversight committees; Mass media; Think tanks

Model yang dikembangkan oleh para ilmuwan kebijakan publik di atas mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari *formulasi* menuju *implementasi*, untuk mencapai kinerja kebijakan. Uniknya, akademisi tersebut tidak memasukkan “kinerja kebijakan”, melainkan langsung pada “evaluasi kebijakan”. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa para akademisi tersebut menilai bahwa “kinerja kebijakan” adalah proses yang “pasti terjadi” dalam kehidupan publik, bahkan tanpa harus disebutkan.

Para ahli tersebut menilai bahwa setelah implementasi adalah evaluasinya. Akademisi yang memberikan lokus “Kinerja Kebijakan” adalah Sofian Effendi. Namun demikian, ada satu pola yang sama, bahwa model formal proses kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan, formalisasi dan legalisasi kebijakan, implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan, yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan (Nugroho, 2012).

D. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Jadi dasar kebijakan publik adalah “intervensi”.

Paradigma kegiatan pemerintah sebenarnya mulai bersifat interventif pada akhir tahun 1930-an ketika Keynes memperkenalkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi *economic malaise* yang dialami Amerika Serikat di tahun 1932. Kebijakan Keynes pada intinya adalah bahwa pemerintah harus melakukan intervensi-intervensi melalui kebijakan-kebijakan publik untuk menjaga kesinambungan kehidupan bersama, khususnya yang menjadi fokus Keynes dan para pengikutnya di bidang ekonomi. Namun sebenarnya sebuah kebijakan memiliki keterbatasan. Karena tidak semua permasalahan yang muncul dipecahkan dengan satu kebijakan ideal dan mencakup penyelesaian masalah-masalah, tanpa memperhatikan gerak bias kebijakan, bias implementasi, bias evaluasi yang secara kontekstualitas memberi ruang pada lembaga publik dan masyarakat untuk masuk memberikan peran komplementernya.

Batas-batas yang dimaksud ini adalah batas mengenai sumber daya waktu kebijakan tersebut, karena sebuah pemerintahan di Indonesia hanya berjalan dalam kurun waktu 5 tahun saja. Oleh karena itu, maka presiden atau pemerintahan harus bekerja seefisien dan seefektif mungkin. Batas kedua adalah keterbatasan terhadap kemampuan sumber daya manusia, teramat banyak kebijakan publik yang dibuat baik akan tetapi sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Kekeliruan fatal dan sering kita temui bahwa para pejabat publik yang merupakan pembuat kebijakan publik yang ideal tidak melihat kesiapan kelembagaan di tempatnya berada.

Batas ketiga adalah batas akan kelembagaan. Yaitu bagaimana kualitas yang dimiliki oleh lembaga-lembaga baik itu lembaga yang bergerak pada bidang profit atau non profit baik atau tidak. Jadi sebelum kebijakan publik diimplementasikan setidaknya lembaga tersebut memiliki kecakapan yang cukup memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut. Karena kebijakan publik mengandung sifat-sifat praktis dan pragmatis karena ia harus masuk akal, dapat dilaksanakan dan berkesinambungan secara alami (Nugroho, 2012:538-544).

Keterbatasan keempat adalah keterbatasan dana atau anggaran. Kebijakan publik tidak akan terlaksana jika dana atau anggaran yang ada tidak terpenuhi. Sedangkan untuk keterbatasan kelima adalah keterbatasan yang bersifat teknis, yakni berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebuah kebijakan publik bisa dikatakan baik jika kebijakan tersebut dibuat oleh para peramu kebijakan publik yang handal dengan disesuaikannya kemampuan baik kemampuan dana, kecakapan lembaga dan manusia yang ada, serta *timing* waktu yang tepat untuk kebijakan publik tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan mengenai batasan-batasan kebijakan publik, maka kebijakan publik yang dirumuskan setidaknya sesuai dengan Model perumusan kebijakan, yang terbagi atas 14 model perumusan Kebijakan, yaitu Model Kelembagaan, Model Proses, Model kelompok, Model Elite, Model Rasional, Model Inkremental, Model Teori Permainan, Model Pilihan Publik, Model Sistem, Model Pengamatan Terpadu, Model Demokratis, Model

Strategis, Model Deliberatif, Model “Tong Sampah”. Beberapa model Perumusan Kebijakan yang telah disebutkan diatas, terdapat model Perumusan Kebijakan yang menggunakan 2 sudut pandang dalam merumuskan sebuah Kebijakan, yaitu *Model Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning)* milik Amitai Etzioni. (Riant Nugroho, 2012:545).

Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Model ini digagas oleh pakar sosiolog organisasi, yaitu Amitai Etzioni pada tahun 1967. Teori ini diperkenalkan sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, menetapkan proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Model ini ibaratnya pendekatan dengan dua kamera: kamera dengan *wide angle* untuk melihat keseluruhan dan kamera dengan *zoom* untuk melihat detailnya (Wahab, 2002:23-24).

Model *Mixed-Scanning* ini diambil dari teknik peramalan cuaca dan teknik observasi. Kamera dipakai untuk mencatat citra cuaca pada dua level detail: pengamatan luas dan gambaran detail pada area tertentu yang diteliti. Dengan kata lain, model ini menggunakan kajian detail atas beberapa area dari satu problem dengan memperluasnya ke problem secara keseluruhan. Bauran pengamatan ini akan tergantung pada diferensiasi keputusan yang tergolong “fundamental” dan yang “inkremental”. Manfaat dari perumusan kebijakan *Mixed Scanning* ini adalah lebih menekankan bahwa tak ada pola pembuatan

keputusan yang bisa dijelaskan secara baik dalam bentuk abstrak. Menurut Etzioni, kuncinya adalah fleksibilitas pembuatan keputusan sesuai dengan perubahan dan ketidakpastian lingkungan. Kemampuan atau kapasitas untuk mengamati harus diletakkan dalam konteks karakter inkremental dari demokrasi liberal yang memerlukan pembentukan konsensus, dan karenanya mencegah perencanaan jangka panjang kebijakan yang pernah dipakai dalam masyarakat totalitarian.

Menurut Etzioni, pendekatan *Mixed Scanning* ini merupakan “is” sekaligus “ought”: pendekatan ini adalah deskripsi tentang realitas strategi pembuatan keputusan seperti yang dipakai dalam berbagai bidang dan juga merupakan model untuk pembuatan keputusan secara lebih baik. Model ini mengakui bahwa para pembuat keputusan harus mempertimbangkan ongkos pengetahuan, tak semuanya bisa diamati, jadi para pembuat keputusan berusaha untuk mengamati area-area utama secara penuh dan secara rasional, sedangkan area lainnya hanya akan diamati secara “sepotong-sepotong”.

Ide bauran pengamatan Etzioni ini, bagaimanapun harus diletakkan dalam konteks perhatian intelektualnya yang lebih luas dan dalam kerangka perkembangan pemikirannya secara keseluruhan. Dalam memahami model *Mixed Scanning* ini perlu untuk membahas “aspek sibernetik” dari masyarakat yang aktif. Dalam bagian ini Etzioni membahas konteks sosial dari pengetahuan, bagaimana testing realitas itu adalah sebuah proses sosial kolektif, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, distribusi pengetahuan, dan “kesadaran sosial”. Pandangannya adalah bahwa model rasional dan

inkrementalis mengandung kelemahan, dan tidak bisa menjadi basis untuk mempromosikan “masyarakat aktif”. Masyarakat ini adalah masyarakat di mana orang-orangnya, melalui kolektivitas sosial, bisa lebih memahami diri mereka sendiri dan lebih mampu mentransformasikan masyarakat sesuai dengan nilai-nilainya sendiri.

Etzioni mengakui bahwa ada kesenjangan informasi dalam pemerintahan, tetapi dia tidak berpendapat bahwa ini adalah kesenjangan yang dapat dijembatani hanya dengan meningkatkan kualitas pembuatan keputusan. Transformasi “masyarakat post-modern”, menurut Etzioni, memerlukan perubahan yang lebih luas dalam cara masyarakat secara keseluruhan yang secara aktif terlibat dalam proses pengembangan “kesadaran societal”. Dalam hal ini ide *Mixed Scanning* Etzioni ini berbeda dengan manajerialisme teknokratik Dror. Karena dalam konteksnya *mixed scanning* ini adalah bagian dari teori transformasi di mana pembuatan keputusan berakar dalam masyarakat yang lebih responsif dan tak teralienasi (Parsons, 2008:300-302).

Kebijakan pembangunan kawasan Agropolitan di Kota Batu merupakan kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah Kota Batu untuk memfasilitasi dan membentuk kemandirian daerah dengan sistem otonomi daerah yang berlaku di zaman modern sekarang ini. Kemandirian yang dimaksud adalah mandiri dalam meningkatkan sistem perekonomian daerah tersebut, salah satunya aspek pertanian di kota batu yang telah memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan pertanian dan perekonomian kota batu.

Kebijakan pembangunan kawasan Agropolitan di Kota Batu ini memang kebijakan yang dirancang secara *Top-Down* oleh pemerintah pusat yang kemudian di *Brick Down* kepada pemerintah daerah kota batu. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah, apakah perumusan kebijakan Agropolitan di Kota Batu sudah melibatkan masyarakat/penduduk di Kota Batu. Serta bagaimana pengembangan Agropolitan yang terjadi di Kota Batu. Karena jika kita ketahui bahwa sistem pertanian di Kota Batu sudah modern dan mengenal pasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para petani di Kota Batu sudah mengenal pasar. Akan tetapi, dalam melakukan perumusan kebijakan para petani kurang dilibatkan didalamnya sehingga timbul berbagai macam reaksi dari sebagian masyarakat Kota Batu serta ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model perumusan kebijakan secara *Mixed Scanning* (pengamatan bauran) sebagai pisau analisis peneliti. Karena dengan model tersebut kebijakan ini bisa dilihat berdasarkan dua hal yang pertama bagaimana kebijakan Agropolitan tersebut bergulir dan berjalan dalam jangka waktu 5 tahun (2007-2012), yang kedua ketika kebijakan tersebut secara stagnan tidak berjalan dan kebijakan melenceng dari pakemnya, maka hal ini bisa dianalisis secara detail mengenai proses perumusan yang terjadi ketika terjadi hal tersebut, apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek kebijakan melainkan juga subjek kebijakan yang turut serta dalam merumuskan kebijakan tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka keseimbangan yang terjalin antara ketiga *stakeholders* dalam *Good Governance*, yaitu pemerintah,

bisnis dan masyarakat bisa terjadi dan ketiga pihak tidak dirugikan satu sama lain, serta pembangunan baik dari segi ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan bisa berjalan lurus.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat Leedy (1997:3) yang dikutip oleh Djunaedi dimana penelitian (riset) adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan dan analisis informasi (data) dalam rangka meningkatkan pengertian kita tentang fenomena yang kita minati atau menjadi perhatian kita. Selain itu Dane (1990:4) juga menambahkan bahwa penelitian adalah proses kritis untuk mengajukan pertanyaan dan berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang fakta dunia. (Djunaedi 2000:2).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memilih jenis penelitian Kebijakan (*Policy Research*) dan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersinergi dengan aliran filsafat *phenomenology* yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) (Idrus, 2007:34). Selain itu, Sugiyono (2004:1) menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah:

“ metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

Sedangkan penelitian Kebijakan yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan suatu analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar,

sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Penelitian kebijakan ini sangat relevan bagi perencana dan perencanaan dalam pembuatan keputusan (Pasolong, 2012:74). Selain itu, Majchrzak (1984) dalam Sugiyono (2005:8) mengemukakan bahwa:

“*policy research* adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.”

Selain itu, penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Pasolong, 2012:75-76).

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui fenomena yang terjadi ketika implementasi kebijakan mengenai pembangunan kawasan Agropolitan ini dilaksanakan. Selain itu peneliti juga ingin melihat bagaimana perubahan/dinamika yang terjadi ketika kebijakan ini diterapkan dan sebelum kebijakan ini diterapkan. Serta dalam penelitian ini peneliti ini juga mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tani Kota Batu tanpa mengambil suatu kesimpulan secara general (umum). Oleh karena itu, peneliti menganggap jenis penelitian kebijakan (*research policy*) dan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif perlu adanya fokus penelitian, yang berfungsi sebagai batasan penelitian. Dengan adanya batasan dalam penelitian tersebut informasi yang diperoleh oleh peneliti bisa lebih maksimal, terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika batasan-batasan tersebut tidak ada maka peneliti kualitatif akan kesulitan dalam melakukan penelitian, karena peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi dengan sinergis.

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk mempertajam penelitian ini maka peneliti menetapkan fokus agar penelitian ini bisa lebih terarah sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan. Spradley menyatakan dalam Sugiyono (2013:34) bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dari penjelasan diatas maka peneliti memiliki maksud dalam menetapkan fokus penelitian, yaitu peneliti ingin lebih mengetahui situasi sosial yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat lebih memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti menentukan fokus penelitian terhadap rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Proses Perumusan Kebijakan Tentang Agropolitan di Kota Batu.
 - a. Model perumusan pengamatan terpadu *Mixed Scanning* dalam perumusan kebijakan Agropolitan di Kota Batu.
 - b. Sejauh mana keterlibatan dan Peran dari Masyarakat Petani Kota Batu dalam Kebijakan Agropolitan Kota Batu.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan Agropolitan di Kota Batu dengan melihat proses perumusan kebijakan *Mixed Scanning* (pengamatan terpadu). Hal ini dititikberatkan pada dua hal yaitu peneliti melihat berdasarkan, bagaimana secara keseluruhan kebijakan tersebut berjalan di kota Batu lalu yang kedua melihat secara lebih detail bagaimana kebijakan tersebut berkembang di masyarakat. Selain itu, peneliti juga ingin melihat peran dari ketiga *Stakeholders*, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan Kebijakan Agropolitan sesuai dengan konsep *Good Governance* melalui komunikasi yang terjalin dalam ketiga *Stakeholders*.

2. Reaksi yang Ditimbulkan oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Dalam permasalahan kedua ini peneliti ingin mengetahui reaksi masyarakat terhadap kebijakan Agropolitan tersebut, sehingga terjadi penolakan atau tidak terhadap kebijakan tersebut.

3. Skema/Mapping antara perumusan dan reaksi masyarakat mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Dalam rumusan permasalahan ketiga ini peneliti ingin menyangdingkan hasil temuan-temuan yang ada di permasalahan-permasalahan 1 dan 2. Dengan menyangdingkan intisari dari kedua permasalahan ini, bisa lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan skripsi ini.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Bogdan dan Taylor (1992:34) menyatakan bahwa lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan substantif dan teoritik. Disamping itu menurut Lofland and lofland ada 4 (empat) alasan situasi menarik untuk diteliti, yaitu: *Pertama*, situasi menarik minat peneliti dan secara nyata terlokasi di suatu tempat. *Kedua*, terdapat pengalaman sosial yang memiliki pola tidak tetap. *Ketiga* adanya keunikan pada individu-individu dan jenis *setting* yang tidak pasti serta banyaknya bentuk pengalaman sosial. *Keempat*, adanya masalah yang diteliti belum mendapat solusi.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dinamika kebijakan perubahan dari pertanian konvensional ke Agropolitan di Kecamatan Bumiaji, Junrejo dan Kecamatan Batu yang mana masing-masing desa di kecamatan tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis sektor unggulan pariwisata dan kawasan strategis sektor unggulan pertanian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu No. 7/2011 tentang RTRW Kota Batu 2010-2030. Alasan penetapan ketiga lokasi tersebut dikarenakan selain memiliki keunggulan-keunggulan dalam sektor tertentu tersebut, juga memiliki sumber daya manusia dan alam yang mumpuni. Dari penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di tiga lokasi tersebut, dan ingin

mengetahui secara lebih mendalam mengenai keberhasilan ketika kebijakan Agropolitan diterapkan.

Berdasarkan penetapan lokasi penelitian tentang skenario kebijakan Agropolitan ini maka, peneliti memilih beberapa situs untuk dijadikan tempat meneliti, yaitu desa Sidomulyo Kecamatan Batu, desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji. Selain itu, juga memilih kantor badan perencanaan dan pembangunan Kota Batu (BAPPEDA) Kota Batu, kemudian dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, serta Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Kota Batu. Alasan peneliti memilih situs penelitian tersebut karena situs penelitian tersebut bisa memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

D. Sumber Data

Menurut Arikunto dalam Hafidzh (2012) menyatakan bahwa Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan (referensi makalah, 2012).

Selain itu, sumber data disini diartikan sebagai wilayah general yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sumber data bisa diidentifikasi menjadi tiga macam. Spradley dalam Sugiyono (2013:49), yaitu:

1. *Place* (tempat): jadi dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lokasi seperti desa Sidomulyo Kecamatan Batu, desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu, Sekretariat DPRD Kota Batu, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.
2. *Actors* (pelaku): sumber data yang bisa memberikan informasi baik itu secara lisan atau tertulis mengenai penelitian tersebut. Jadi sumber data ini berupa orang atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. *Activity* (aktifitas): sumber data yang didapat dari kegiatan yang diobservasi secara langsung. Jadi sumber data ini berupa deskriptif mengenai aktifitas petani di Kota Batu.

Jika dilihat dari mana sumber data berasal, maka sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara. Adapun data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sebagai objek sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting (referensi makalah, 2012).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:62). Oleh karena itu, peneliti memilih beberapa teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dengan situasi sosial/permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi: pengawasan secara langsung dan sistematis terhadap kegiatan, situasi sosial dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Sehingga terkumpul data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
2. Wawancara: suatu metode atau cara dalam menghimpun informasi secara langsung dengan adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang sesuai dengan situasi sosial.
3. Dokumentasi: cara atau metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dan file-file yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu adanya instrumen penelitian yang berfungsi sebagai alat bantu penelitian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh arikunto dalam Zuriyah (2006:168), bahwa Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Ungkapan "*Garbage tool garbage result*" merupakan hubungan antara instrumen dengan data. Oleh karena itulah, menyusun instrumen

bagi kegiatan penelitian merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti.

Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyono (2013:60) yang menyatakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini maka, instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah:

1. Peneliti, jadi yang dimaksud disini adalah seorang peneliti harus memiliki pemahaman mengenai masalah dan situasi sosial yang dihadapi serta kesiapan peneliti ketika terjun di lapangan.
2. Alat-alat penunjang, yang dimaksudkan disini adalah peneliti menggunakan alan penunjang seperti alat tulis-menulis, tape recorder dan pedoman lain seperti pedoman wawancara, panduan pengamatan, panduan observasi yang bisa memudahkan dan membantu dalam melakukan penelitian.

Dari itu semua peneliti disini menjadi sorotan utama, karena dengan kesiapan untuk terjun secara langsung ke lapangan maka penelitian kualitatif bisa berhasil

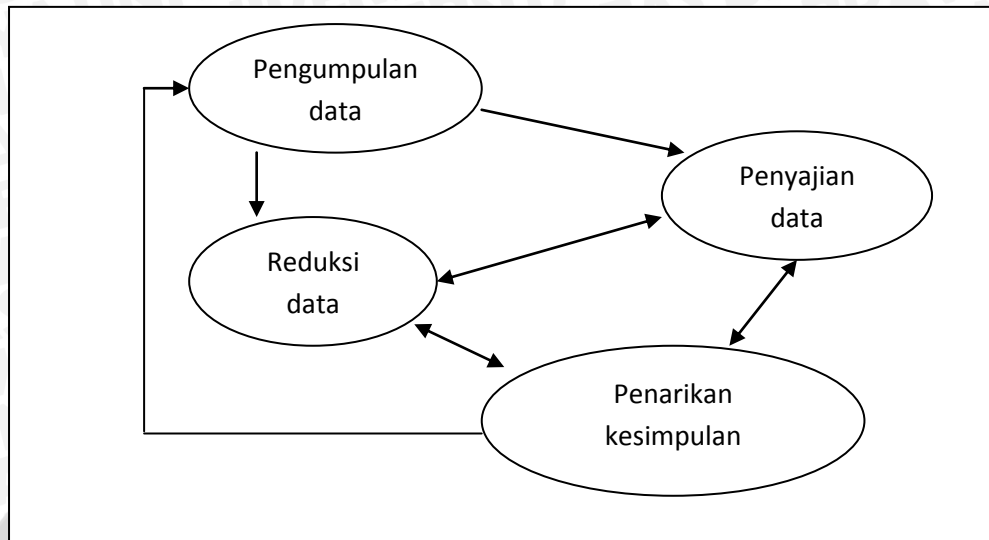
dilakukan. Karena penelitian kualitatif disini berfungsi untuk memahamkan, untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai situasi sosial yang terjadi di masyarakat Petani Kota Batu.

G. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pembahasan atau analisis data mengenai informasi yang didapat peneliti di lapangan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bogdan dalam Sugiyono (2013:88) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Selain itu, menurut Sugiyono bahwa analisa data dalam sebuah penelitian adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis data diatas maka peneliti menggunakan metode analisis deskriptif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh. Salah satu teknik analisis data yang peneliti pilih adalah metode Miles and Huberman, berikut gambar mengenai siklus penelitian menggunakan metode Miles and Huberman.



Gambar 2 Analisis Data Model Interaktif (Miles and Huberman)

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan tiga teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi agar informasi yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui gambar, grafik dan sebagainya yang mendukung penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah meneliti mengenai dinamikan kebijakan perubaham dari pertanian konvensional ke agropolitan.

b. Reduksi Data

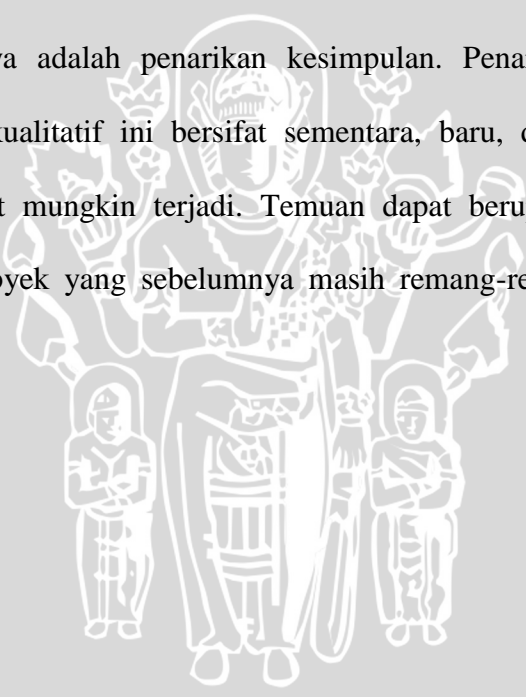
Mereduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, pencarian tema dan pola. Dengan demikian data yang telah terkumpul dan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini bersifat sementara, baru, dan kemungkinan berkembang sangat mungkin terjadi. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang (Sugiyono, 2013:89-99).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu merupakan sebuah kota dengan garis astronomi yang terletak di antara $12^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45$ Lintang Selatan. Kota Batu terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat.

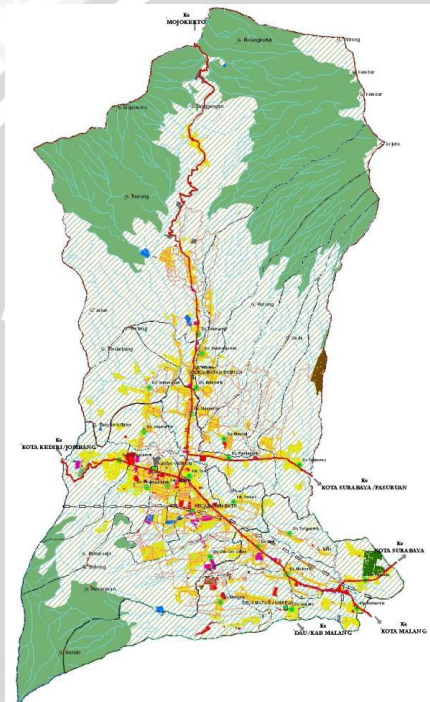
Wilayah kota ini berada di ketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 buah gunung, yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter), Gunung Welirang (3156 meter). Kondisi topografi yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit menjadikan Kota Batu bersuhu udara rata-rata 15-19 derajat Celsius. Selain itu, Penduduk Kota Batu sebagian besar bekerja sebagai petani dimana hasil pertanian utama dari Kota Batu adalah buah, bunga dan sayur-mayur. Hasil perkebunan andalan yang menjadi komoditi utama dari Kota Batu adalah buah apel. Apel Batu ini memiliki empat varietas yaitu manalagi, *rome beauty*, anna, dan wangling. Jadi secara umum Kota Batu dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu

daerah lereng/bukit dengan proporsi lebih luas dari daerah dataran. Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19 908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Ditinjau dari sejarahnya mengapa disebut kota dingin, karena Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayahnya berada di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk, didukung oleh keindahan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa Pemerintahan Hindia Belanda masih ada dan menjadi aset serta menjadi kunjungan Wisata hingga saat ini. Bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switserland dan memberikan predikat sebagai De Klein Switserland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.

Berdasarkan sejarah, sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama

seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur (Batu Dalam Angka: 1-2, 2012).



Gambar 3 Peta Kota Batu (RT/RW Kota Batu:12, 2010).

Secara administratif, Kota Batu sendiri juga terbagi atas 3 wilayah kecamatan yang membagi luas wilayah kota batu secara keseluruhan, yaitu Kecamatan Bumiaji dengan luas 12.797,89 hektar, Kecamatan Batu dengan luas 4.545,82 hektar, dan Kecamatan Junrejo dengan luas 2.565,02 hektar. Serta terbagi atas 24 desa/kelurahan, 237 RW dan 1.122 RT. Dilihat dari segi Geografisnya ketiga Kecamatan tersebut memiliki 4 tanah yang cocok untuk digunakan bercocok tanam dengan rinciannya. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas

1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir jenis tanah Latosol meliputi Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.

Karena jenis tanah di Kota Batu cukup subur dan sangat berdekatan dengan wilayah pegunungan. Serta didukung dengan intensitas air hujan yang cukup signifikan yaitu sebesar 122,5 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 103 hari. Lalu dengan tingkat kelembapan Kota Batu sebesar 30% (minimum pada bulan November serta yang tertinggi sebesar 99% (maksimum) pada bulan maret. Maka sebagian besar masyarakat Kota Batu bermata pencaharian sebagai petani.

Selain dari aspek administratif, dilihat dari aspek demografis, bahwa jumlah kepadatan penduduk laki-laki di Kota Batu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun di tahun 2010 mengalami penurunan. Sedangkan untuk jumlah kepadatan penduduk perempuan selalu meningkat dari tahun ke tahun dan puncak kepadatannya terjadi pada tahun 2009-2010 yaitu dari 94,579 menjadi 96,062 penduduk. Berikut data dari jumlah kepadatan penduduk Kota Batu dari tahun 2007-2011.

Tabel 3 Hasil Susenas tahun 2007-2011

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
2007	92,329	93,657	185,986	98.58
2008	94,755	93,058	187,813	101.82
2009	95,025	94,579	189,604	100.47
2010	94,114	96,062	190,176	97.97
2011	94,717	96,877	191,594	97.77

Berdasarkan data tersebut diatas, maka sebesar (31,1%) penduduk Kota Batu yang berumur 15 tahun keatas lebih memilih bekerja sebagai Petani yang kemudian disusul bekerja sebagai Pedagang, Perhotelan dan Restoran sebesar (30,1%). Kondisi ini sesuai dengan julukan Kota Batu sebagai kota Agropolitan yaitu Kota Wisata yang masih dominan kegiatan pertaniannya. Kegiatan Pariwisata yang ada di Kota Batu, memberikan efek berganda terhadap perkembangan sektor-sektor pendukung lainnya (Batu Dalam Angka: 2-6, 2012).

2. Gambaran Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu

Dalam sebuah Pemerintahan kota/daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas untuk menyusun sebuah kebijakan demi menyejahterakan masyarakatnya, khususnya di era otonomi daerah sekarang, dimana daerah diberikan kewenangan/kekuasaan untuk membuat sebuah peraturan-peraturan atau sebuah kebijakan yang baru tanpa keluar dari konteks kebijakan yang telah dicetuskan oleh pemerinta pusat. Begitupun

salah satunya di Kota Batu. DPRD di Kota Batu beranggotakan atas 25 Orang dari 12 partai politik yang berbeda-beda, diantaranya:

1. 5 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. 3 orang dari Partai Golongan Karya
3. 3 orang dari Partai Hati Nurani Rakyat
4. 3 orang dari Partai Amanat Nasional
5. 3 orang dari Partai Demokrat
6. 2 orang dari Partai Indonesia Baru
7. 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera
8. 1 orang dari Partai Barisan Nasional
9. 1 orang dari Partai Marhaenisme Nasional
10. 1 orang dari Partai Patriot Pancasila
11. 1 orang dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama
12. 1 orang dari Partai Karya Peduli Bangsa

Dari ke 25 anggota tersebut terpilih 2 perwakilan dari partai PDIP sebagai pucuk pimpinan dan Badan Kehormatan dalam Sekterariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Batu, yaitu: Bapak Suliadi sebagai pimpinan DPRD Kota Batu dan Bapak Cahyo Edi Purnomo Spd, SH. MH. Sebagai pimpinan badan kehormatan DPRD Kota Batu. Kemudian terdapat 1 perwakilan dari Partai Golkar yang menjabat sebagai wakil ketua 1 pimpinan DPRD Kota Batu, yaitu Mohamad Suhadi SH, yang ditemani dengan Drs. H. Sugeng Hariono, perwakilan partai Hanura sebagai wakil ketua 2 pimpinan DPRD Kota Batu. Begitupun dalam Badan Kehormatan DPRD juga terdapat

perwakilan dari partai hanura sebagai wakil ketua 1 yaitu bapak Heli Sulyanto serta perwakilan dari Partai Amanat Nasional sebagai anggota Badan Kehormatan, yaitu bapak H. Sugeng Minto Basuki, SH. MM.

Selain dari sisi keanggotaan dan struktur kepemimpinan, DPRD Kota Batu, juga memiliki 3 Komisi, yaitu: Komisi A yang mengemban tugas tentang Pemerintahan, Hukum, dan Ketenagakerjaan, kemudian Komisi B yang mengemban tugas tentang Perekonomian, Keuangan dan Lingkungan Hidup, serta Komisi C yang mengemban tugas tentang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Dari kesemua ketiga komisi ini diharapkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, bisa semakin meningkat tanpa mengabaikan pembangunan yang pro rakyat dan pro lingkungan hidup agar budaya pertanian di Kota Batu tidak menghilang

a. Visi Misi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Batu Tahun 2009-2014,

Dalam menjalankan roda pemerintahan maka setidaknya terdapat visi dan misi yang mendasari sebagai tujuan dari pemerintahan tersebut. Berikut Visi dan Misi Sekretariat DPRD kota Batu tahun 2009-2014, yaitu:

VISI:

“Mewujudkan DPRD yang kredibel, kapabel, dan aksestabel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah NKRI serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.”

Sedangkan misi dari DPRD Kota Batu adalah:

1. Meningkatkan kualitas produktivitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
2. Menjunjung tinggi moralitas agama dan kapasitas sebagai anggota DPRD;
3. Berpihak pada kepentingan rakyat atau masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Meningkatkan kerjasama dan profesionalisme anggota DPRD;
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
6. Menjadikan Lembaga Dewan sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggungjawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya;
7. Menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
8. Mendorong terwujudnya Lembaga Legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi Lembaga DPRD.

b. Kedudukan DPRD Kota Batu

Terdapat dua kedudukan DPRD Kota Batu dalam menjalankan rodak pemerintahan, yaitu:

1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Batu;
2. DPRD sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

c. Fungsi DPRD Kota Batu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan:

1. Legislasi, ini diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
2. Anggaran, ini diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

d. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Batu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan visi dan misi Kota Batu tahun 2009-2014, yaitu:

1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah.
6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
7. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.

3. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu

Kota Batu yang terbentuk pada tahun 2001 ini adalah salah satu bentuk dari pemerintahan dari yang awal mulanya sentralisasi menjadi desentralisasi/otonomi daerah. Oleh karena itu sebuah daerah yang menerapkan sistem desentralisasi/otonomi daerah ini membentuk sebuah badan perencanaan yang mengatur segala bentuk perencanaan pembangunan yang terjadi di Kota Batu. Badan tersebut disebut sebagai Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu. Selain itu hal ini juga menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007, tentang organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, BAPPEDA perlu membentuk sebuah struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Bahwa berdasarkan peraturan daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu No 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu, membentuk

struktur organisasi baru di BAPPEDA Kota Batu. BAPPEDA Kota Batu merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang disusun oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas BAPPEDA Kota Batu yaitu perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tugas BAPPEDA Kota Batu sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah harus meningkatkan profesionalitas serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dan *Good Governance*. Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan *Good Governance* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang potensial. Akibatnya dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan Kota Batu. Oleh sebab itu, kualitas dan sikap aparatur mempengaruhi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

a. Visi dan Misi BAPPEDA Kota Batu Tahun 2007-2012, dan Tujuan BAPPEDA Kota Batu

Visi BAPPEDA Kota Batu Tahun 2007-2012 adalah: “Terwujudnya Perencanaan Kota Wisata Berbasis Pertanian yang Aspiratif, Terpadu dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun misi BAPPEDA Kota Batu Tahun 2007-2012, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu, dan partisipatif berbasis keunggulan lokal.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi perencanaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bersih.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

b. Tujuan BAPPEDA Kota Batu

Berikut beberapa tujuan dari BAPPEDA Kota Batu untuk menunjang dan menjalankan visi dan misi yang ada, sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan melalui pemantapan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan secara kreatif dan inovatif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung
3. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Batu

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun anggaran 2007-2012 adalah:

1. Tugas Pokok Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan.

Fungsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memiliki fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan Pola dasar Pembangunan Daerah (POLDAS), Rencana Strategis (RENSTRA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).
2. Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah serta pengembangan kawasan strategis daerah
3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Tim Anggaran
4. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan
5. Pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi pendokumentasian serta pemvisualisasian hasil pelaksanaan pembangunan
6. Penyampaian persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
8. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, peralatan dan perlengkapan badan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

d. Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Batu (Bidang Ekonomi).

Berdasarkan peraturan Walikota terbaru Kota Batu, maka tugas pokok dan fungsi dari bidang Ekonomi dalam Badan Perencanaan dan Pembangunan

Kota Batu adalah: merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Ekonomi;
2. pembinaan dan pengendalian kegiatan perencanaan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, industri dan pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi, dan bantuan dalam/luar negeri;
3. pembinaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
4. pembinaan penyusunan program pembangunan di bidang ekonomi;
5. pembinaan penyusunan program tahunan di bidang ekonomi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
6. pengendalian kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ekonomi;
7. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi kegiatan bidang;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Perencanaan Ekonomi terbagi atas 2 sub bagian, yaitu:

- **Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. pengolahan data di bidang pariwisata dan pertanian;
 - c. penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pariwisata dan pertanian;
 - d. penyusunan program tahunan di bidang pariwisata dan pertanian ;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pariwisata dan pertanian;
 - f. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi kegiatan sub bidang;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi.
- **Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Sub Bidang;
 - b. pengolahan data di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - c. penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - d. penyusunan program tahunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi kegiatan bidang;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu adalah dinas yang membawahi program-program mengenai program Pertanian salah satunya program Agropolitan di Kota Batu. Oleh karena itu Visi dan Misi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu adalah:

a. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tahun 2013-2018, Tujuan dan Sasaran.

1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2013

Smith (1994: 14) mengartikan visi kurang lebih sebagai gambaran yang jelas (*clear image*) tentang wujud masa depan yang mengendalikan rencana strategis. Lebih lanjut Bryson dalam Kuncoro (2006) mengemukakan bahwa formulasi visi amat penting bagi arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang diformulasikan. Visi yang baik (*vision of succes*) dapat didefinisikan sebagai deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya.

Merujuk pendapat tersebut, formulasi visi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu tahun 2013-2017 adalah:

“SISTEM PERTANIAN BERBASIS ORGANIK YANG BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN DIDUKUNG HUTAN YANG LESTARI ”

Sedangkan untuk mendukung visi tersebut maka diperlukan misi untuk menjalankan visi tersebut. Menurut Coulter dalam Kuncoro (2006), misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi.

Adapun pernyataan misi, pada hakekatnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut; (1) dirumuskan untuk menggerakkan organisasi; (2) menggambarkan arah kemana organisasi dibawa; (3) mengarah pada pencapaian visi; (4) merupakan strategi atau tindakan yang akan dilakukan namun masih bersifat umum belum spesifik dan operasional. Merujuk pada pendapat tersebut maka rumusan misi pada Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik.
- b. Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu.
- c. Meningkatkan agribisnis dan agroindustri berbasis pertanian domestik pedesaan.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
- e. Meningkatkan promosi dan daya saing produk pertanian lokal.
- f. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan/perbenihan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan

masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.

- g. Mempertahankan eksistensi dan fungsi kawasan hutan.
- h. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

2. Tujuan dan Sasaran

Bila visi, misi dan pernyataan sasaran ingin dipenuhi, tujuan strategik harus diidentifikasi. Tujuan lebih spesifik daripada sasaran. Tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT organisasi dalam perspektif arah strategik. Tujuan tergantung kepada misi, sasaran, kebijakan, strategi, analisis internal dan eksternal, dan hasil SWOT (Kuncoro, 2006). Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu selama periode lima tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap

alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi yang telah ditetapkan, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 2013-2018**

Misi 1 : Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik	
Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pertanian organik yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.	1. Mewujudkan perubahan pola pikir masyarakat petani dan organisasinya dari pertanian non organik menjadi pertanian organik.
	2. Mewujudkan sistem pertanian organik.
	3. Menghasilkan produk pertanian organik yang dapat diterima oleh masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
	4. Mewujudkan pertanian organik yang dapat bersinergi dengan bidang pariwisata.
	5. Memfokuskan aspek penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik.
	6. Meningkatkan kesejahteraan petani.
Misi 2 : Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu	
Tujuan	Sasaran
Membentuk Sumber Daya Manusia bidang pertanian yang handal secara teknis berbasis keilmuan.	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian organik melalui peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya.
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan yang dapat diberikan kepada masyarakat petani.

	3. Memberikan informasi pertanian secara terus menerus kepada semua pelaku agrobisnis dan masyarakat melalui sebuah sistem informasi.
Misi 3 : Meningkatkan Agrobisnis dan Agroindustri Berbasis Pertanian Domestik Pedesaan	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya sistem pertanian dari hulu sampai hilir yang bersinergi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan pedesaan.
	2. Menjaga kelancaran aktifitas pertanian.
	3. Memfasilitasi pemasaran hasil-hasil pertanian.
Misi 4 : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang optimal.	1. Meningkatkan produktivitas semua komoditas pertanian secara luas termasuk peternakan dan perikanan.
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian organik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi yang efektif.
	3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas proses dan hasil pertanian dari sisi pemanfaatan teknologi pertanian.
	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka memenuhi permintaan pasar dan ketahanan pangan.
Misi 5 : Meningkatkan Promosi dan Daya Saing Produk Pertanian Lokal	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya jaringan pemasaran yang luas, kontinyu dan berdaya saing.	1. Meningkatkan daya saing produk pertanian terutama organik dalam persaingan pasar lokal, regional, dan nasional.
	2. Meningkatkan penjualan hasil pertanian terutama organik melalui pasar yang lebih luas
	3. Menjaga statistik penjualan hasil pertanian terutama organik melalui keluasaan pasar yang telah diraih

Misi 6 : Menyelenggarakan dan Menggerakkan Pengembangan Perbibitan/Perbenihan, Pakan, Budidaya, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Dalam Mencapai Penyediaan dan Keamanan Pangan Hewani Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Peternak dan Pembudidaya ikan

Tujuan	Sasaran
Meraih keunggulan hasil peternakan dan perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.	1. Menghasilkan produk peternakan dan perikanan yang jenis, jumlah dan kualitasnya dibutuhkan oleh masyarakat umum dan industri.
	2. Memenuhi permintaan pasar terhadap daging, telur dan bahan baku ikan dari usaha-usaha makanan berbahan dasar ikan
	3. Meningkatkan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan
	4. Menstabilkan dan meningkatkan usaha bidang peternakan dan perikanan komersial dan usaha produk olahan

Misi 7. Mempertahankan Eksistensi dan Fungsi Kawasan Hutan

Tujuan	Sasaran
Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara teratur untuk memperoleh kemanfaatan konservasi tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.	1. Memelihara keunggulan sumber daya alam hutan sebagai hutan resapan air dan keindahan panorama.
	2. Memelihara keunggulan sumber daya mata air.
	3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
	4. Melindungi lingkungan dari pencemaran dan perusakan.
	5. Mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Misi 8. Meningkatkan dan Mengembangkan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

Tujuan	Sasaran
Perlindungan habitat, flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah serta terciptanya iklim pengusahaan hutan yang bijak dan	1. Menjaga lingkungan terhadap terjadinya bencana sebagai akibat dari perubahan iklim.
	2. Memanfaatkan hasil kekayaan hutan

normatif sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari.	secara terus-menerus dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
	3. Memulihkan kualitas lingkungan.

5. Gambaran Umum Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu

a. Kondisi Geografis Desa Gunungsari

Gunungsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Desa ini memiliki luas wilayah total 382,006 Ha dengan sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh ladang/*tegalan* dengan luas 134,385 dan sawah irigasi dengan luas 127,496. Desa Gunungsari ini memiliki suhu 23⁰C, curah hujan 2700mm/th dengan ketinggian wilayah 1000 meter di atas permukaan laut, hal ini cocok untuk mengembangkan potensi pertanian dan potensi peternakan. Secara administratif desa Gunungsari berbatasan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota batu, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan desa punten Kecamatan Bumiaji, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Batu, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandesari Kecamatan Pujon, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Batu. Berdasarkan penjelasan Geografis diatas maka jarak antara desa ke ibukota kecamatan terdekat adalah 2,5 km dengan estimasi waktu 0,25 jam. Serta jarak antara desa ke ibukota kabupaten/kota terdekat adalah 4 km dengan estimasi waktu 0,5 jam (Profil Gunungsari, 2006).

b. Kondisi Demografis

Desa Gunungsari adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan pedagang. Berdasarkan data administratif, jumlah penduduk Desa Gunungsari adalah 6607 orang dengan Komposisinya 3342 berjenis kelamin laki-laki dan 3265 berjenis kelamin perempuan yang berasal dari 1708 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Desa Gunungsari berdasarkan usia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

USIA	JUMLAH
0-5	848
6-10	560
11-15	573
16-20	622
21-25	562
26-30	646
31-35	589
36-40	517
41-45	456
46-50	345
51-55	291
>55 tahun	168
TOTAL	6177

Sumber: Profil Gunungsari, 2006.

c. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

1. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan produktivitas, perekonomian serta kesejahteraan hidup, khususnya di desa Gunungsari. Berikut daftar pendidikan yang dienyam oleh masyarakat di Desa Gunungsari

Tabel 6 Tingkat Pendidikan di Desa Gunungsari

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD, Buta Huruf	1405
2	Tamat SD	2949
3	Tamat SLTP	796
4	Tamat SLTA	421
5	Tamat D.I/D.II/D.III	38
6	Tamat S1	25
Jumlah Total		5634

Sumber: Profil Gunungsari 2006

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya kondisi pendidikan di Desa Gunungsari cukup rendah. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Gunungsari hanya tamatan SD, serta terdapat masyarakat yang tidak tamat SD/buta huruf yaitu berjumlah 1405. Bahkan tidak ada pendidikan non Formal lain seperti pendidikan keterampilan mengenai las, menjahit dan lain sebagainya, untuk mendukung pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Gunungsari. Hal ini Pola pikir dan lingkungan di Gunungsari yang sudah kental dengan pertanian dan peternakan sehingga banyak dari mereka bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

2. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat di Desa Gunungsari Beraneka ragam, seperti Petani, perdagangan/jasa, dan pekerjaan disektor industri. Oleh karena itu tingkat pendapatan di desa Gunungsari ini hanya berkisar Rp.700.000-1.000.000. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gunungsari cukup rendah, serta tidak ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik

lagi. Hanya petani-petani seperti bapak Sul Khan, bapak Sayadi yang memiliki kondisi perekonomian dan kesejahteraan tinggi karena beliau mampu menangkap peluang untuk mengembangkan pertaniannya. Dari kesemua masyarakat di Desa Gunungsari ini kurang dari 2000 orang yang memiliki pekerjaan. Sebesar 754 orang bekerja sebagai petani, 425 orang bekerja sebagai pedagang/bergerak di bidang jasa dan 234 orang bekerja di sektor industri. Jadi bisa disimpulkan tingkat pengangguran di Desa Gunungsari cukup tinggi.

d. Potensi Pertanian di Gunungsari

Desa Gunungsari adalah salah satu desa yang diproyeksikan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan, hal ini disebabkan karena potensi pertanian di desa ini yang sangat menjanjikan. Berdasarkan sejarahnya memang desa Gunungsari sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani, karena kontur dan kondisi Geografis Desa Gunungsari yang sangat berdekatan dengan wilayah pegunungan dan terletak di dataran tinggi. Sehingga pertanian yang ada sudah berjalan dahulu sebelum kebijakan Agropolitan ini muncul. Selain itu di Desa Gunungsari ini terdapat potensi-potensi pendukung lainnya yang cukup menjanjikan dalam mengembangkan Agropolitan di Kota Batu, yaitu potensi peternakan dan perkebunan. Hal ini dibuktikan dengan luas wilayah pertanian irigasi di Desa Gunungsari seluas 127,496 ha serta luas ladang adalah 134,385 ha (Profil Gunungsari, 2006).

6. Gambaran Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu

a. Sejarah Pemerintahan Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo pada awalnya adalah merupakan gabungan antara dua desa yang masing-masing adalah Dusun Sukorembug dan Dusun Tonggolari yang merupakan suatu desa bernama desa Purworejo dengan Kepala Desanya bernama M. Singorejo. Sedangkan desa yang kedua adalah Desa Tinjumoyo dengan Kepala Desa bernama Ramani. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1947 dan bersepakat untuk menjadi satu desa yang dinamakan Desa Sidomulyo (Profil Sidomulyo 2012).

Ditetapkannya Desa Sidomulyo sebagai salah satu pemerintahan desa di Kecamatan Batu ini cukup memiliki andil dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Sidomulyo ini. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat di Sidomulyo bermata pencaharian sebagai petani khususnya dalam hal komoditas Apel. Namun pada tahun millennium atau sekitar tahun 1993 sampai sekarang pertanian di Kota Sidomulyo sudah tidak mengolah komoditas Apel lagi melainkan komoditas bunga mawar dan bunga krisan. Adanya perubahan tersebut mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Subandri yaitu Bapak Penanggung Jawab Sementara Desa Sidomulyo.

“pada saat itu, penduduk desa Sidomulyo bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani dalam hal komoditas Apel. Di saat itu keuntungan akan 1 Kg apel saja sudah luar biasa banyaknya, namun sekarang ini apel sudah tidak menguntungkan analoginya dengan 50 Kg apel baru bisa beli obat saja mas. Jadi berubah lah masyarakat menjadi petani komoditas bunga. Hal ini juga sudah bisa mengangkat

perekonomian masyarakat di Sidomulyo mas. Ya Alhamdulillah perekonomian masyarakat sudah meningkat lagi mas”. (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2013, pada pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Sidomulyo).

Dari semua perkembangan itu hal ini tidak bisa dilepaskan dari jasa para pemimpin Kepala Desa Sidomulyo. Sejak ditetapkannya Sidomulyo sebagai pemerintahan desa terhitung mulai dari tahun 1947 sampai sekarang ini sudah ada 7 kepala desa yang menjabat di dalamnya, diantaranya:

Tabel 7 Daftar Kepala Desa Sidomulyo

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Darso	1947 – 1952
2	Rakimun	1952 – 1958
3	Sarnam	1958 – 1959
4	Armonodihardjo	1959 – 1967
5	Kasmari Soehardjo	1967 – 1990
6	Subekti	1990 – 2007
7	Jatmiko	2007 sampai sekarang

Sumber: *Profil Sidomulyo 2012*.

b. Kondisi Geografis Desa Sidomulyo

Secara Geografis Desa Sidomulyo berada di 850 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 23⁰C. Luas wilayah Desa Sidomulyo adalah 270,821 hektar dengan luas lahan pertanian yang berupa sawah irigasi seluas 184,021 hektar yang berarti separuh lebih dari luas wilayah Desa Sidomulyo. Dengan jumlah penduduk sebesar 7.649

jiwa dan yang bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani sebanyak 3.000 orang. Secara administratif desa Sidomulyo terletak di Kecamatan Batu yang berbatasan dengan desa-desa di sekitarnya. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Bumiaji, sebelah Timur Berbatasan langsung dengan Kecamatan Bumiaji, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Sisir dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Sumberjo, Kecamatan Batu.

c. Kondisi Demografis

Desa Sidomulyo adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan pedagang. Berdasarkan data administratif Desa Sidomulyo, jumlah penduduk Desa Sidomulyo adalah 7649 orang dengan rinciannya 3727 berjenis kelamin laki-laki dan 3922 berjenis kelamin perempuan yang berasal dari 2206 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Desa Sidomulyo berdasarkan usia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
0-3	197
4-6	189
7-12	803
13-15	401
16-18	395
19 tahun keatas	5535

Sumber: Profil Sidomulyo 2012

d. Kondisi Pendidikan, dan Ekonomi Masyarakat

1. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang utama dalam menunjang kinerja, produktivitas dan perekonomian dari masing-masing masyarakat di Desa Sidomulyo. Berikut daftar pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat di Desa Sidomulyo.

Tabel 9 Tingkat Pendidikan di Desa Sidomulyo

No	Keterangan	Jumlah
1	Tamat TK	180
2	Tamat SD	790
3	Tamat SLTP	395
4	Tamat SLTA	327
5	Tamat D.I/D.II/D.III	545
6	Tamat S1	512
Jumlah		2749

Sumber: *Profil Sidomulyo 2012.*

Dengan melihat tabel diatas bahwasannya sebagian besar masyarakat di Desa Sidomulyo ini sebagian besar adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu berjumlah 790 orang. Akan tetapi ada juga penduduk yang menyelesaikan masa belajarnya 9 tahun (SD-SMP) bahkan ada yang menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (SD-SLTA), yang menarik disini adalah Tamatan S1 menempati peringkat ketiga setelah lulusan SD dan D.I/D.II/D.II. Hal ini menunjukkan bahwa sadar belajar di Desa Sidomulyo ini sangat tinggi sehingga tingkat perekonomian desa Sidomulyo terhitung meningkat dan cukup tinggi daripada desa-desa lainnya.

2. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi Perekonomian di Desa Sidomulyo ini beraneka ragam, seperti halnya Pertanian, Buruh Tani, PNS dan Berprofesi sebagai pedagang, sedangkan minat terhadap profesi di bidang jasa ini dikategorikan cukup rendah bahkan tidak ada. Tingkat pendapatan rata-rata dari masyarakat Desa Sidomulyo ini berkisar Rp, 1.500.000-Rp, 2.000.000 tiap bulannya. Berikut daftar pekerjaan/mata pencaharian dari Masyarakat Desa Sidomulyo.

Tabel 10 Mata Pencaharian Masyarakat di Sidomulyo

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	1000
2	Buruh Tani	2000
3	PNS	185
4	Pedagang/Dagang	1000
5	Jasa	-
6	Lain-Lain	-
Jumlah		3.185

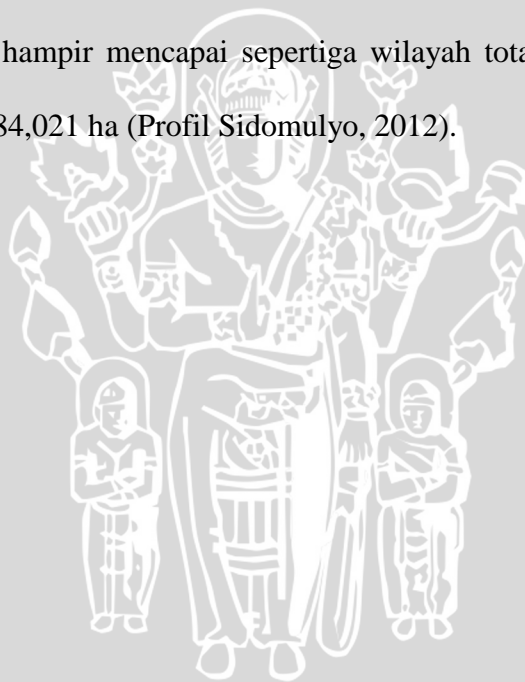
Sumber: Profil Sidomulyo 2012

Berdasarkan data diatas maka sebagian besar pekerjaan masyarakat di Desa Sidomulyo adalah buruh tani berjumlah 2000 orang lalu Petani dan Pedagang 1000 orang dan bekerja sebagai PNS berjumlah 185. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini bisa disimpulkan tingkat pengangguran di Sidomulyo cukup rendah.

e. Potensi Pertanian Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo adalah salah satu desa yang diproyeksikan sebagai Pengembangan Kawasan Agropolitan, hal ini disebabkan karena potensi pertanian di desa ini yang sangat menjanjikan. Berdasarkan sejarahnya

memang desa Sidomulyo sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani, karena kontur dan kondisi Geografis Desa Sidomulyo yang sangat berdekatan dengan wilayah pegunungan dan terletak di dataran tinggi. Sehingga pertanian yang ada sudah berjalan dahulu sebelum kebijakan Agropolitan ini muncul. Dalam perjalanannya komoditas yang ditanam oleh para petani di Sidomulyo ini cukup beraneka ragam dan bervariasi mulai dari komoditas Apel sampai sekarang Komoditas Bunga. Hal ini dibuktikan dengan luas wilayah pertanian irigasi di Desa Sidomulyo ini hampir mencapai sepertiga wilayah total desa Sidomulyo yaitu sebesar 184,021 ha (Profil Sidomulyo, 2012).



B. Penyajian Data Fokus Penelitian.

1. Proses Perumusan Kebijakan Tentang Agropolitan di Kota Batu.

Pada periode 2009-2014 Indonesia memiliki an-cang-an-cang untuk mengembalikan, memajukan dan *maintain* (menjaga) potensi pertanian di tingkat dunia. Baik itu mengenai hasil pertanian hortikultura, peternakan, serta hasil perkebunan. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia meneruskan dan menjaga swasembada pertanian khususnya beras yang telah terjadi di tahun 2004 silam. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/QT.140/9/2009 tentang kriteria kawasan peruntukan pertanian di Indonesia. Dari kedua dua produk hukum tersebut telah diatur mengenai penetapan kawasan Agropolitan.

Konsep mengenai Agropolitan ini tertuang pada manfaat dari adanya penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian poin f di peraturan menteri pertanian nomor 41/Permentan/QT.140/9/2009, bahwasannya dengan adanya Agropolitan dapat menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tank kawasan pedesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata. Namun berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 definisi mengenai kawasan berbasis Agropolitan ini adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber

daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Penjelasan mengenai Kawasan Agropolitan tersebut diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi pemukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakkan jaringan prasarana. Dengan adanya pembentukan kawasan Agropolitan ini maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan investasi baik itu dari domestik dan lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tujuan dari adanya pembentukan kawasan Agropolitan tersebut tidak terlepas dari ciri-ciri wilayah yang harus dipenuhi agar kota tersebut berfungsi sebagai pusat agropolitan. Menurut Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan) tahun 2012 bahwa suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan Agropolitan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
 - subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.

- Subsistem usaha tani/pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
 - Subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor,
 - Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
- b. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.
- c. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.

- d. Kehidupan masyarakat di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada dikawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka sebuah kota bisa disebut sebagai Kawasan Agropolitan/pusat Agropolitan juga harus memiliki beberapa persyaratan, menurut Pedoman Agropolitan Nasional persyaratan tersebut diantaranya adalah:

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
- b. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
- c. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.

- d. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/QT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, bahwa tipologi lahan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) kawasan bisa dikatakan baik dan layak baik sekurang-kurangnya harus berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan Agroklimat ini.

Tabel 11 Tipologi Lahan Kawasan Berdasarkan Kesesuaian Lahan dan Persyaratan Agroklimat

NO	Kawasan	Kesesuaian Lahan	Persyaratan Agroklimat
1	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng <8%), kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, memiliki dan atau tidak memiliki prasarana irigasi untuk pengembangan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
2	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3, dan tersedia sumber air yang cukup	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
3	Perkebunan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat
4	Peternakan	Dataran rendah dan dataran tinggi sampai berbukit di luar pemukiman dengan sistem sanitasi yang cukup. Tidak berada di permukiman dan memperhatikan aspek lingkungan.	Disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 41/Permentan/QT.140/9/2009

Kebijakan mengenai Agropolitan ini merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, yang kemudian diteruskan menuju pemerintahan provinsi lalu kabupaten/kota. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota ini, maka Gubernur Jawa Timur memasukkan agenda pertanian ke dalam Sembilan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2011. Hal tersebut didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Pengembangan Kawasan Agropolitan ini pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan yang bersifat *exclusive* tetapi lebih bersifat *complement* terhadap tiga agenda prioritas pembangunan di Jawa Timur tahun 2009-2014, yaitu:

- a. Meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian di perdesaan
- b. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik* dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

- c. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perubahan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang

Berdasarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, maka ini bisa menjadi jalan potensial untuk mengembangkan pertanian yang dimiliki oleh Indonesia khususnya di Jawa Timur ini. Salah satunya adalah Kota Batu. Akan tetapi Kota Batu telah menjadi kawasan Agropolitan Mandiri karena hal ini merupakan peningkatan status administratif dari kawasan agro di Kabupaten Malang menjadi Kota Batu pada tahun 2001. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian, yaitu:

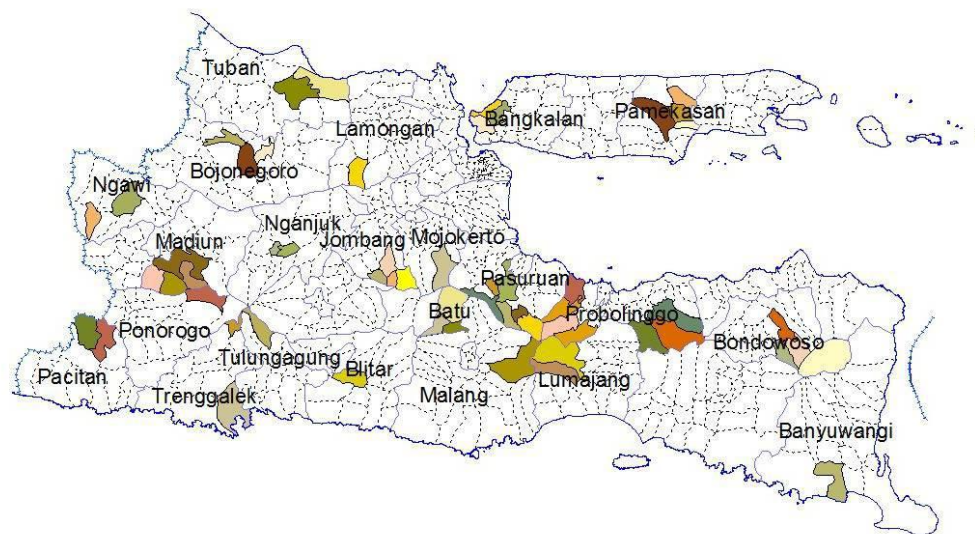
“iya mas untuk Agropolitan di Kota Batu sudah ada sejak dulu bahkan ketika Kota Batu sudah mengalami peningkatan status menjadi Kota dan berpisah dari Malang mas, ya selain itu, dulu Masyarakat Kota Batu sudah bermata pencaharian sebagai petani mas sehingga berjalan lah mereka secara mandiri, kemudian dari pihak pemerintah mulai melegalkan Agropolitan dan sudah keluar perdanya mas”. (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013, pukul 13.30 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Selain dari bapak Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian, hal senada juga diungkapkan oleh mas Arif salah satu petani di Gunungsari yang mengetahui adanya Agopolitan di Kota Batu.

“kalau mengenai Agropolitan ini ya sudah dulu mas berjalannya bahkan ketika saya masih kecil, karena boleh dibilang masyarakat Kota Batu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani mas, kan baru-baru ini aja kebijakan Agropolitan itu muncul, hal ini disebabkan produk pertanian khususnya bunga mawar potong Gunungsari, Sidomulyo banyak yang berminat serta harganya murah-murah mas jadi tengkulak di luar jawa banyak yang pesan”. (Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2013, pukul 12.00 di Kediaman Mas Arif di Desa Gunungsari).

Berdasarkan penjelasan dan pernyataan baik itu dari Bapak Sariono dan Mas Arif, maka Kota Batu telah dijadikan sebagai Kawasan Agropolitan Mandiri, hal ini juga didukung dengan kontur Kota Batu yang bergunung-gunung dan terletak di dataran tinggi yang sejuk. Sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tempat/kawasan Agropolitan secara mandiri. Hal ini Sesuai dengan Pedoman Agropolitan Jawa Timur Tahun 2011, bahwa terdapat 24 kota salah satunya Kota Batu yang dijadikan kawasan Agropolitan di Jawa Timur, berikut peta persebaran Kawasan Agropolitan di Jawa Tmur:





Gambar 4
Peta Sebaran
Kawasan Agropolitan 2012

Sejak ditetapkannya Kota Batu sebagai salah satu kawasan Agropolitan, maka pemerintahan Kota Batu bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran SKPD, telah menelurkan tiga kebijakan sebagai dukungan terhadap penetapan Batu sebagai pusat Agropolitan. Kebijakan yang pertama adalah perumusan/pembuatan RTRW Kota Batu Tahun 2003-2013 yang bertujuan untuk Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Berdasarkan pemaparan diatas bahwasannya kebijakan yang pertama ini memiliki sasaran untuk melindungi kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya di Kota Batu, melakukan penataan ruang yang seimbang antara kawasan pertanian, non pertanian dan kawasan hutan lindung di Kota Batu.

Sesuai dengan perumusan RTRW Tahun 2003 ini maka diharapkan fungsi dan Peran Kota Batu diarahkan menjadi Kota Pertanian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Kota Batu sebagai Kota Pertanian ini adalah mengarahkan Kota Batu sebagai sentra pertanian khususnya pada komoditas tanaman pangan, tanaman hortikultura (sayur mayur, tanaman buah, tanaman bunga hias, tanaman obat atau toga), tanaman perkebunan dan peternakan, Peningkatan sumber daya petani dan kelembagaan terutama pada kelompok tani dan koperasi, Pengembangan budidaya mutu produksi pertanian supaya dapat bersaing dalam lingkup regional, nasional dan internasional dengan peningkatan dan pengembangan pengolahan (intensifikasi) yang didukung

sarana dan prasarana pertanian (bibit, pupuk, irigasi) serta teknologi pertanian, Pengembangan pemasaran produksi pertanian yang terpadu dengan pembangunan pasar agribisnis, Pengembangan Industri Pertanian (Agro Industri) (RTRW 2003, Kota Batu, Bab II-Hal. 17).

Berdasarkan pemaparan fungsi dan peran kota batu sebagai kota pertanian tersebut diatas, maka pemerintahan Kota Batu ingin memfasilitasi bantuan pertanian, dan memajukan pertanian di Kota Batu tersebut. Dengan pemberian sarana dan prasarana mengenai pertanian dan lain sebagainya. Karena pemerintahan Kota Batu melihat potensi dan pergerakan pertanian yang cukup menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pertanian. Sehingga kawasan ini bisa diintegrasikan dengan pengembangan Kota Batu terutama sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Kota Batu.

Kebijakan kedua yang ditelurkan oleh pemerintahan Kota Batu untuk mendukung potensi pertanian dan pembentukan Agropolitan di Kota Batu ini adalah perumusan dan pembentukan Peraturan Daerah (perda) Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. Dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa penataan Tata Ruang Wilayah Kota Batu tetap mempertahankan dan memberikan ruang tentang kegiatan Agropolitan di Kota Batu.

Pasal 8 dalam Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 ini menyatakan bahwa Tujuan Penataan Ruang kota Batu adalah untuk mewujudkan ruang kota Batu

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu sungai Brantas. Dari tujuan tersebut bisa dipahami bahwa dengan adanya Agropolitan di Kota Batu ini bisa mendukung pola pariwisata yang lebih sehat dan lebih aman, karena selain berpariwisata para wisatawan-wisatawan baik itu lokal atau mancanegara bisa menikmati hasil pertanian milik petani. Hal tersebut senada dengan pernyataan bapak Subandri selaku Penanggung Jawab Desa Sidomulyo, yang menyatakan bahwa:

“dengan adanya Agropolitan ini mas masyarakat khususnya Sidomulyo alhamdulillah sudah semakin terbantu perekonomiannya, ya setidaknya mengalami peningkatan, karena boleh dibilang mas, wisatawan kesini jalan-jalan, setelah capek baru ke Sidomulyo sambil lihat-lihat atau membeli hasil pertanian milik masyarakat”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB, di kantor Kepala Desa Sidomulyo).

Tanggapan tersebut menandakan bahwa tujuan tersebut telah tercapai dengan baik, khususnya mengenai Agropolitan dan Pariwisata di Kota Batu.

Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 juga memuat tentang kebijakan dan Strategi Penataan Ruang mengenai Agropolitan, hal ini tertuang pada pasal 10 ayat dua, bahwasannya strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat agribisnis, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal meliputi: (a). membagi wilayah kota menjadi tiga bagian wilayah kota, masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan dan menetapkan peran, fungsi, dan struktur kegiatan utama secara spesifik, (b). Membentuk pusat kegiatan kawasan agropolitan, pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat

perdagangan kota, dan pusat kegiatan pelayanan umum secara berhirarki, (c). Menyediakan ruang untuk perdagangan di kawasan agropolitan dengan cara mengarahkan secara spesifik pusat perdagangan hasil budidaya tanaman pertanian dan hortikultura, (d). Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan mudah dijangkau, (e). Mengembangkan kegiatan perkantoran yang mudah terjangkau dan nyaman. Selain itu juga tertuang pada pasal 10 ayat tiga, pasal 11 ayat 4 poin e, pasal 12 ayat 3 poin c.

Dilihat dari penetapan kawasan strategis, bahwa menurut perda Kota Batu nomor 7 tahun 2011 penetapan kawasan strategis Wilayah Kota Batu berdasarkan dua kepentingan, yaitu:

- a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi,
- b. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dari kedua kepentingan tersebut Agropolitan di Kota Batu menjadi salah satu sektor pertumbuhan perekonomian di Kota Batu, hal ini dapat tertera pada pasal 63, yaitu diantaranya:

1. Rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pertanian diarahkan untuk kegiatan:
 - a. Sub sektor tanaman hortikultura sayur mayur terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Kelurahan songkokerto, dan Desa Junrejo;

- b. Sub sektor perkebunan buah-buahan meliputi perkebunan apel memusat di Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo, perkebunan jeruk memusat di, Desa Tlekung Desa Bumiaji, Desa Oro-oro Ombo dan, dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balitjestro, dan perkebunan alpukat terdapat di Desa Tlekung dan Desa Torongrejo, perkebunan buah kesemek di Desa Tulungrejo, Desa Sumberbrantas, dan Perkebunan Strawberry di Desa Pandanrejo;
 - c. Sub sektor tanaman hias terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumberejo, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Giripurno dan Kelurahan Dadaprejo.
2. Arahan pengelolaan kawasan strategis sektor unggulan pertanian, meliputi:
 - a. Menciptakan keunggulan kawasan pertanian sub sektor hortikultura dan tanaman hias;
 - b. Mengembangkan sistem agribisnis komoditas terpilih;
 - c. Menata sub sistem hilir berupa agroindustri dan sub sistem hulu di kawasan agropolitan;
 - d. Mengaitkan Kawasan Agropolitan unggulan pertanian dengan kawasan pusat pariwisata; dan
 - e. Pengembangan agopolitan dalam bentuk kluster berbasis komoditas.

Berdasarkan keterangan diatas maka Kebijakan mengenai Agropolitan di Kota Batu menjadi salah satu agenda penting yang bisa mendorong

perekonomian dan menyejahterakan masyarakat di Kota Batu. Hal ini bisa terjadi dan bisa ditingkatkan dengan cara mengintegrasikan atau memadukan pariwisata dengan Agropolitan (pertanian) di Kota Batu.

Berdasarkan penjelasan mengenai Agropolitan di Kota Batu tersebut maka sebagai tindak lanjutnya Kota Batu mengeluarkan kebijakan ketiga mengenai pembentukan tim Kelompok Kerja (Pokja) Agropolitan di Kota Batu, yang awal mulanya kebijakan ini berubah dari Surat Keputusan Wali Kota Batu Nomor 180/59/KEP/422.01.23/2007 menjadi Surat Keputusan baru yang berisikan tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu Tahun Anggaran 2012. Dalam SK terbaru tersebut berisikan tentang susunan keanggotaan kelompok kerja pengembangan kawasan Agropolitan di Kota Batu Tahun Anggaran 2012, Sesuai dengan SK terbaru tersebut bahwa para anggota yang tergabung dalam POKJA tersebut memiliki tugas untuk:

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan
- b. Menyampaikan pedoman teknis dan bahan-bahan informasi
- c. Mengusulkan pemilihan dan penetapan lokasi kawasan agropolitan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
- d. Membantu menyusun perencanaan pengembangan kawasan agropolitan di kota batu

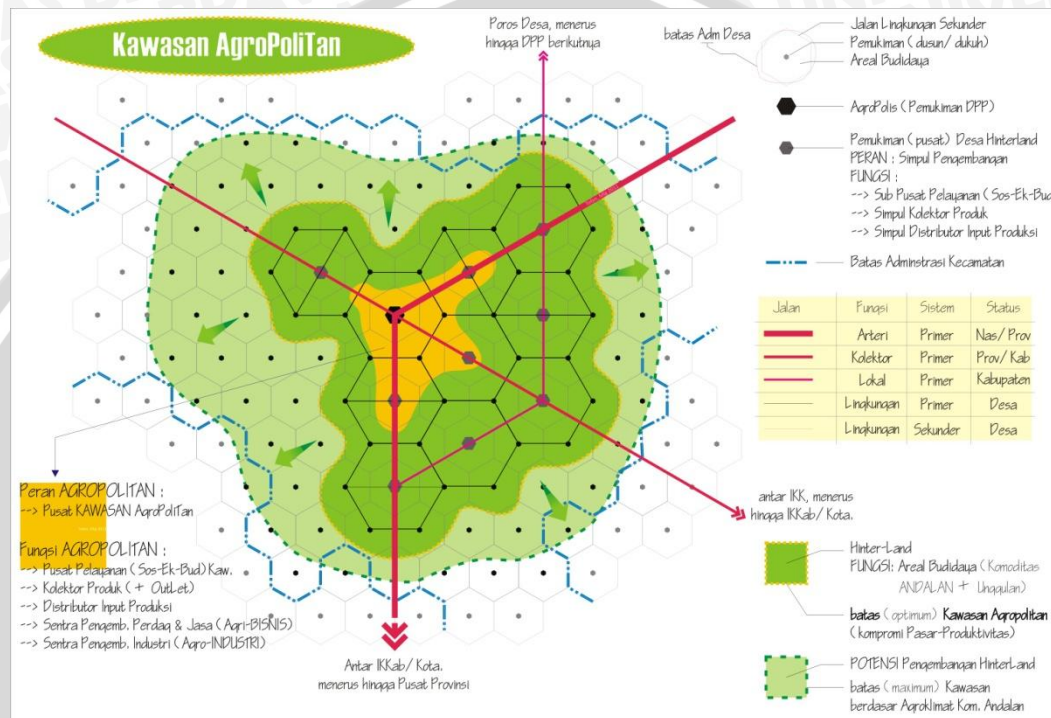
- e. Membagi peran keanggotaan POKJA ke dalam komisi-komisi kelompok pengembangan sesuai dengan fungsi-fungsi dan/atau bidang/lapangan kerja masing-masing
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- g. Merumuskan dan menyusun program pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu;
- h. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- i. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- j. Memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan.

Berdasarkan kerjasama tim yang tergabung dalam keanggotaan POKJA Agropolitan tahun 2012 tersebut, maka telah ditentukan beberapa kawasan pengembangan Agropolitan. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kota batu nomor 7 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Batu. Bahwasannya dua daerah, yaitu Gunungsari dan Sidomulyo yang akan diarahkan menjadi sentra. Dalam menentukan kawasan pengembangan Agropolitan harus mengetahui mengenai batasan-batasan yang ada.

Batasan suatu kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dsb). Berkaitan dengan ruang kegiatan budidaya pertanian (*on farm*) yang pada umumnya adalah lahan-lahan berada pada *hinterland*, maka batas (fisik)

kawasan agropolitan adalah sisi terluar dari keseluruhan sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang telah mempunyai pasar atau dapat dipasarkan (komoditi andalan dan/atau unggulan), serta berpotensi atau telah berkembang diversifikasi usaha dari komoditi andalan dan/atau unggulannya. Mengingat pengembangan kawasan agropolitan tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian (*on farm*) tetapi juga kegiatan *off farm*-nya, dan adanya sifat saling pengaruh-mempengaruhi antara serapan/permintaan pasar (produk mentah dan/atau olahan) dengan pemanfaatan lahan produksi, maka batasan kawasan agropolitan ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*.

Karena itu, penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada. Dengan demikian bentuk dan luasan kawasan agropolitan, dapat meliputi satu wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau beberapa Kecamatan dalam Kabupaten/Kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan. Kotanya dapat berupa Kota Desa atau Kota Nagari atau Kota Kecamatan atau Kota Kecil atau Kota Menengah. Konsep keruangan kawasan agropolitan tersebut dapat diterjemahkan secara skeptis pada Gambar konsep keruangan Agropolitan di bawah ini, dimana kotanya meliputi beberapa desa, dengan DPP sebagai polisnya



Sumber: Kelompok Kerja Agropolitan (Bab III-hal 8-9, 2012).

Gambar 5 Konsep Keruangan Kawasan Agropolitan.

a. Model Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning*) dalam perumusan kebijakan Agropolitan di Kota Batu

Berdasarkan penetapan konsep keruangan Kawasan Agropolitan khususnya di Kota Batu ini, maka dirancanglah beberapa Program/strategi oleh pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan produksi pertaniannya khususnya perkebunan, pertanian sayur mayur/hortikultura, tanaman bunga, tanaman hias cukup beraneka ragam. Berikut beberapa indikasi pelaksanaan program/strategi yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2007-2013, diantaranya:

1. Tahun 2007, terdapat 19 kegiatan yang sudah dilakukan di tahun tersebut, diantaranya

a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani meliputi:

1. Pertemuan/rapat koordinasi

Pertemuan koordinasi dilaksanakan dengan maksud untuk menyamakan persepsi serta memberikan arahan dalam penyusunan rencana/program kerja baik dalam hal aspek-aspek administrasi serta manajemen agar menjadi organisasi yang tangguh dan mandiri. Pertemuan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali pada tiap-tiap gapoktan dengan melibatkan motivator dan fasilitator dari Diperta Kota Batu dan PPL.

2. Dilakukan kompetisi setiap tahun, kelompok tani dalam tiap-tiap gapoktan meliputi bidang administrasi, kelembagaan serta budidaya dan memberikan reward pada kelompok berdasarkan hasil kompetisi dan berdasarkan urutan ranking.

3. Pembentukan badan hukum keanggotaan gapoktan

Pembentukan badan hukum gapoktan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka legalisasi badan usaha secara formal untuk menjadi sebuah organisasi yang tangguh dan mandiri. Pembentukan badan hukum diperuntukkan kepada 9 gapoktan di Kota Batu yaitu Gapoktan Sri Mulyorejo, Gapoktan Mitra Arjuna, Gapoktan Kado Satria, Gapoktan Satwa Jaya, Gapoktan Andhini Sejahtera, Gapoktan Mekarsari, Gapoktan Vegori, Gapoktan Apel Batu Lestari dan Gapoktan Batu Bersatu.

4. Pengadaan kelengkapan administrasi

Kelengkapan administrasi diperlukan untuk menunjang kelancaran proses administrasi dalam manajemen gapoktan yang baru terbentuk, untuk itu kepada 6 gapoktan baru diberikan papan nama secretariat, kertas kop dan amplop berlogo serta stempel logo gapoktan masing-masing, termasuk pada 3 gapoktan sebelumnya sehingga semuanya ada 9 gapoktan.

b. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar meliputi :

1. Mengikuti pameran/ekspose pertanian baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

2. Memperluas informasi mengenai potensi pertanian di Kota Batu melalui pengembangan website. Dengan adanya website Dinas Pertanian Kota Batu maka informasi pertanian lebih mudah diakses oleh setian pihak yang membutuhkan.
3. Melengkapi kebutuhan perlengkapan untuk tujuan kelancaran pameran/ekspose.

c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan meliputi:

1. Pelatihan Pengolahan Produksi Lokal dan Limbah Pangan
Dilaksanakan

pada tanggal 4 – 5 April 2007 bertempat di Balai Desa Sumberjo dengan jumlah peserta 30 orang dari perwakilan pengelola warung sekolah dan warung desa serta TP PKK desa/kelurahan/kecamatan.

Pemateri pelatihan :

- a. Ir. Moh. Chin Fahmi : Direktur PT. Cahaya Abadi Tunggal
- b. Drh. Siti Aisyah Indriastati, M.Si : Dosen Fakultas Teknologi Hasil Ternak Universitas Muhammadiyah Malang

2. Gelar Potensi Pangan Olahan dalam rangka Hari Krida Pertanian ke 35 Tahun 2007 Diselenggarakan Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2007 bertempat di halaman Kantor Puspa Lebo. Kota Batu diwakili oleh TP PKK Kel. Ngaglik, Diperta Kota Batu dan TP PKK Kota Batu.

3. Lomba Cipta Menu Tingkat Kota Dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2007 bertempat di Balai Desa Sidomulyo. Lomba ini diikuti oleh 6 peserta yang tiap kecamatan diwakili oleh 2 kelompok peserta. Pelaksanaan lomba dibuka oleh Ibi Ketua TP PKK Kota Batu dengan Dewan Juri dari TP PKK Kota, Dinas Kesehatan, SMKN 1 Batu, Dinas Pertanian Kota Batu dan PHRI Kota Batu

Hasil pemenang lomba sebagai berikut :

Juara I : Desa Bumiaji, Kec. Bumiaji

Juara II : Desa Pinten, Kec. Bumiaji

Juara III : Desa Pendem, Kec. Junrejo

Juara Favorit : Kel. Temas, Kec. Batu

4. Lomba Cipta Penganekaragaman Pangan 3 B Berbasis Potensi

Sumberdaya Wilayah dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - 27 Tahun 2007. Dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2007 bertempat di Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Kota batu diwakili oleh Kelompok Tani Wanita Brosem, Dinas Pertanian dan TP PKK Kota Batu. Dalam lomba ini, kota Batu mendapat juara harapan II yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur.

5. Rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

Dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 6 Agustus 2007, 20 Agustus 2007 dan 6 September 2007 bertempat di Ruang Rapat Panderman Pemerintah Kota Batu. Dalam rapat ini disampaikan hasil kesepakatan bersama Bupati / Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan

Pangan Kabupaten / Kota dalam sidang regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota wilayah tengah Tahun 2007 di Pekanbaru tanggal 24 – 26 Juli 2007 mengenai Optimalisasi Peranan Dewan Ketahanan Pangan dalam Mengurangi Kemiskinan serta Kerawanan Pangan dan Gizi kepada anggota pelaksana harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Batu.

Dalam pelaksanaan rapat pelaksana harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Batu telah menyepakati sebagai berikut :

- a. Memantapkan kembali kesepakatan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, kerawanan pangan dan kurang gizi sekurang-kurangnya 1 % per tahun di masing-masing wilayah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
- b. Mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya lokal agar tercipta peluang usaha di desa/kelurahan yang berbasis pertanian
- c. Memantapkan pasokan bahan pangan pokok strategis melalui peningkatan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif, terutama dalam rangka meningkatkan akses pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan
- d. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi pangan lokal menuju gizi seimbang dan aman melalui gerakan

pengembangan teknologi; Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); serta kemitraan dengan dunia usaha

- e. Menggalakkan kembali pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak sekolah pada daerah rawan pangan dan gizi
- f. Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan khususnya di lingkungan sekolah
- g. Penguatan Sistem Deteksi Dini Rawan Pangan dan Gizi melalui implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), penyediaan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas) sampai tingkat desa/kelurahan secara periodik dan berkelanjutan guna merumuskan langkah-langkah intervensi
- h. Pencegahan konversi lahan produktif dan pelestarian sumberdaya alam melalui penghijauan dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan air untuk mendukung ketersediaan pangan berkelanjutan
- i. Penguatan kelembagaan struktural dan fungsional ketahanan pangan (DKP) di tingkat Kabupaten / Kota guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan sebagai urusan wajib daerah

d. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik dan Aktualisasi Data Base Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik dan Aktualisasi Data Base Pertanian meliputi :

1. Pengumpulan data pertanian pangan dan hortikultura di lingkup wilayah Kota Batu dengan jalan survey lapang

2. Pengolahan data pertanian yang dihasilkan dari survey lapang
3. Pelaporan serta aktualisasi data pertanian secara frekuentif setiap bulannya

e. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana Kelembagaan Ketahanan Pangan berupa 2 unit gudang lumbung pangan/ gudang penyimpanan terletak di dusun Pendem dan Mojorejo, Desa Pendem Kecamatan Junrejo dengan luas bangunan masing-masing gudang lumbung pangan adalah 40 m². Pelaksanakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat mendukung dalam rangka mewujudkan peningkatan posisi tawar petani dan nilai tambah produk pertanian, kemandirian dan kerja kelompok dan antar kelompok pelaku bisnis lainnya serta memfasilitasi petani dalam rangka stabilisasi penyediaan pangan.
2. Administrasi kegiatan yang mendukung pelaksanaannya di lapang.

f. Kegiatan Pelatihan Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian dan Pengoperasian Sub Terminal Agribisnis (STA)

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penanganan Pasca Panen Produk Pertanian dan Pengoperasian Sub Terminal Agribisnis (STA) meliputi :

1. Sosialisasi STA

Kegiatan Sosialisasi STA dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2007 di Desa Sidomulyo dengan narasumber Ir. RN. NURNADIAH, MM

(KaSubdit. Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pasar dan DR. DONNA GULTOM (Ka Seksi. Tan. Pangan dan Hortikultura). Jumlah peserta dalam pelatihan ini sejumlah 60 orang yang terdiri dari :

- a. Petugas : 6 orang
- b. Kepala Bidang Dinas Pertanian : 5 orang
- c. Penyuluh Pertanian : 15 orang
- d. Co. Admin. Penyuluh : 1 orang
- e. Camat Kec. Batu : 1 orang
- f. Camat Kec. Bumiaji : 1 orang
- g. Camat Kec. Junrejo : 1 orang
- h. Gapoktan Mekarsari : 5 orang
- i. Gapoktan Sekar Indah : 5 orang
- j. Petani Bunga Potong : 10 orang
- k. Petani Tanaman Hias : 10 orang

Hasil yang dicapai dalam pelatihan adalah peningkatan pengetahuan tentang penguatan kelembagaan pemasaran bunga / tanaman hias serta peluang pengembangan agribisnis tanaman hias.

2. Pelatihan Operasional STA

Kegiatan Pelatihan Operasional STA dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2007 di Desa Punten dengan Dodyk Pranowo dan Aris Setyawan selaku instruktur pengoperasian internet serta Yanuaris Bayu S dan Hari Santoso, pengusaha yang bergerak di bidang packaging. Jumlah

peserta dalam pelatihan ini sejumlah 30 orang (lampiran 8) yang terdiri dari :

- a. Petugas : 13 orang
- b. Penyuluh Kec. Batu : 2 orang
- c. Penyuluh Kec. Bumiaji : 2 orang
- d. Penyuluh Kec. Junrejo : 1 orang
- e. Gapoktan Sekar Indah : 6 orang
- f. Gapoktan Mekarsari : 6 orang

Hasil yang dicapai dalam pelatihan Operasional STA adalah peningkatan ketrampilan tentang aplikasi internet serta pengoperasian beragam peralatan STA.

3. Anjang kerja ke STA Jetis

Kegiatan Anjang kerja ke STA Jetis dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 Desember 2007 di Kabupaten Semarang. Peserta dalam pelatihan ini adalah sejumlah 30 orang yang terdiri dari :

- a. Penyuluh Pertanian : 5 orang
- b. Petugas : 13 orang
- c. Gapoktan Sekar Indah : 6 orang
- d. Gapoktan Mekarsari : 6 orang

Tempat - tempat yang dikunjungi adalah Sub Terminal Agribisnis (STA) Jetis, Nusa Indah Nursery, Kelompok tani "Sri Rejeki" dan Home Industry manisan tomat rasa kurma (Torakur).

Hasil dari anjang kerja tersebut adalah pengetahuan tentang operasional STA secara optimal, manajemen pengelolaan SDM dalam kelompok tani tanaman hias atau bunga potong, dan budidaya tanaman hias mawar serta bunga potong krisan dan pengembangan potensi daerah melalui peningkatan ketrampilan pembuatan manisan buah yang dapat dilakukan secara sederhana.

4. Pelatihan Pasca Panen Tanaman Hias

Kegiatan Pelatihan Pasca Panen Tanaman Hias dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Desember 2007 di Desa Sidomulyo dengan narasumber Eko Hardiyanto, SE dan Rudi Subiyanto, pengusaha bunga potong serta Drs. Sugeng Hariono dan Ir. Hartomo, selaku pengusaha tanaman hias.

Jumlah peserta dalam pelatihan ini sejumlah 50 orang yang terdiri dari :

- a. Petugas : 5 orang
- b. Penyuluh Pertanian : 15 orang
- c. Gapoktan Sekar Indah : 15 orang
- d. Gapoktan Mekarsari : 15 orang

Hasil yang dicapai dalam pelatihan adalah peningkatan pengetahuan tentang strategi penanganan pasca panen dan pemasaran tanaman hias di Kota Batu serta perawatan pasca panen tanaman hias bunga potong.

g. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna meliputi :

1. Memelihara Varietas Apel Impor

Selama proses karantina, tanaman apel didalam rumah kaca akan dipelihara secara optimal meliputi pemupukan, pengairan, penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit. Parameter yang diamati adalah :

- a. Tinggi tanaman
- b. Jumlah daun
- c. Penyimpangan fisiologis
- d. Serangan hama dan penyakit local
- e. Sanitasi rumah kaca

2. Memeriksa dan mengamati 12 varietas apel impor dari Belanda terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT).

Karantina Pengamatan dilakukan secara individu terhadap kemungkinan adanya OPTK yang terbawa oleh materi tanaman. Pengamatan dilakukan secara visual setiap minggu dan uji laboratorium menggunakan uji ELISA (Enzim Linked Immunosorbent Assay) yang secara cepat akan mengetahui adanya serangan virus OPTK. Parameter yang akan diamati pengendalian hama dan penyakit adalah :

- a. Serangan Apple Chart Fruit
- b. Apple Mosaik Ilarvirus
- c. Apple Sistem Pitting Foveavirus (ASPV)
- d. Apple Sistem Grooving Capillovirus (ASGV)

3. Uji adaptasi kemampuan 12 varietas apel impor pada agroklimat Kota Batu.

Agroklimat Kota Batu yang berada pada ketinggian 600 s/d 1.500 dpl memiliki ketinggian yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman apel. Untuk uji adaptasi pada beberapa agroklimat dengan rancangan percobaan, masing-masing 10 pohon akan ditanam dengan teknologi Balitjestro dilengkapi dengan label permanen. Parameter yang diamati adalah :

- a. Tinggi tanaman
- b. Jumlah cabang
- c. Jumlah daun
- d. Serangan hama dan penyakit

Lokasi uji adaptasi 12 varietas apel di lahan petani pada ketinggian bervariasi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 12. Lokasi Uji Adaptasi 12 Varietas Apel

No.	Nama	Kelompok Tani	Desa	Elevasi
1.	Wito Agro	Makmur Abadi	Gondang,	1.200 dpl
2.	Agus Sofyan	Intisari	Tulungrejo	1.100 dpl
3.	Kustomo	Srimulyo II	Gandon,	1.000 dpl
4.	M. Chamim	Bumijaya I	Sumbergondo	900 dpl
5.	M. Toha	Sumber	Bulukerto	800 dpl
		Makmur I	Bumiaji	
			Giripurno	

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2007

h. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan meliputi :

1. Pembangunan Kantor Kebun di Kebun Dinas Pertanian, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo
2. Pembangunan screen house sebanyak 2 unit
 - Screen house permanen berukuran 16,20 x 10 m di Kebun Dinas Pertanian, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo (1 unit)
 - Screen house bambu ukuran (6 x 10 m) + (2 x 2 m) di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji (1 unit)
3. Pembangunan jalan usaha tani di Kebun Dinas Pertanian, Desa Tlekung Kecamatan Bumiaji Kecamatan Junrejo
4. Pembangunan jaringan irigasi sebanyak 2 unit yang berlokasi di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo dan Desa Oro-oro Ombo-Kecamatan Batu, masing-masing sebanyak 1 unit
5. Pengadaan alsintan sebanyak 20 unit, yang merupakan aset Kota Batu (Dinas Pertanian) yang seluruhnya telah diserahkan kepada kelompok tani/gapoktan se-wilayah Kota Batu yang diserahkan secara simbolis oleh Walikota Batu dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Barang masing-masing gapoktan. Jenis alsintan dan kelompok penerima antara lain :
 - a. 2 (dua) unit mesin Pengolah Pupuk Organik, diserahkan kepada :

2. Gapoktan Sayur Ds. Sumberejo Kec. Batu : 1 unit
3. Kelompok Tani Bumijaya I, Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji : 1 unit
- b. 5 (lima) unit Mesin Pengolah Pakan Ternak dan Pupuk Organik
 1. Kelompok Tani Sumber Hasil I, Kel. Pesanggrahan Kec. Batu:
1 unit
 2. Gapoktan Batu Bersatu, Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu
 3. Gapoktan Kado Satria, Ds. Torongrejo Kec. Junrejo : 1 unit
 4. Kelompok Tani Sri Sejati I, Ds. Junrejo Kec. Junrejo : 1 unit
 5. Kelompok Tani Subur Makmur Ds. Punten Kec. Bumiaji : 1
unit
- c. 12 (dua belas) unit Hand Tractor, diserahkan kepada :
 1. Klp. Tani Sri Anom Mulyo I, Kel. Temas Kec. Batu : 1 unit
 2. Klp. Tani Rukun Tani I, Kel. Sisir Kec. Batu : 1 unit
 3. Klp. Tani Sumber Makmur I, Ds. Beji Kec. Junrejo : 1 unit
 4. Klp. Tani Sri Sedono I, Ds. Mojorejo Kec. Junrejo : 1 unit
 5. Klp. Tani Sri Sedono II, Ds. Mojorejo Kec. Junrejo : 1 unit
 6. Klp. Tani Sri Rejeki, Ds. Junrejo Kec. Junrejo : 1 unit
 7. Klp. Tani Sri Sejati II, Ds. Junrejo Kec. Junrejo : 1 unit
 8. Klp. Tani Sumber Urip, Ds. Tlekung Kec. Junrejo : 1 unit
 9. Klp. Tani Sri Sedono I, Ds. Dadaprejo Kec. Junrejo : 1 unit
 10. Klp. Tani Sri Mulyo I, Ds. Pendem Kec. Junrejo : 1 unit
 11. Gapoktan Hortikultura (Mitra Arjuna), Ds. Tulungrejo Kec.
Bumiaji

12. Gapoktan Mawar Mekar Sari, Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji : 1

unit

d. 1 (satu) unit Power Tiller, diserahkan kepada :

1. Klp. Tani Srimulyo II, Ds. Pendem Kec. Junrejo

6. Pembangunan jalan penetrasi dan plengsengan di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo sepanjang 6,95 X 2,5 meter

i. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perbenihan/Perbibitan Hortikultura meliputi :

1. Pengadaan batang bawah apel yang telah diokulasi dengan batang atas apel sebanyak 40.319 pohon diserahkan kepada petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Apel Batu Lestari Kota Batu.

2. Pengadaan bibit alpukat dan kesemek diserahkan kepada :

a. Kelompok Tani Intisari Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji

Alpukat sebanyak 3.500 pohon

Kesemek sebanyak 1.000 pohon

b. Kelompok Tani Arjuno I Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji

Alpukat sebanyak 3.500 pohon

3. Pengadaan bibit bawang putih diserahkan kepada;

a. Kelompok Tani Intisari Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji

sebanyak 687kg

b. Kelompok tani Margi Rahayu Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji sebanyak 688 kg

c. Pengadaan bibit tanaman hias (Anggrek) diserahkan kepada :

1. Kebun Dinas Pertanian Desa Tlekung

Dendrobium kecil = 250 pohon

Dendrobium besar = 400 pohon

Cattleya = 250 pohon

Bulan = 100 pohon

2. Gabungan kelompok tani tanaman hias Sekar Indah

Dendrobium kecil = 720 pohon

Dendrobium besar = 100 pohon

Cattleya = 152 pohon

Bula = 100 pohon

Vanda = 100 pohon

3. Pengadaan bio pestisida diserahkan kepada;

a. Desa Punten Dusun Gempol Kecamatan Bumiaji = 25 dus

b. Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji = 25 dus

c. Desa Punten Dusun Payan Kecamatan Bumiaji = 25 dus

d. Desa Pandanrejo Dusun Pandan = 25 dus

e. Desa Tulungrejo Dusun Gondang = 30 dus

f. Desa Bumiaji Dusun Binangun = 30 dus

g. Desa Gunungsari Dusun Kandangan = 25 dus

h. Desa Gunungsari Dusun Ngebruk = 25 dus

- i. Desa Bulukerto Dusun Gantung = 25 dus
 - j. Desa Bulukerto Dusun Cangar = 25 dus
 - k. Desa Giripurno Dusun Krajan = 25 dus
 - l. Desa Tulungrejo Dusun Wonosari = 30 dus
 - m. Desa Bumiaji Dusun Banaran = 30 dus
 - n. Desa Bumiaji Dusun Beru = 30 dus
 - o. Desa Giripurno Dusun Durek = 25 dus
 - p. Desa Giripurno Dusun Sabrangbendo = 25 dus
 - q. Desa Pandanrejo Dusun Ngujung = 25 dus
 - r. Desa Pandanrejo Dusun Dadapan = 25 dus
4. Pengadaan pupuk organik diserahkan kepada;
- a. Gapoktan Mekar Sari Desa Gunungsari = 6 ton
 - b. Kelompok tani Sumber Makmur Desa Giripurno = 6 ton
 - c. Kelompok tani Makmur Abadi Desa Tulungrejo = 9 ton
 - d. Kelompok tani Sri Mulyo I Desa Punten = 6 ton
 - e. Kelompok tani Intisari Desa Sumbergondo = 9 ton
 - f. Kelompok tani Sri Mulyo II Desa Bulukerto = 9 ton
 - g. Kelompok tani Bumi Jaya Desa Bumiaji = 9 ton
 - h. Kelompok tani Karya Tani Desa Bumiaji = 6 ton
5. Pengadaan peralatan produksi benih/bibit (alat laboratorium kultur jaringan) diserahkan kepada:
- a. Gabungan Kelompok Tani tanaman hias Sekar Indah = 1 Paket

b. Kebun Dinas Pertanian Desa Tlekung =1 paket

**j. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan**

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan meliputi :

1. Pengadaan pakaian kerja

Pengadaan pakaian kerja diperuntukkan 28 orang yang terdiri dari PPL sebanyak 20 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh (THLTB) 5 orang dan penyuluh magang 3 orang. Pengadaan ini berupa jas hujan, sepatu boot, topi serta senter sebagai alat penerangan.

2. Studi banding ke luar daerah

Studi banding diikuti 7 orang dengan maksud melihat secara lebih dekat keberadaan Kantor Penyuluh Pertanian yang telah terbentuk secara mandiri, sekaligus bertukar pikiran mengenai tupoksi kelembagaan, struktur organisasi, program kerja yang telah dilaksanakan selama ini. Selain itu hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan referensi bagi penyuluh pertanian Kota Batu dalam rangka pembentukan kelembagaan penyuluhan Kota Batu yang telah direncanakan.

3. Pengadaan alat GPS

Pengadaan alat GPS dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi PPL dalam melaksanakan tugasnya di lapang, diantaranya untuk mengetahui lokasi, luas lahan serta sebagai penunjuk jalan dalam rangka pemerataan wilayah.

a. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian meliputi :

1. Pertemuan rutin Penyuluh Pertanian telah dilaksanakan 100% dengan dua kali pelaksanaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2007
2. Pekan Nasional Pertemuan Kontak Tani Nelayan Andalan telah dilaksanakan 100% sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2007 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mulai tanggal 7 – 12 Juli 2007
3. Penyusunan Program telah dilaksanakan 100% yang diselenggarakan selama dua hari sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2007.

b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian meliputi :

1. Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (220 m²) oleh CV. AGUNG REJEKI
2. Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan Pertanian seluas 126,70 m² oleh CV. REKSA ABADI.
3. Pembangunan Paving seluas 258,01 m² dan tempat Parkir Balai Penyuluhan Pertanian seluas 44,25 m² oleh CV. JAYA PRIBADI

4. Fisik administrasi umum juga telah dilaksanakan 100% sesuai dengan rencana.

c. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Hewan Menular meliputi :

1. Pelaksanaan Biosecurity secara ketat, melalui :
 - a. Pengawasan lalu lintas dan karantina ternak pada peternakan
 - b. Dekontaminasi / desinfeksi
2. Tindakan pemusnahan unggas selektif (depopulasi) jika terjadi penularan AI melalui depopulasi dan disposal. (Pembakaran dan penguburan terhadap Unggas)
3. Pelaksanaan Vaksinasi/pengebalan
 - a. Vaksin yang digunakan adalah vaksin inaktif
 - b. Vaksin diberikan secara cuma – cuma kepada peternak
 - c. Monitoring pasca vaksinasi
4. Pengendalian lalu lintas ternak antar kota
5. Surveillans dan penelusuran, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - a. Menetapkan sumber infeksi jika terjadi penularan
 - b. Menetapkan daerah penyebaran AI
 - c. Menentukan epidemiologi penyakit AI
 - d. Menetapkan wilayah (zoning/ daerah bebas, daerah terancam dan daerah tertular)

- e. Menentukan kekebalan kelompok pasca vaksinasi
6. Peningkatan kesadaran masyarakat (Public awareness) , melalui
 - a. Sosialisasi AI ke peternak dan masyarakat
 - b. Sosialisasi melalui media elektronik, massa maupun penyebaran brosur

d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Jalan Produksi Kawasan Peternakan meliputi :

1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait, aparat daerah termasuk desa dan masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Inventarisasi calon petani calon lokasi (CPCL)

Inventarisasi calon peternak calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh petugas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi kegiatan pengembangan jalan produksi. Kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota.

3. Penetapan Lokasi

Hasil inventarisasi CPCL yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kota Batu.

4. Sosialisasi dan RRA (Rapid Rural Appraisal)

Tujuan sosialisasi agar masyarakat luas mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. RRA dilaksanakan oleh petugas lapangan bersama-sama dengan kelompok tani mengacu pada ketentuan RRA terlampir pada Lampiran 2.

5. Desain Sederhana (DS)

Desain sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan-bahan setempat berdasarkan hasil RRA. Desain sederhana dibuat oleh Dinas Pertanian Kota Batu.

Output desain sederhana terdiri dari :

- a. Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi pengembangan jalan produksi dan digambar pada peta desa menggunakan metode Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui titik koordinasi lokasi.
 - b. Desain sederhana dapat menggambarkan antara lain :
 - a. Peta situasi
 - b. Gambar, spesifikasi dan dimensi
 - c. Jenis bahan/material untuk pengerasan badan jalan sesuai dengan kebutuhan/kondisi setempat
 - d. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta rincian biaya/RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- #### 6. Pelaksanaan Fisik Kegiatan

e. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan meliputi :

1. Sosialisasi kepada kelompok peternakan kelinci
2. Pelatihan pakan ternak
3. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya kelinci dan penyerahkan kepada kelompok tani penerima berupa : kelinci 60 ekor, pakan kelinci, kandang kapasitas 60 ekor, obat-obatan dan vaksin, mesin pelet, pelatihan pakan kelinci 30 orang
4. Evaluasi dan pelaporan

f. Kegiatan Konservasi Lahan Kawasan Peternakan

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Lahan Kawasan Peternakan meliputi :

1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait, baik secara horizontal (antar instansi) maupun secara vertical (intern subsektor peternakan). Khusus dalam kaitannya dengan implementasi kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), maka penentuan calon lokasi Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) dikoordinasikan dengan sekretariat GNKPA di tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya, antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Sumber daya Air dan Energi, Badan Perencanaan Daerah, Perum Jasa Tirta, Perhutani dan lain-lain.

2. Inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)

Inventarisasi Calon Peternak Calon Lokasi (CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Kota Batu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi kegiatan konservasi lahan. Kegiatan penentuan CPCL bertujuan untuk memperoleh lokasi kegiatan konservasi lahan yang layak sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Lokasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan Konservasi Lahan Terpadu, maka hasil penentuan Calon Lokasi dan Calon Petani (CPCL) yang layak harus ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kota Batu,

4. Sosialisasi dan Rapid Rural Appraisal (RRA)

Kegiatan sosialisasi dan RRA dilaksanakan setelah penetapan calon lokasi dan calon petani oleh Kepala Dinas Peternakan Kota Batu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kegiatan serta menampung dan merumuskan seluruh aspirasi peternak pelaksana dalam kaitannya dengan kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan Konservasi Lahan Terpadu di Kota Batu.

5. Desain Sederhana

Kegiatan pembuatan desain sederhana Pengembangan Usaha Peternakan Konservasi Lahan Terpadu bertujuan untuk merancang suatu kawasan dengan batas-batas pemilikannya yang akan dipergunakan sebagai acuan teknis dalam pembuatan bangunan-bangunan konservasi (teras, guludan,

saluran pembuangan air, terjunan dan rorak) dan rencana anggaran biaya dan daftar peternak.

Secara garis besar dalam desain sederhana perlu diuraikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

a. Risalah Umum

Dalam risalah umum menguraikan tentang kondisi biofisik seperti kondisi lokasi, topografi wilayah, keadaan tanah, keadaan iklim dan keadaan vegetasi serta kondisi sosial ekonomi seperti kelompok ternak, struktur penduduk, mata pencarian, tingkat pendidikan, kelembagaan formal dan non formal, kondisi sosial ekonomi, dll.

b. Rencana Pembuatan Bangunan Konservasi

Rencana ini dibuat dalam bentuk tabel yang berisi tentang jenis bangunan konservasi yang akan dibangun dan jenis sarana yang akan diadakan.

c. Analisa Kebutuhan Bahan dan Tenaga

Analisa kebutuhan bahan dan tenaga dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi jenis kegiatan dan jenis saprodi, jumlah target, kebutuhan HOK dan volume saprodi, harga satuan dan jumlah biaya ini disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam POK.

d. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat jenis pekerjaan, volume kegiatan dan waktu pelaksanaan yang disesuaikan.

e. Rencana Alokasi Sarana Produksi

Rencana ini dibuat dalam bentuk tabel yang memuat nama peternak/kelompok ternak, luas pemilikan lahan dan jumlah sapi yang dibutuhkan.

Disamping itu dalam desain sederhana tersebut dibuat peta lokasi kegiatan berdasarkan peta administrasi desa dengan skala 1 : 1000 serta memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Batas-batas kepemilikan lahan peternak yang dilengkapi dengan nomor urut peternak.
2. Daftar nama peternak dalam kelompok.
3. Tata letak jalan produksi, jalan desa, kandang ternak dan bangunan penting lainnya.
4. Tata letak bangunan konservasi, misalnya teras, terjunan air, SPA, rorak dan sebagainya.
5. Posisi lokasi (dalam sketsa peta Kabupaten/Kota dan Propinsi).

Desain yang telah dibuat dalam lembaran pengesahannya harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kota Batu. Desain tersebut dapat digunakan sebagai acuan atau patokan teknis bagi para petugas lapangan dalam memandu peternakan peserta untuk membuat bangunan konservasi pada lahan usaha taninya.

Pembuatan desain ini dilaksanakan atas dasar observasi dan atau hasil pengukuran yang disesuaikan dengan kondisi setempat dilaksanakan secara swakelola. Mengingat keterbatasan dana yang ada didalam DIPA

2007, maka desain usaha peternakan konservasi ini dibuat secara sederhana saja yang menggambarkan situasi lokasi kegiatan dengan daftar peternak peserta serta batas-batas pemilikan lahannya. Bila tidak tersedia peta topografi sebagai peta dasar, maka dapat dipakai peta administrasi desa setempat sebagai peta dasar.

6. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik Pengembangan Usaha Peternakan Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) terdiri dari kegiatan penyiapan lahan, pembuatan bangunan konservasi dan penanaman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola padat karya dengan melibatkan petani peserta sebagai tenaga kerja. Komponen kegiatan pelaksanaan fisik pengembangan usaha peternakan konservasi lahan terpadu adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan lahan

Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada areal yang telah didesain sebagai lokasi kegiatan pengembangan usaha peternakan konservasi lahan terpadu. Pekerjaan dalam penyiapan lahan terdiri dari : pembabatan rumput / pembersihan lahan yang dilaksanakan dengan metode tanpa bakar (zero burning), pengolahan tanah untuk tanaman rumput.

b. Pembuatan bangunan konservasi

Kegiatan pembuatan bangunan konservasi di lokasi pengembangan usaha peternakan lahan terpadu didasarkan pada hasil desain sederhana yang telah dibuat. Dalam rangka pembuatan bangunan konservasi, yang perlu

diperhatikan adalah jenis bangunan yang sesuai dengan kemiringan dan kondisi lokasi setempat.

c. Penanaman

Kegiatan tanaman penguat teras dilaksanakan pada talud teras / bibir teras dan guludan searah garis kontur. Jenis tanaman penguat teras yang dianjurkan adalah tanaman yang dapat menahan erosi dengan baik dan mudah didapat di lokasi. Penanaman dapat dilakukan secara campuran, berseling, satu atau dua jalur tergantung kondisi lokasi setempat.

d. Penyediaan Saprodi

Kegiatan penyediaan sarana produksi peternakan terdiri dari pengadaan : (a) ternak (kambing/domba) (b) tanaman penguat teras/rumput (*Brachiaria brizantha* (BB), *Brachiaria decumbens* (BD), *Panicum muticum* (kolonjono) dan *Setaria*, dll); (c) pupuk yang berupa pupuk organik/kandang dan pupuk anorganik seperti urea, TSP, KCL dan kapur, (d) pestisida / herbisida yang akan digunakan tergantung jenis gulma/tanaman yang terserang hama / penyakit. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyediaan saprodi dilakukan oleh kelompok ternak sendiri melalui pos belanja sosial lainnya.

Pelaksanaan penyediaan saprodi mengacu pada pedoman pertanggung jawaban lembaga sosial lainnya dengan biaya Rp. 2,5 juta per hektar. Pemilihan jenis komoditas ternak dan pupuk disesuaikan dengan kondisi pasar dan agroklimat setempat. Pada umumnya jenis ternak adalah ternak ruminansia kecil seperti kambing / domba.

Pengusahaan ternak sebagai sumber tambahan penghasilan dan sekaligus sumber bahan organik dapat dilakukan setelah rumput penguat teras tumbuh dengan sempurna. Apabila memungkinkan tanaman rumput dapat ditanam lebih awal segera setelah penyediaan saprodi selesai dilakukan. Kandang ternak dapat dibuat secara swakelola oleh petani setempat dengan menggunakan material kayu / bambu yang tersedia dan mudah didapat di lokasi setempat.

e. **Pemeliharaan dan pemanfaatan**

Kegiatan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga / memelihara bangunan konservasi yang telah dibangun, tanaman penguat teras berupa rumput yang telah ditanam serta ternak yang telah diadakan. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan oleh kelompok ternak secara swadaya dengan mendapat bimbingan dari petugas lapangan. Kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan ini merupakan wujud tanggung jawab peternak pelaksana padat karya terhadap kelestarian bangunan konservasi yang telah mereka konstruksi secara padat karya.

g. **Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan**

Perbibitan Peternakan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Perbibitan Peternakan meliputi :

1. Pengadaan bibit ternak, obat hewan (obat, vaksin dan inseminasi buatan), timbangan sapi digital serta domba ekor gemuk

2. Penyerahan pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan perbibitan peternakan kepada kelompok tani

h. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan meliputi :

1. Penyediaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan yang meliputi :
 - a. Pembangunan bangsal pembenihan (102 m²)
 - b. Pembangunan ruang penyimpanan alat, laboratorium uji serta ruang penyediaan pakan (120 m²)
 - c. Pembangunan ruang operator (36 m²)
 - d. Pembangunan kantor BBI (45 m²)
 - e. Pembangunan sarana pendukung BBI (6 unit) yang terdiri dari pagar (195 m¹), sumur, tandon air, saluran pasok, saluran buang, paving
 - f. Pembangunan kolam dan bak BBI (6 unit) yang terdiri dari kolam pendederan sebanyak 3 unit (330 m², 396 m², 396 m²), bak penampungan dan pengendapan (27 m²) dan kolam induk sebanyak 2 unit (d=3 m)
 - g. Pengadaan induk (koi, tombro, nila dan lele)
 - h. Pengadaan peralatan pendukung BBI (peralatan kolam dan meubelair)
 - i. Pengadaan kendaraan roda empat pengangkut induk/benih (mobil pick-up dan kelengkapannya)

2. Sasaran penambahan fasilitas pendukung Pasar Benih Ikan tahun 2007
 - a. Pengadaan kendaraan roda dua (3 unit sepeda motor dengan kelengkapannya)
 - b. Pengadaan sarana promosi ikan
 - c. Penambahan fasilitas pendukung PBI
 - d. Penyempurnaan laboratorium dan ruang staff
 - e. Penyempurnaan kios pemasaran ikan
 - f. Penyempurnaan showroom ikan hias dan outlet pemasaran ikan
 - g. Penyempurnaan kolam los pasar (86,25 m²)
 - h. Pembangunan pagar halaman PBI (57 m¹)
 - i. Penyempurnaan kolam karantina (89,25 m²)
 - j. Penambahan kolam karantina (26,25 m²)
 - k. Pembangunan kolam induk dan pagar pengaman (36 m²)
 - l. Penyempurnaan kios pemasaran ikan lesehan (12 m²)
 - m. Penambahan sarana prasarana outlet pemasaran ikan (peralatan meubelair)

i. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan meliputi :

1. Pelatihan budidaya ikan air tawar

Tujuan : 1. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

pembudidaya ikan

2. menambah keanekaragaman komoditas

perikanan

3. meningkatkan produksi ikan dan pendapatan pembudidaya ikan

Sasaran : peningkatan kualitas SDM pembudidaya ikan

Pelaksanaan : 26-27 Maret 2007

Tempat : BBI Punten, Desa Sidomulyo-Kecamatan Batu

Peserta : 50 orang pembudidaya ikan dari Kecamatan Batu (Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Kelurahan Pesanggrahan, Desa Oro-oro Ombo, Desa Songgokerto, Kelurahan Sisir), Kecamatan Junrejo (Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Tlekung, Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa Pendem), Kecamatan Bumiaji (Desa Bumiaji, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo)

Materi dan Narasumber :

1. Pelatihan budidaya lobster air tawar, dengan narasumber Dewi Nur Setyorini, S.Pi dari BBI Punten
2. Pelatihan budidaya nila, dengan narasumber Wiwin Sumiati, S.Pi dari BBI Punten
3. Berbagi pengalaman dengan pelaku usaha budidaya lobster air tawar, dengan narasumber Nico dari Malang

Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Batu dengan dihadiri oleh Kepala BBI Punten (Dewi Nur Setyorini, S.Pi), Kepala Bagian tata Usaha Dinas Pertanian Kota Batu (Drs. H.M.

Dha'im) dan Kepala Bidang Program Dinas Pertanian Kota Batu (Ir. Heru Waskito, M.Si)

4. Monitoring produksi, hama dan penyakit ikan

Tujuan : 1. mengetahui perkembangan produksi perikanan
2. mencegah dan mengendalikan hama penyakit ikan

Sasaran : peningkatan produksi dan penurunan serangan hama penyakit ikan

Monitoring produksi, hama dan penyakit ikan dilakukan setiap bulan secara bergilir di semua desa perikanan (desa yang mempunyai kegiatan perikanan). Pada monitoring ini diinventarisir permasalahan yang ada di lapangan meliputi perkembangan produksi dan serangan hama penyakit ikan. Selain itu juga dilakukan pembinaan teknis pada pembudidaya ikan yang memerlukan. Hasil dari monitoring dan pembinaan ini dilaporkan setiap bulannya (Laporan Kegiatan DISTANHUT Tahun 2007, BabV, hal 1-38).

2. Tahun 2008

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2008, yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan Agropolitan adalah:

a. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

Pelaksanaan :

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan Dana APBN untuk Pengelolaan Lahan melalui Konservasi DAS Hulu Kawasan Hortikultura dan Perkebunan, sehingga rangkaian kegiatannya untuk mendukung keberhasilan dari Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA), meliputi :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (*capacity building*), berupa rapat koordinasi pada tanggal 22 April 2008 (rapat koordinasi antar instansi terkait), tanggal 25 April 2008 (rapat koordinasi dengan gapoktan dan kelompok tani se-Kota Batu) dan tanggal 17 Juli 2008 (rapat koordinasi dan sosialisasi antar instansi terkait dengan kelompok tani se-Kota Batu).
2. Pengembangan masyarakat (*community development*), berupa pertemuan rutin, temu lapang tani dan penerapan pelaksanaan selektif.

b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Pertanian

Pelaksanaan:

1. Pembangunan 1 (satu) unit gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berlokasi di Kelurahan Sisir-Kecamatan Batu untuk mewujudkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tangguh sebagai percontohan yang ideal dengan kapasitas yang memenuhi standart pelayanan minimal.
2. Pengadaan 1 (satu) unit sepeda motor untuk mempermudah gerak penyebaran informasi pertanian agar inovasi pertanian segera dapat tersebar dan diterapkan oleh petani di wilayah kota Batu, sehingga peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya segera tercipta.

c. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan:

Pembangunan lantai jemur sebanyak 2 (dua) unit di Desa Pendem masing-masing seluas 200 m² di Dusun Mojorejo dan 200 m² di Dusun Pendem dengan memanfaatkan tanah kas desa. Lokasi pembangunan lantai jemur dipilih satu lokasi lokasi dengan bangunan lumbung pangan untuk mempermudah proses penyimpanan sehingga kegiatan penanganan pasca panen berkelanjutan mulai dari pengeringan hingga penyimpanan menggunakan fasilitas yang telah ada.

d. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan UPTD Benih Tanaman Pangan

Pelaksanaan:

Rehabilitasi Kantor Kebun Dinas Pertanian Kota Batu di Desa Tlekung-Kecamatan Junrejo.

e. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan UPTD

Benih Hortikultura

Pelaksanaan:

1. Pemberian bantuan benih apel bersertifikat sebanyak 60.000 pohon diserahkan kepada kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Apel Batu Lesatari Kota Batu.

Tabel 13 Daftar kelompok tani penerima bantuan bibit apel Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan UPTD Benih Hortikultura Tahun 2008

No	Penerima	Lokasi	Jumlah
1	Kelompok Tani Arjuno II	Bumiaji	4.000 pohon
2	Kelompok Tani Makmur Abadi	Bumiaji	4.000 pohon
3	Kelompok Tani Karya Tani	Bumiaji	4.000 pohon
4	Kelompok Tani Intisari	Bumiaji	4.000 pohon
5	Kelompok Tani Sri Mulyo I	Bumiaji	4.000 pohon
6	Kelompok Tani Sri Mulyo II	Bumiaji	4.000 pohon
7	Kelompok Tani Sri Mulyo III	Bumiaji	4.000 pohon
8	Kelompok Tani Sri Mulyo IV	Bumiaji	4.000 pohon
9	Kelompok Tani Bumiaji I	Bumiaji	4.000 pohon
10	Kelompok Tani Bumiaji II	Bumiaji	4.000 pohon
11	Kelompok Tani Bumiaji III	Bumiaji	4.000 pohon
12	Kelompok Tani Sumber Makmur IV	Bumiaji	4.000 pohon
13	Kelompok Tani Sumber Makmur V	Bumiaji	4.000 pohon

No	Penerima	Lokasi	Jumlah
14	Kelompok Tani Sri Makmur	Bumiaji	2.000 pohon
15	Kelompok Tani Sri Rejeki	Bumiaji	2.000 pohon
16	Kelompok Tani Sri Jaya	Bumiaji	2.000 pohon
17	Kelompok Tani Sumber Makmur I	Bumiaji	2.000 pohon
J U M L A H			60.000 pohon

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008

2. Rehabilitasi rumah lindung (*screen house*) dilaksanakan di Kebun Dinas Pertanian di Desa Tlekung-Kecamatan Junrejo.
3. Koleksi plasma nutfah tanaman hias sebanyak 1 paket diserahkan di Kebun Dinas Pertanian di Desa Tlekung
4. Pengadaan pupuk organik untuk kebun sebanyak 1 paket diserahkan di Kebun Dinas Pertanian di Desa Tlekung.
5. Pengadaan bahan kimia untuk media kultur jaringan sebanyak 1 paket diserahkan di Dinas Pertanian Kota Batu
6. Pekerjaan benih jeruk keprok Batu 55 untuk BPMT tidak dilaksanakan.

e. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih Tanaman Pangan

Pelaksanaan:

1. Pemberian bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan)

Tabel 14 Daftar kelompok tani penerima bantuan alat mesin pertanian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih Tanaman Pangan Tahun 2008

Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani	Jenis Bantuan								
		H T	HT R	CL V	TM B	B D	SC	ET	HS	TRP
KECAMATAN JUNREJO										
Pendem	Sekar Abadi	1	-	-	1	-	1	-	-	4
Pendem	Sri Mulyo I	-	-	-	-	-	1	-	-	4
Pendem	Sri Mulyo II	-	-	-	-	1	1	-	-	4
Pendem	Sri Mulyo III	-	1	-	-	-	1	-	-	4
Junrejo	Sri Sejati I	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Junrejo	Gawerejo	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dadaprejo	Sri Sedono III	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Beji	Sumber Makmur III	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlekung	Sumber Urip	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Torongrejo	Sri Rejeki	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Torongrejo	Tani Makmur	1	-	-	-	-	1	-	-	4
Dadaprejo	Gapoktan Padi Bawang	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Desa/Kelu Rahan	Kelompok Tani	Jenis Bantuan								
		H T	HT R	CL V	TM B	B D	SC	ET	HS	TRP
KECAMATAN BATU										
Sisir	Rukun Tani I	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Temas	Sri Anom Mulyo I	1	-	-	-	-	-	-	-	-
KECAMATAN BUMIAJI										
BPP Pandanrejo	BPP / Dinas Pertanian	-	-	1	-	-	-	28	16	-
J U M L A H		10	1	2	1	1	5	28	16	20

Keterangan :

HT = Hand Tractor HTR = Hand Tractor CLV = Cultivator
 TMB = Timbangan BD = Box Drye SC = Seed Cleaner
 ET = Emposan Tikus HS = Hand Sprayer TR = Terpal

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008

2. Pemberian bantuan berupa bahan sarana produksi (saprodi).

Tabel 15 Daftar kelompok tani penerima bantuan saprodi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih Tanaman Pangan Tahun 2008

Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani	Jenis Bantuan							
		PO	PSO	BP	UR	ZA	SP	NP K	BLR
KECAMATAN JUNREJO									
Pendem	Sekar Abadi	600	6	200	800	800	600	500	-
Pendem	Sri Mulyo I	600	6	200	800	800	600	500	-
Pendem	Sri Mulyo II	600	6	200	800	800	600	500	-
Pendem	Sri Mulyo III	600	6	200	800	800	600	500	-
Junrejo	Sri Sejati I	-	-	-	-	-	-	-	-
Junrejo	Gawerejo	-	-	-	-	-	-	-	-
Dadaprejo	Sri Sedono III	-	-	-	-	-	-	-	-

Desa/ Kelurahan	Kelompok Tani	Jenis Bantuan							
		PO	PSO	BP	UR	ZA	SP	NP K	BLR
Beji	Sumber Makmur III	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlekung	Sumber Urip	-	-	-	-	-	-	-	-
Torongrejo	Sri Rejeki	-	-	-	-	-	-	-	-
Torongrejo	Tani Makmur	600	6	200	800	800	600	500	-
Dadaprejo	Gapoktan Padi Bawang	-	-	-	-	-	-	-	-
KECAMATAN BATU									
Sisir	Rukun Tani I	-	-	-	-	-	-	-	-
Temas	Sri Anom Mulyo I	-	-	-	-	-	-	-	-
KECAMATAN BUMIAJI									
BPP Pandanrejo	BPP / Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	250
J U M L A H		3000	30	1000	4000	4000	3000	2500	250

Keterangan :

PO = Pupuk Organik

PSO = Pestisida Organik

BP = Benih Padi

UR = Pupuk Urea

ZA = Pupuk ZA

SP = Pupuk SP-36

NPK= Pupuk NPK Phonska

BLR = Pupuk Belerang

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008

f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca

Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Pelaksanaan:

1. Pengadaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, Dinas Pertanian Kota Batu memberikan bantuan peralatan kepada beberapa kelompok tani.

Tabel 16 Daftar gapoktan penerima bantuan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2008

Penerima	Lokasi	Jenis Mesin	Jumlah
Gapoktan Apel "Batu Lestari"	Batu	Mesin Sortasi Buah	2 Unit
Kelompok Tani Bumijaya I	Bumiaji	1. Juicer Extractor	1 Unit
		2. Tangki Penampung	1 Unit
Kelompok Tani Bumijaya II	Bumiaji	1. Juicer Extractor	2 Unit
		2. Tangki Penampung	2 Unit
		3. Sealer Gelas Plastik	1 Unit
		4. Bottle Capping Machine	1 Unit
Kelompok Tani Sumber Tani	Pandanrejo	1. Sealer Gelas Plastik	1 Unit
		2. Bottle Capping Machine	1 Unit
Kelompok Tani Intisari	Sumbergondo	1. Perajang (Chip)	1 Unit
		2. Perajang Ubi (Sawut)	1 Unit

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008

g. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

1. Pertemuan Koordinasi

Pertemuan Koordinasi penyuluh pertanian di Kota Batu dilakukan di tiap-tiap kecamatan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali. Pertemuan rutin penyuluh tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan di wilayah binaan masing-masing. Selain itu, pertemuan ini juga diperlukan untuk mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik dan terpadu.

2. Penyusunan Program Penyuluhan

Penyusunan Program Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Desember 2008 bertempat di Balai Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji. Penyusunan program dilakukan oleh penyuluh pertanian sebagai bahan acuan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di tiap-tiap BPP. Program penyuluhan yang telah disusun tersebut kemudian diterjemahkan oleh masing-masing penyuluh dalam rangkaian kegiatan penyuluhan di masyarakat.

3. Pelatihan Teknologi Pertanian Terpadu

Pelatihan Teknologi Pertanian Terpadu dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Desember 2008 bertempat di Hotel Mentari. Peserta terdiri dari Penyuluh, Petugas POPT, Aparatur Desa dan Ketua-ketua Gapoktan.

Pengajar pelatihan berasal dari lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang berkompeten di bidang pertanian pada umumnya dan juga pakar lingkungan.

4. Demplot Penerapan Teknologi Spesifik Lokalita

- a. Demplot Pengelolaan Tanaman Padi Terpadu dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI) dilaksanakan di Dusun Sekar Putih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- b. Demplot Pengaruh Pupuk Kandang Organik pada Tanaman Sayuran Dataran Tinggi dilaksanakan di Dusun Santrean, Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- c. Demplot Intensifikasi Tanaman Jagung Manis MT 2008/2009 dilaksanakan di Dusun Pandan, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
- d. Demplot Intensifikasi Tanaman Bawang Merah MT 2008/2009 dilaksanakan di Dusun Durek, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

5. Pendampingan dan Pembinaan THLTB

Pendampingan dan pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTB PP) sebagai tenaga kontrak dari Departemen Pertanian yang diperbantukan di daerah perlu mendapatkan porsi tersendiri. Pendampingan dan pembinaan THLTB PP ini dilakukan oleh penyuluh PNS, sedangkan penilaian kinerjanya dilakukan oleh Koordinator Penyuluh di masing-masing kecamatan.

Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan ke Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian sebagai laporan.

6. Monitoring dan Evaluasi

h. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu

Pelaksanaan: Pengadaan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, notebook 3 (tiga) unit, kamera digital 1 (satu) unit dan printer 2 (dua) unit untuk kelancaran operasional guna pencapaian tujuan.

i. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Pelaksanaan: Diberikannya bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) kepada kelompok tani penangkar benih tanaman hias dan tanaman apel yaitu :

1. Kelompok tani Sido Makmur-Desa Sidomulyo : Rp. 51.750.000,-
2. Kelompok tani Sri Rejeki-Desa Sidomulyo : Rp. 51.750.000,-
3. Kelompok tani Margo Mulyo-Desa Sidomulyo : Rp. 51.625.000,-
4. Kelompok tani Sri Mulyo III-Desa Bulukerto : Rp. 51.750.000,-
5. Kelompok tani Sri Makmur-Desa Bulukerto : Rp. 51.750.000,-
6. Kelompok tani Sri Mulyo-Desa Bulukerto : Rp. 51.625.000,-

j. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Hortikultura

Pelaksanaan:

Diberikannya bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) kepada kelompok tani tanaman hias dan tanaman apel yaitu :

1. Kelompok tani pengembangan kawasan hortikultura (tanaman hias) yaitu kelompok tani Margi Rahayu-Desa Gunungsari :Rp. 50.000.000,-
2. Kelompok tanipeningkatan produksi dan mutu apel yaitu :
 - Kelompok tani Sri Rejeki-Desa Bulukerto : Rp. 45.000.000,-
 - Kelompok tani Sumber Makmur V-Desa Giripurno: Rp. 45.000.000,-

k. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3

Pelaksanaan:

Diberikannya bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) kepada kelompok tani apel dan tanaman hias yaitu :

1. Kelompok tani Sumber Makmur II-Desa Giripurno : Rp. 49.027.500,-
2. Kelompok tani Sri Mulyo II-Desa Bulukerto : Rp. 49.027.500,-
3. Kelompok tani Mawar-Desa Gunungsari : Rp. 49.027.500,-

4. Kelompok tani Suko Makmur-Desa Sidomulyo : Rp.
49.027.500,-

1. Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis

Pelaksanaan:

1. Telah dikembangkannya pertanian (farm development) yang meliputi pemberian bantuan sosial, pengadaan saprodi (pupuk dan pestisida), pengadaan bibit hortikultura dan perkebunan serta pembangunan saung meeting.

Tabel 17 Data Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial PLA Tahun Anggaran 2008 Kota Batu

No	Kelompok Tani	Alamat	Volume (Rp.)	Luas Lahan (ha)	Komoditi/ lain-lain
1	MAKMUR ABADI	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Apel
2	BUMIJAYA II	Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Apokat
3	ARJUNO II	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Apokat
4	KARYA TANI	Ds. Punten Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Jeruk
5	BUMIJAYA I	Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Apel
6	INTISARI	Ds. Sumbergondo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Apel
7	BUMIJAYA III	Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Jeruk b. Kopi
8	SUMBER TIRTO MULYO	Ds. Oro-oro Ombo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Apokat

9	MARGO MULYO	Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Kopi
10	SUMBER HASIL	Ds. Pesanggrahan Kec. Batu	75.000.000,-	50	Kopi
11	BUKIT FLORA	Ds. Sumberbrantas Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	Tamalilo
12	ARUM DALU	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Tamalilo b. Kopi c. Jambu
13	MAJU I	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Apokat
14	MAKMUR	Ds. Songgokerto Kec. Batu	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Nangka
15	TENTREM	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Apokat
16	ARGO	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Apokat
17	NARIMO	Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji	75.000.000,-	50	a. Kopi b. Apokat
18	TANUSE	Ds. Sumberejo Kec. Batu	75.000.000,-	50	a. Jambu Biji Merah b. Manggis c. Durian
19	SUMBER ARUM	Ds. Sumberejo Kec. Batu	75.000.000,-	50	a. Apokat b. Nangka
20	ARJOM MAKMUR	Ds. Sumberejo Kec. Batu	75.000.000,-	50	a. Apokat b. Nangka
J U M L A H			1.500.000.000	1.000	-

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (capacity building) berupa rapat koordinasi.
3. Pengembangan masyarakat (community development) yang meliputi pertemuan rutin, temu lapang petani dan penerapan pelaksanaan selektif.

4. Terlaksananya konservasi lahan pada DAS hulu seluas ± 1.000 ha, masing-masing pada kawasan hortikultura seluas ± 500 ha dan pada kawasan tanaman perkebunan seluas ± 500 ha.

m. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pelaksanaan:

1. Pembiayaan operasional penyuluh (BOP)
2. Penyebaran Informasi Penyuluhan

Penyebaran informasi penyuluhan berupa penyuluhan interaktif yang dikemas dalam acara Dialog Pertanian yang disiarkan secara langsung di Agropolitan Televisi (ATV) setiap hari Kamis pukul 11.30 WIB. Informasi penyuluhan juga diberikan melalui penyuluhan secara langsung di lapang dan pemberian Tabloid Sinar Tani secara berkala.

3. Pengawasan dan Pendampingan THLTB Penyuluh Pertanian

Terdapat sepuluh orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTB-PP) yang ditempatkan di desa-desa di wilayah Kota Batu dengan didampingi oleh Penyuluh PNS senior. Adapun penilaian kinerja dari masing-masing THLTB-PP dilakukan oleh Koordinator Penyuluh di tiap kecamatan.

4. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi

n. Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

Pelaksanaan:

Terealisasinya bantuan langsung benih unggul berupa 2.500 kg benih padi non hibrida (setara 100 ha luas penanaman) dan 750 kg benih hibrida (setara 50 ha luas penanaman).

Tabel 18 Daftar Penerima BLBU Padi Non Hibrida Kota Batu Tahun 2008

No	Desa	Kelompok Tani	Luas (ha)	Bantuan Benih	
				Jumlah (kg)	Varietas
1	KECAMATAN BUMIAJI				
	Pandanrejo	Musyawaharah Tani	10	250	Ciherang
	Giripurno	1. Sumber Makmur V	10	250	Ciherang
		2. Sumber Makmur III	10	250	Ciherang
2	KECAMATAN JUNREJO				
	Dadaprejo	Sri Sedono III	10	250	Ciherang
	Junrejo	Sri Rejeki	5	125	Ciherang
	Mojorejo	Sri Sedono III	5	125	Ciherang
	Torongrejo	1. Rukun Tani	5	125	Ciherang
		2. Mulyo Sejati	5	125	Ciherang
	Pendem	1. Sri Mulyo III	10	250	Ciherang
		2. Sri Mulyo II	10	250	Ciherang
		3. Sri Mulyo I	10	250	Ciherang
		4. Sekar Abadi	10	250	Ciherang
J U M L A H			100	2.500	-

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008

Tabel 19 Daftar Penerima BLBU Padi Hibrida Kota Batu Tahun 2008

No	Desa	Kelompok Tani	Luas (ha)	Bantuan Benih	
				Jumlah (kg)	Varietas
1	KECAMATAN JUNREJO				
	Beji	Sumber Makmur	5	75	Hibrida Bernas
	Pendem	Sekar Abadi	5	75	Hibrida Bernas
	Torongrejo	Agro Mulyo	5	75	Hibrida Bernas
		Rukun Tani Makmur	5	75	Hibrida Bernas
	Mojorejo	Sri Sedono II	5	75	Hibrida Bernas
	Junrejo	Sri Mulyo II	10	150	Hibrida Bernas
2	KECAMATAN BATU				
	Sisir	Rukun Tani	10	150	Hibrida Bernas
	Songgokerto	Makmur	5	75	Hibrida Bernas
J U M L A H			50	750	-

Sumber Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2008.

3. Tahun 2009

Sedangkan di tahun 2009 ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan Agropolitan, diantaranya adalah:

a. Publikasi Pendataan Usaha Tani

Pelaksanaan:

Terpublikasikannya hasil pendataan usahatani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sehingga informasi mengenai komoditas unggulan pertanian Kota Batu dapat diakses oleh berbagai pihak.

b. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

Pelaksanaan:

Pembuatan Buku Kajian Kebijakan Subsidi Pertanian (Pupuk) di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dan buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, sehingga penentuan kebijakan subsidi pertanian yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Pelaksanaan:

Melakukan Pelatihan, temu lapang, magang sehingga dapat memberikan Kelancaran Administrasi dan kelancaran Koordinasi serta Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis, Meningkatkan pelayanan informasi teknologi pertanian, Tersedianya fasilitas informasi teknologi pertanian, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian

pelaksanaan:

telah telaksananya Tiga paket pelatihan petani dan petugas teknis bidang pertanian

e. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Pelaksanaan:

Tersedianya bibit padi dan saprodi berupa pupuk organik dan pestisida organik sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

f. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

pelaksanaan:

Terbangunnya dan tersedianya lumbung pangan desa di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji

g. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

pelaksanaan:

Terbangunnya dan tersedianya lumbung pangan desa di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji

h. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri

Pelaksanaan:

Terbangunnya jaringan irigasi pertanian, rumah kompos, saung tani, irigasi pada pipa dan lumbung pangan di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.

i. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura

Pelaksanaan :

tersedianya bibit tanaman pangan dan hortikultura serta sarana produksi organik.

j. Inventarisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pelaksanaan:

tersediannya data tanaman pangan dan hortikultura

k. Pengujian Laboratorium Pertanian

Pelaksanaan:

tersediannya data dan terlaksananya pengujian tentang residu pestisida di tanah dan produk pertanian.

l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan:

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan serangan hama dan penyakit tanaman sayuran, buah, biofarmaka dan pangan.

m. Pengembangan Konservasi Lahan

Pelaksanaan:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan konservasi Lahan dan DAS Hulu
2. Meningkatkan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan kritis dengan memperkuat kaidah lingkungan
3. Menggerakkan dan memperdayakan petani / kelompok tani
4. Melakukan usaha tani konservasi lahan pada DAS Hulu
5. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran petani serta generasi muda dalam upaya konservasi sumberdaya lahan pertanian dan pelestarian lingkungan.

6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pendapatan, serta kesejahteraan petani
7. Menekan laju pertambahan lahan kritis

n. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Tersedia dan tercukupinya saprodi tanaman organik

o. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Tersedianya sarana irigasi ditingkat usaha tani, sehingga produksi dan produktivitas produk pertanian bisa lebih meningkat.

q. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Tersedianya dan terpenuhinya bibit unggul pertanian bersertifikat

r. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen

Pelaksanaan:

Tersedianya sarana dan prasarana khususnya di desa pandanrejo

s. Perluasan Kawasan Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Tersedia dan Tersalurnya bibit angur, kopi dan rumput penguat teras ke Kelompok tani di Kota Batu

t. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Pelaksanaan:

Terpenuhinya sarana dan prasarana di BPP Kelurahan Sisir Kecamatan Batu.

Tidak terlaksananya kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani, kegiatan pengembangan diverdifikasi tanaman, dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian, karena tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

u. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Pelaksanaan:

1. Terlaksananya pengadaan bibit tanaman hias krisan (50.000 batang), dracaena (1.200 batang) dan mawar potong (8.000 batang).
2. Terlaksananya pembangunan *screenhouse* sebanyak 1 unit.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan tanaman hias.
4. Menyediakan sarana dan prasarana produksi berupa bibit tanaman hias.
5. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman hias terutama krisan, dracaena dan mawar potong.
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pembangunan pertanian tanaman hias yang mendukung nuansa wisata sesuai dengan visi Kota Batu dan mendorong

berkembangnya system dan usaha agribisnis yang berkelanjutan dan terdesentralisasi.

v. Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi

Pelaksanaan:

1. Terlaksananya Pembangunan *screen house* sebanyak 2 unit.
2. Terlaksananya pengadaan bibit tanaman hias sebanyak 38.000 batang bibit tanaman krisan dan 4.500 pot bibit tanaman anggrek serta 500 sak pupuk kandang.
3. Terlaksananya sosialisasi bagi petani tanaman hias pada kelompok yang akan menerima bantuan.
4. Terpenuhinya kebutuhan petani tanaman hias akan fasilitas pembudidayaan tanaman berupa *screen house* dan bibit tanaman hias berkualitas serta pupuk kandang sebagai sarana produksi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk tanaman hias, khususnya krisan dan anggrek. Selain itu pula meningkatnya pengetahuan petani mengenai pembudidayaan tanaman hias krisan dan anggrek.
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tanaman hias.

w. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

1. Terdistribusikannya bibit kopi ke Kelompok Tani Sari Makmur Floris

2. Terdistribusikannya Pupuk Kandang ke Kelompok Tani Sari Makmur Floris
3. Terlaksanakannya pemanfaatan lahan hortikultura komoditas perkebunan sebagai komoditas alternatif
4. Meningkatkan pendapatan petani perkebunan

x. Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Pelaksanaan:

1. Pameran *Pekan Anggrek Malang Raya 2009* yang berlangsung selama 6 (enam) hari, yakni pada tanggal 6 sampai dengan 12 Nopember 2009.
2. Tersedianya 1 (satu) unit notebook sebagai sarana pengembangan agribisnis.

y. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Pelaksanaan:

1. Mengikuti Pameran Gelar Potensi Produk Pertanian dalam rangka peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-37 Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.
2. Mengikuti Lomba Gelar Pangan Olahan dalam rangka peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-37 Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.

z. Pameran Produk Hasil Pertanian

Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dimana kegiatan ini membutuhkan partisipasi banyak pihak terkait, sehingga diperlukan sosialisasi dan koordinasi-koordinasi sebagai bentuk persiapan kegiatan.

ab. Penyampaian Informasi dan Perluasan Jaringan Pemasaran Atas Hasil Produk Pertanian/Perkebunan.

Pelaksanaan:

Pameran *International Food Expo* 2009 dalam rangka Gebyar Hari Pangan Sedunia XXIX selama 3 (tiga) hari pada tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2009 yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian.

ac. Promosi Atas Hasil Produk Olahan Pertanian/Perkebunan

Tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang dibutuhkan untuk persiapan kegiatan yang meliputi sosialisasi dan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan tidak adanya undangan kegiatan pameran baik tingkat Malang raya maupun tingkat propinsi Jawa Timur, setelah pengesahan DPPA oleh DPRD.

**ad.Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna.**

Pelaksanaan:

1. Tersampainya bantuan alat dan mesin pertanian dan alat olahan hasil pertanian kepada petani, kelompok tani, dan PKK Kota Batu dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 20. Daftar Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dan Alat Olahan Hasil Pertanian

Penerima	Lokasi	Jenis Alat	Jumlah
Kelompok Tani Subur Makmur	Jl. Brantas Gg. I No. 1 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu	hand tractor	1 unit
Kelompok Tani Ladu	Jl. Bukit Berbunga No. 113 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu	oven dandang panci	2 unit 3 unit 3 unit
Kelompok Tani Joyo Makmur	Jl. Raya Tegalsari RT. 01 RW. 03 Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji	mixer	1 unit
PKK C2	RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu	mixer	

Sumber Laporan Pertanian Kota Batu Tahun 2009

2. Tersampainya bantuan alat laboratorium pertanian berupa 1 (satu) unit ekstraktor yang digunakan untuk mengekstrak nilam dan telah diterimakan kepada Kelompok Tani Sumber Makmur III dengan alamat Dukuh Krajan Desa Beji Kecamatan Junrejo.

**ae. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna.**

Pelaksanaan:

1. Pelatihan Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan pada tanggal 7 Desember 2009 dengan narasumber drh. Siti Aisyah (dosen Universitas Muhammadiyah Malang)
2. Pelatihan Pemasaran dan *Labelling* pada tanggal 8 Desember 2009 dengan narasumber Ir. M. Chin Fahmi
3. Pelatihan Kewirausahaan pada tanggal 9 Desember 2009 yang diisi oleh Ir. M. Chin Fahmi (Manager Dinoyo Manufacturing Engineering)

af. Penyediaan Fasilitas Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

3. Tersedianya bantuan berupa 1 (satu) unit alat pengolah kopi.
4. Tersedianya alat/mesin pengolahan hasil pertanian/ perkebunan (Laporan Kegiatan DISTANHUT tahun 2009, Bab V, Hal 49-88).
4. Tahun 2010, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dan mengembangkan kegiatan Agropolitan di Kota Batu, diantaranya:

a. Pengembangan Tanaman Pangan/Hortikultura Organik

Pelaksanaan:

Penyaluran bantuan sarana produksi pertanian (bibit sayur, bibit palawija, bibit apel, bibit jeruk Keprok Batu 55, bibit padi, bibit krisan, bibit anggrek, pupuk organik dan pestisida organik) serta prasarana

pertanian (alat klimatologi, pembangunan rumah kompos dan mesin pengolah pupuk organik, serta pembangunan kios). Sehingga bisa meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui peningkatan penggunaan bibit berkualitas, pupuk dan pestisida organik di kalangan petani, Meningkatnya produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi, Terpenuhinya kebutuhan prasarana produksi pertanian mendukung pengembangan potensi komoditas spesifik lokasi (Jeruk Keprok Batu 55), meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

b. Pengembangan Intensifikasi Pekarangan

Pelaksanaan :

Penyaluran bantuan bibit tanaman biofarmaka (lidah buaya, jeruk nipis, jambu biji), hal ini dalam rangka untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berguna untuk membantu meningkatkan kesehatan dan pendapatan keluarga petani

c. Pengembangan Sekolah Lapang Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Terlaksananya Sekolah Lapang Hortikultura Menuju *Good Agriculture Practices (GAP)* untuk komoditas Apel dan Kubis Bunga sehingga bisa meningkatkan SDM petani dalam pengelolaan budidaya tanaman hortikultura dalam hal ini apel dan kubis bunga, tersampainya upaya perubahan pola pikir petani menuju budidaya tanaman sehat dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan prosedur GAP, mengurangi

dampak negatif penggunaan pestisida, Meningkatkan mutu, daya saing dan nilai jual produk hortikultura

d. Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Pelaksanaan:

Tersalurnya dana bantuan sosial untuk pengembangan hortikultura di kawasan DAS seluas 10 ha, tersalurnya dana bantuan sosial pengembangan kawasan hortikultura terintegrasi berbasis GAP (kawasan jeruk, kawasan tanaman hias dan kawasan sayuran) sebanyak 4 paket, terlaksananya fasilitasi magang sekolah lapang hortikultura melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practices* (GAP) Hortikultura Komoditas Jeruk Keprok Batu 55, sehingga bisa meningkatkan fungsi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu dan peningkatan pengembangan sayuran di kawasan DAS, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan terbentuknya kawasan tanaman sayuran di daerah DAS/ daerah rawan longsor dan erosi pada kelompok tani / gapoktan tanaman sayuran, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas, petani dan kelompok tani dalam penerapan budidaya yang baik dan benar (GAP) dan SOP, memperkuat modal petani untuk mengembangkan usaha hortikultura di kawasan pengembangan

e. Pengelolaan Lahan dan Air

Pelaksanaan:

Tersalurinya dana bantuan sosial untuk pengelolaan lahan kepada 27 kelompok petani penerima, Pelaksanaan Pelatihan Konservasi DAS Hulu Kawasan Hortikultura, Terselenggaranya Sekolah Lapang Konservasi DAS Hulu Kawasan Hortikultura, sehingga bisa Memaksimalkan peran dan partisipasi petani/kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan di lapangan, membantu penyediaan modal usaha tani untuk kelompok, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman hortikultura sekaligus melakukan kegiatan konservasi lahan dan air, meningkatnya partisipasi dan kesadaran petani serta generasi muda dalam upaya konservasi DAS Hulu dan pelestarian lingkungan, sebagai ajang tukar informasi, pengalaman dan koordinasi antara kelompok tani

f. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

Pelaksanaan:

Penyaluran bantuan benih unggul tanaman pangan berupa 3.975 kg benih padi hibrida dan 6.250 kg benih padi non hibrida, yang bisa meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penggunaan benih unggul bersertifikat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan hasil Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan, meningkatkan kesadaran petani akan penggunaan benih unggul dan bermutu, penerapan teknologi budidaya tanaman padi, peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani

g. Bantuan Langsung Pupuk (BLP)

Pelaksanaan:

Penyaluran bantuan langsung pupuk NPK sebanyak 26.500 kg dan pupuk organik (granul sebanyak 79.500 kg dan pupuk organik cair 530 liter) di tingkat petani/kelompok tani, sehingga semakin meluasnya penerapan pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk NPK dan pupuk organik di tingkat petani/kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

h. Bantuan Benih dan Pupuk Organik Cair

Pelaksanaan:

Penyaluran bantuan benih berkualitas varietas unggul dan pupuk organik cair untuk mendukung upaya pengembangan kawasan hortikultura, khususnya buah dan sayuran, sehingga bisa meningkatkan ketersediaan benih dan pupuk organik untuk mendukung pengembangan kawasan hortikultura

i. Intensifikasi Pekarangan

Pelaksanaan:

Terlaksananya percontohan tanaman sayuran, buah-buahan dan biofarmaka secara langsung di lahan pekarangan maupun secara

vertikultur di 7 kelompok kader Posyandu dari 8 kelompok PKK RW Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, sehingga tersedianya hasil intensifikasi pekarangan berupa aneka produk hortikultura baik sayur, buah maupun biofarmaka untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menambah pendapatan keluarga, tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di lingkungan pemukiman masyarakat, kelestarian lingkungan terjaga, peningkatan pendapatan petani

j. Sekolah Lapang Tanaman Hias Mawar Potong Dalam Rangka Penerapan GAP Hortikultura

Pelaksanaan:

Terlaksananya Sekolah Lapang Mawar Potong dalam rangka penerapan GAP tanaman mawar di kota Batu, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dan petugas tentang pengelolaan agroekosistem secara bersama-sama sebagai dasar dalam penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) pada tanaman mawar, meningkatnya kemandirian petani/kelompok tani dalam mengelola agroekosistem berdasarkan GAP sehingga mampu membangun agribisnis komoditas tanaman hias khususnya Mawar, mengenalkan dan menggali teknologi spesifik lokasi yang memenuhi standart GAP dan berbasis pada input lokal

k. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pelaksanaan:

Sudah melakukan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam rangka Pengelolaan Tanaman Hortikultura disertai dengan kunjungan lapang untuk 50 orang peserta yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian Kota Batu dalam berbudidaya tanaman hortikultura yang baik, sesuai dengan Standar Operasional (SOP) dan *Good Agriculture Practises* (GAP), meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi pertanian dan penanganan pasca panen yang baik dan benar untuk mendukung peningkatan mutu produk hortikultura yang dihasilkan oleh petani di Kota Batu, membuka akses pasar dan menciptakan peluang pasar secara mandiri, pendalaman bagi aparatur tentang sistematika pelaksanaan sekolah lapang bagi petani

l. Pengujian Laboratorium Pertanian

Pelaksanaan:

Pengujian residu pestisida pada hasil pertanian di wilayah Kota Batu, pengujian komposisi unsur pupuk organik di pasaran Kota Batu, hal ini tersedianya data residu pestisida pada beberapa produk pertanian (hortikultura) di Kota Batu sebagai gambaran tingkat pemakaian pestisida pada pengelolaan budidaya pertanian dan kualitas produk pertanian yang ada di Kota Batu, tersedianya data jenis pestisida yang banyak digunakan petani hortikultura di Kota batu, memberikan

informasi tentang data dasar kadar unsur pupuk organik sebagai acuan petani dalam memilih berbagai produk pupuk organik yang beredar di pasaran Kota Batu

m. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat

Guna

Pelaksanaan:

Terlaksananya Sekolah Lapang Organisme Pengganggu Tanaman (SL-OPT) dan demplot untuk komoditas Mawar dan Bawang Merah, yang bisa meningkatkan SDM petani dalam pengelolaan budidaya tanaman mawar dan bawang merahm mengembangkan dan memasyarakatkan penerapan PHT (Pengelolaan Hama Terpadu), tersampainya upaya perubahan pola pikir petani menuju budidaya tanaman sehat dan ramah lingkungan

n. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian berupa GPS, yang bisa meningkatkan sarana serta kualitas penyuluh pertanian dan mantri tani

o. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah

Pelaksanaan:

Pameran produk hasil pertanian/perkebunan Kota Batu baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi sehingga terpromosikannya hasil

produk pertanian unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk pertanian Kota Batu.

p. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

Pelaksanaan:

Wawancara dan pengamatan langsung ke kelompok tani/gapoktan/industri rumah tangga dan industri skala besar yang mengolah produk pertanian/perkebunan sedangkan untuk data harga pasar produk pertanian dilakukan dengan terjun langsung ke pasar/pengamatan langsung, sehingga tersedianya data UMKM, produk olahan dan harga pasar produk olahan.

q. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan:

pelatihan kegiatan bimbingan pengoperasian teknologi pengolahan strawberry sehingga terciptanya SDM pertanian yang terlatih di masa yang akan datang, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani yang tergabung dalam kelompok tani komoditas strawberry.

r. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri

Pelaksanaan:

Pembangunan konstruksi jalan yang terdiri jalan usahatani (4 paket), dan jalan produksi pertanian (2 paket), pembangunan konstruksi jaringan irigasi yang terdiri jaringan irigasi tingkat usahatani (4 paket),

jaringan irigasi tingkat Desa(4 paket) dan jaringan irigasi pipanisasi (6 paket), kunjungan lapang. Oleh karena itu perlu terbangunnya konstruksi jalan (6 paket) dan konstruksi jaringan irigasi (14 paket), terlaksananya kunjungan lapang ke Propinsi Bali.

s. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan:

Pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Alat Mesin Pertanian (Hand Traktor, Chopper dan APPO), pengadaan Sarana dan Prasarana berupa Alat Olahan (Olahan Minuman Kesehatan, Olahan Sari Strowberry, Pengemasan Sayuran Organik, Olahan Keripik Umbi dan Olahan Lidah Buaya, Olahan Keripik Buah, Olahan Susu Kedele, Olahan Sari Buah)

t. Pengembangan Agroindustri di Kota Batu

Pelaksanaan:

Bimbingan teknis pengolahan produk hortikultura dan pengemasan sayuran organik serta fasilitasi kemitraan (temu bisnis), pengadaan alat pengolahan hasil hortikultura dan alat pengemasan sayuran organik, bantuan sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), sehingga terbentuknya inisiasi pengembangan kawasan hortikultura yang memenuhi skala ekonomi pedesaan

u. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Pelaksanaan:

Pelatihan teknis/non teknis bagi petani dan pelaku agribisnis, kunjungan lapang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan SDM petani di bidang keamanan pangan dan penguasaan teknologi agribisnis

v. Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan Sistem Pemasaran yang Tepat

Pelaksanaan:

Sosialisasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan sistem pemasaran yang tepat, pembuatan sarana prasarana untuk penyuluhan pertanian dan sebagai sumber informasi berupa leaflet sebanyak 1 (satu) paket yang bisa, meningkatkan pengetahuan petani, khususnya yang tergabung dalam gapoktan, tentang sistem pemasaran produk pertanian yang tepat, terpenuhinya sarana prasarana untuk penyuluhan pertanian.

w. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Terdistribusikannya bibit tanaman buah-buahan dan sayuran yang terdiri dari :

a. Bibit Buah-buahan :

1. Bibit Jeruk Keprok Batu 55 (5.000 phn)
2. Bibit Apel (10.000 phn)
3. Bibit Anggur (2.000 phn)

b. Bibit Sayuran (1 paket)

Sehingga bisa meningkatkan kualitas produk tanaman buah-buahan dan sayuran, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tanaman buah-buahan dan sayuran (Laporan Kegiatan DISTANHUT Tahun 2010, Bab V, Hal 47-85).

5. Tahun 2011

Di tahun ini ada beberapa kegiatan yang ikut mendorong, memajukan dan mengembangkan kebijakan Agropolitan ini, diantaranya:

a. Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri

Pelaksanaan:

(1). Penyaluran bantuan sarana produksi berupa bibit strawberi dan saprodi, bibit krisan dan saprodi, bibit mawar dan saprodi, (2). Penyelenggaraan sosialisasi prosedur sertifikasi tanaman, (3). Pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan screen house, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan produksi pertanian, pembangunan jaringan irigasi tingkat desa dan pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Sehingga tersedianya benih tanaman hortikultura yaitu benih Strawberry, Krisan dan Mawar dan sarana penunjangnya, meningkatnya pengetahuan petani khususnya petani penangkar benih tentang prosedur sertifikasi tanaman, tersedianya sarana dan prasarana pertanian seperti screen house, jalan usaha tani, jalan produksi pertanian, jaringan irigasi tingkat desa, jaringan irigasi tingkat usaha tani, meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui penggunaan bibit yang berkualitas, pupuk

dan pestisida organik serta adanya sarana dan prasarana yang memadai, meningkatnya kesejahteraan petani.

b. Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura

Organik

Pelaksanaan:

(1). Penyaluran bantuan benih tanaman yaitu benih bawang merah, kentang, padi, jagung manis, bawang prei, brongkol, cabe merah, tomat, brokoli, seledri, wortel dan sawi putih, (2). Penyaluran bantuan pupuk organik padat, pupuk organik cair, pestisida hayati dan agen hayati. Sehingga bisa meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian dengan penggunaan bibit yang bermutu dan sarana produksinya, merubah pola pikir dan perilaku petani untuk melakukan budidaya tanaman yang ramah lingkungan, meningkatnya mutu produk pertanian Kota Batu dengan tolak ukur menurunnya residu pestisida, terciptanya kawasan pertanian organik yang bisa menghasilkan produk pertanian yang bermutu, aman dikonsumsi dan ramah lingkungan secara kontinu sehingga bisa menciptakan pasar secara mandiri, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemasaran produk pertanian yang lebih berkualitas.

c. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pelaksanaan:

Pembuatan perencanaan infrastruktur pertanian yang meliputi perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa, Jaringan

Irigasi Tingkat Usaha Tani, Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Pertanian. Sehingga tersedianya perencanaan infrastruktur pertanian yang meliputi perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi Pertanian yang dapat dipakai sebagai acuan pembangunan infrastruktur pertanian sehingga pelaksanaan pembangunannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang diharapkan.

d. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian.

Pelaksanaan:

Pembuatan perencanaan gudang benih kentang. Sehingga bisa tersedianya perencanaan gudang benih kentang yang dapat dipakai sebagai acuan pembangunan gudang benih kentang sehingga pelaksanaan pembangunannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang diharapkan.

e. Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Pelaksanaan:

(1). Tertanamnya Bibit Tanaman Kopi (Kopi Arabika) dilahan kelompok tani tersebut sebanyak 6.000 batang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber Makmur I sebanyak 800 batang
- b. Sumber Makmur III sebanyak 1,200 batang
- c. Sumber Harapan III sebanyak 2.000 batang

- d. Tirto Makmur sebanyak 2.000 batang
- (2). Tersalurnya pupuk NPK 15:15:15 sebanyak 1.147 Kg kepada kelompok tani perincian sebagai berikut :
 - a. Sumber Makmur I sebanyak 134 Kg
 - b. Sumber Makmur III sebanyak 253 Kg
 - c. Sumber Harapan III sebanyak 365 Kg
 - d. Tirto Makmur sebanyak 365 Kg

Hal ini bisa berguna agar pendayagunaan lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan, alternatif pengembangan tanaman yang bernilai jual tinggi, pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, peningkatan nilai tambah petani, adanya keanekaragaman tanaman perkebunan, berkurangnya Run Off dan erosi di lokasi kegiatan

f. Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik dan Aktualisasi Data Base Pertanian.

Pelaksanaan:

Sudah terealisasinya Website Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan alamat www.distanhutkotabatu.org.

g. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan:

- (1). Tersalurnya bantuan pestisida kimia, pestisida organik dan agen hayati untuk pengendalian kutu sisik pada tanaman apel
- (2). Terselenggaranya rapat koordinasi dan pembekalan RPO (Regu

Pengendali OPT), (3). terlaksananya gerakan pengendali organisme pengganggu tanaman (kutu sisik) pada tanaman apel. Sehingga bisa terpenuhinya kebutuhan pestisida untuk pengendalian kutu sisik, terkoordinasinya pelaksanaan gerakan pengendalian kutu sisik sehingga pelaksanaan gerakan pengendalian dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam menanggulangi serangan OPT khususnya kutu sisik pada tanaman apel, terkendalnya serangan kutu sisik pada tanaman apel, meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu buah apel, memulihnya perekonomian petani apel di Kota Batu sehingga tetap bertahan bahkan memperluas areal pembudidayaan tanaman apel.

h. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Pelaksanaan:

- (1). Tersedianya fasilitasi sarana pasca panen dalam rangka peningkatan mutu tanaman buah dan penurunan kehilangan hasil, (2) Terbentuknya kawasan buah yang mampu menghasilkan produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, (3). Terlaksananya sekolah lapang tanaman buah apel dan jeruk, (4) Meningkatnya peran dan motivasi kelompok tani tanaman buah untuk pengembangan usaha serta tertatanya rantai pasokan tanaman buah. Sehingga bisa terintegrasinya program pengembangan kawasan buah,

Terlaksananya SL-GAP, terlaksananya pembinaan/pengawasan/pendampingan terhadap kelompok tani/gapoktan, terlaksananya pertemuan pengembangan/pemberdayaan penumbuhan kelembagaan, kontak bisnis/kemitraan, teridentifikasinya kelompok tani/gapoktan pelaku usaha, terlaksananya kegiatan pembinaan/pendampingan penerapan GAP di Kota Batu, terlaksananya Identifikasi Calon Kebun Registrasi di Kota Batu, tersedianya peralatan pendukung pengelolaan pasca panen buah, terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan pasca panen buah, Pengembangan Produksi Buah berupa Workshop, tersedianya pendukung peningkatan mutu pembinaan untuk kegiatan Pengembangan Produksi Buah berupa pedoman-pedoman.

i. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

Pelaksanaan:

- (1). Tersedianya fasilitasi sarana pasca panen dalam rangka peningkatan mutu florikultura dan penurunan kehilangan hasil, (2). Terbentuknya kawasan florikultura yang mampu menghasilkan produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor,
- (3). Terlaksananya sekolah lapang tanaman mawar, anggrek dan krisan, (4). Meningkatnya peran dan motivasi kelompok tani tanaman florikultura untuk pengembangan usaha serta tertatanya rantai pasokan tanaman florikultura. Sehingga dengan terlaksananya erlaksananya SL-

GAP dan SL GHP Mawar, Krisan dan Anggrek bisa memotivasi petani florikultura untuk pengembangan usaha tanaman hias, tertatanya rantai pasokan tanaman florikultura melalui workshop fasilitasi kemitraan, terlaksananya pembinaan penerapan SOP yang dilaksanakan dengan melibatkan petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi dan petugas dari Dinas terkait, teridentifikasinya kebun/lahan usaha yang akan diregistrasi yang telah menerapkan budidaya baik dan benar sesuai prinsip-prinsip GAP, terinformasinya dan dikenalnya hasil-hasil produk florikultura andalan di Kota Batu sehingga apresiasi masyarakat terhadap tanaman florikultura meningkat, tersedianya sarana prasarana untuk perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman florikultura, terlaksananya penyaluran bantuan pengembangan kawasan florikultura, terbentuknya kawasan florikultura yang menuju skala usaha ekonomis dengan menerapkan teknologi maju berbasis GAP/SOP.

j. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

Pelaksanaan :

- (1). Tersedianya fasilitasi sarana pasca panen dalam rangka peningkatan mutu florikultura dan penurunan kehilangan hasil, (2). Terbentuknya kawasan florikultura yang mampu menghasilkan produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, (3). Terlaksananya sekolah lapang tanaman mawar, anggrek dan

krisan, (4). Meningkatnya peran dan motivasi kelompok tani tanaman florikultura untuk pengembangan usaha serta tertatanya rantai pasokan tanaman florikultura.

k. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan

Pelaksanaan:

(1). Tersedianya fasilitasi sarana pasca panen dalam rangka peningkatan mutu sayuran serta biofarmaka dan penurunan kehilangan hasil, (2). Terbentuknya kawasan sayuran dan biofarmaka yang mampu menghasilkan produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor, (3). Terlaksananya sekolah lapang tanaman sayuran dan biofarmaka, (4). Meningkatnya peran dan motivasi kelompok tani tanaman sayuran dan biofarmaka untuk pengembangan usaha serta tertatanya rantai pasokan tanaman florikultura. Sehingga bisa mengintegrasikan program pengembangan kawasan sayuran dan biofarmaka, terlaksananya SL-GAP Paprika dan Sayuran, terlaksananya pembinaan/pendampingan/pengawasan terhadap kelompok tani/gapoktan, terlaksananya pertemuan pengembangan/pemberdayaan penumbuhan kelembagaan, kontak bisnis/kemitraan, teridentifikasinya kelompok tani/gapoktan pelaku usaha, terlaksananya kegiatan pembinaan/pendampingan penerapan GAP di Kota Batu, terlaksananya Identifikasi Calon Kebun Registrasi di Kota Batu, tersedianya peralatan pendukung pengelolaan pasca

panen buah, terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan pasca panen buah, terlaksananya peningkatan mutu pembinaan untuk kegiatan Pengembangan Produksi Buah berupa Workshop, tersedianya pendukung peningkatan mutu pembinaan untuk kegiatan Pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka berupa Pedoman-pedoman.

l. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura

Pelaksanaan:

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura. Sehingga bisa tercapainya peningkatan kinerja, efektivitas kerja, kenyamanan kerja dalam mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan hortikultura, tercapainya efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaporan dan transparansi pelaksanaan kegiatan serta tanggung jawab serta memudahkan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan hortikultura.

m. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

Pelaksanaan:

Penyaluran bantuan benih unggul tanaman pangan berupa 6.250 kg benih Padi Non Hibrida dan 1.575 benih Jagung Hibrida. Hal ini bisa Meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan jagung melalui penggunaan benih unggul bersertifikat dalam rangka memperkuat

ketahanan pangan, mengoptimalkan hasil Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan, meningkatkan kesadaran petani akan penggunaan benih unggul dan bermutu, penerapan teknologi budidaya tanaman padi dan jagung, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan padi dan jagung.

**Tabel 21 Daftar Kelompok Tani
Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011**

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Kebutuhan Benih	
					Varietas	Jumlah (kg)
Padi Non Hibrida						
I	Junrejo	Pendem	Sri Mulyo Pendem	50	Ciherang	1250
		Junrejo	Bagus	25	Ciherang	625
		Dadaprejo	Rukun Makmur	25	Ciherang	625
		Beji	Beji Makmur	25	Ciherang	625
II	Batu	Temas	Sri Anom Mulyo I	50	Ciherang	1250
		Sisir	Rukun Tani I	25	Ciherang	625
III	Bumiaji	Pandanrejo	Karya Tani	25	Ciherang	625
		Giripurno	Sumber Makmur II	25	Ciherang	625
		JUMLAH		250		6250
Jagung Hibrida						
I	Junrejo	Junrejo	Bagus	15	Bisi 816	225
		Torongrejo	Torong Makmur	15	Bisi 816	225
		Tlekung	Sumber Bumi Makmur	15	Bisi 816	225
II	Batu	Temas	Sri Anom Mulyo IV	15	Bisi 816	225
		Oro-oro Ombo	Panderman II	15	Bisi 816	225
		Pesanggrahan	Sumber Hasil I	15	Bisi 816	225
III	Bumiaji	Gunungsari	Margi Rahayu 6	15	Bisi 816	225
		JUMLAH		105		1575

Sumber Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2011

n. Kegiatan Intensifikasi Pekarangan

Pelaksanaan:

(1). Terselurnya bantuan media tanam untuk budidaya, (2). Terselurnya bantuan benih sayuran antara lain cabe rawit, cabe besar, tomat, terong, (3). terselurnya bantuan benih buah-buahan yaitu benih jambu biji merah, (4). Terselurnya bantuan peralatan budidaya antara lain rak vertikultur, polybag, ajir tanaman. Sehingga bisa tersedia media tanam untuk budidaya, eredia benih cabe rawit, cabe besar, tomat dan terong, ersedia benih jambu biji merah, Tersedia peralatan budidaya untuk pemanfaatan pekarangan rumah, terpenuhi kebutuhan sehari-hari sayuran keluarga, meningkatnya pendapatan keluarga dari pemanfaatan pekarangan rumah, mendukung program pemerintah yakni *green city*

o. Kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi dan Jagung

Pelaksanaan:

(1). Petani menerima teknologi SLPTT, (2). Terlaksananya Kegiatan SLPTT, (3). Peningkatan produksi padi dan jagung, (4). Peningkatan kemampuan petani, (5). Petani terampil dalam pengelolaan tanaman terpadu, (6). Terfasilitasinya Kegiatan Percepatan Produksi Beras Nasional. Sehingga bisa Meningkatkan Produktifitas dan Produksi beras dilokasi SLPTT, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dilokasi SLPTT.

p. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian

Pelaksanaan:

(1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Hand Traktor dan APPO), (2). Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk masyarakat berupa cangkul, lempak, doran cangkul, garpu, sabit dan asahan, hal ini dibuktikan dengan terdistribusikannya Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian ke gapoktan, terdistribusikannya sarana dan prasarana untuk masyarakat ke buruh tani se-Kota Batu.

Tabel 22 Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

NO.	URAIAN	VOLUME	KELOMPOK TANI PENERIMA	KET.
1.	Traktor Tangan	2 Unit	1. Gapoktan “SUMBER BUMI MAKMUR” Ketua : Kartomo Alamat : Jl. Purwantoro Dusun Krajan Desa Tlekung Kec. Junrejo 2. Gapoktan “TUNGGAK SEMI” Ketua : Abdul Majid Alamat : Jl. Wukir No. 79 Kelurahan Temas Kec. Batu	
2.	APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik)	2 Unit	1. Gapoktan “RUKUN MAKMUR” Ketua : Sujito Alamat : Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo 2. Gapoktan “TORONG MAKMUR” Ketua : Suteja Alamat : Dusun Krajan Desa Torongrejo Kec. Junrejo	

Sumber Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2011

q. Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat

Pelaksanaan:

(1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Hand Traktor dan APPO), (2). Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk masyarakat berupa cangkul, lempak, doran cangkul ,garpu, sabit dan asahan. Hal ini dibuktikan dengan terdistribusikannya Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian ke gapoktan, terdistribusikannya sarana dan prasarana untuk masyarakat ke buruh tani se-Kota Batu.

Tabel 23 Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat

NO	URAIAN	JENIS ALAT	VOLUME	LOKASI	KET.
1.	Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat	1.Cangkul 2.Doran Cangkul 3.Garpu 4.Lempak 5.Sabit 6.Asahan	225 buah 225 buah 225 buah 225 buah 225 buah	Kecamatan Junrejo 1. Kel. Dadaprejo 2. Desa Pendem 3. Desa Mojorejo 4. Desa Tlekung 5. Desa Torongrejo Kecamatan Batu 1. Desa Sumberejo 2. Kel. Temas Kecamatan Bumiaji 1. Desa Punten 2. Desa Gunungsari	

Sumber Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2011

r. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan:

(1). Terlaksananya pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian ke-39 di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur-Surabaya pada tanggal 29 s/d 30 Juli 2011. Pameran ini mengangkat produk olahan lokal khas Kota Batu seperti kripik kentang, kripik buah, sari buah, jenang buah serta ladu sebagai bahan percontohan untuk promosi (2). Terlaksananya Pameran Investasi Daerah (Invesda) di Jogja Expo Center (JEC)-Yogyakarta pada tanggal 11 s/d 16 Oktober 2011. Produk yang ditampilkan dalam pameran ini tetap sama seperti yang ditampilkan pada Pameran HKP ke-39 di Surabaya, yang membedakan adalah skala Pameran Invesda Yogyakarta adalah skala nasional sedangkan skala pameran sebelumnya regional Jawa Timur, (3). Terlaksananya pameran dalam rangka Pekan Flora dan Flori Nasional (PF2N) di Pantai Matahari Terbit Sanur Bali pada tanggal 17 s/d 22 November 2011. Produk utama yang ditampilkan dalam PF2N kali ini adalah bunga potong mawar dan krisan serta dekorasi yang didominasi bonsai. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan petani perseorangan maupun yang tergabung dalam kelompok tani dan gapoktan penghasil produk pertanian unggulan khas Kota Batu, baik produk segar maupun olahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

s. **Kegiatan Fasilitas Kerjasama Regional/ Nasional/ Internasional**
Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

Pelaksanaan:

Tersedianya sarana promosi, pemasaran dan penjualan hasil produksi pertanian/perkebunan bagi kelompok tani/ Gapoktan berupa stand/lapak/ sub grosir di Pasar Induk Puspa Agro Sidoarjo. Sehingga bisa Meningkatkan pendapatan Kelompok Tani/Gapoktan pengisi stand/lapak di Pasar Induk Puspa Agro Sidoarjo yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan keluarga petani anggota Kelompok Tani/Gapoktan tersebut (Laporan Tahunan Dinas Pertanian. 2011. Bab V, Hal 47-80).

6. Tahun 2012

Sedangkan di tahun 2012 ini terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Perhutanan dalam rangka mengembangkan Agropolitan, diantaranya:

a. **Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri**

Pelaksanaan:

Telah dilaksanakannya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan produksi pertanian, pembangunan jaringan irigasi tingkat desa dan pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu produk pertanian, pembangunan jalan usahatani baru dapat meningkatkan

kapasitas dan merehabilitasi jalan usaha tani, mempercepat transportasi sarana produksi dan alat mesin pertanian dari kawasan pemukiman (dusun dan desa) ke lahan usaha tani, mempercepat pengangkutan produk pertanian dari lahan usaha tani menuju sentra pengolahan dan pemasaran, mengurangi kehilangan air irigasi pada saat musim kemarau, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Batu.

b. Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik

Pelaksanaan:

Telah dilaksanakan pembangunan Rumah Kompos di Kelurahan Dadaprejo, telah disalurkan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Produk Hortikultura kepada Kelompok Tani di Kelurahan Ngaglik, Desa Sidomulyo dan Desa Bumiaji, yang mana itu bisa berguna untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu produk pertanian terutama pertanian organik, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dengan jalan beralih ke pertanaman organik di Kota Batu, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keahlian Petani/Kelompok Tani dan Pengelolaan Budidaya Tanaman.

c. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Pelaksanaan:

Telah dilakukan penyaluran bantuan alat-alat laboratorium pertanian kepada kelompok tani penerima bantuan yang bisa meningkatkan

produksi dan produktivitas serta mutu produk pertanian terutama bibit unggul pertanian/perkebunan, memiliki cadangan bibit dan meningkatkan kualitas bibit, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keahlian Petani/Kelompok Tani dalam menghasilkan bibit unggul pertanian/perkebunan.

d. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Pelaksanaan:

Telah dilakukannya pengadaan bibit bawang merah, bibit strawberry dan bibit angrek, pengadaan pupuk organik, perencanaan, pengadaan dan pengawasan gudang bibit, yang bisa meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu produk pertanian, membangun gudang bibit baru dan meningkatkan kapasitas penyimpanan bibit, memiliki cadangan bibit dan meningkatkan kualitas bibit, merevitalisasi kondisi tanaman apel, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Batu.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen

Pelaksanaan:

Telah dilakukannya pembangunan Gudang Serbaguna di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, pembangunan Gudang Serbaguna di Desa Sumberejo Kecamatan Batu, pembangunan Gudang Serbaguna di Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo, yang bisa bermanfaat untuk penanganan pasca panen dan penyimpanan produk hasil pertanian,

untuk membuat hasil produk pertanian lebih bermutu dan punya daya saing di pasaran, mempertahankan kesegaran (sifat fisiologis) produk hasil pertanian, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Batu.

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan:

Telah disusunnya Lakip, Renja, Laporan Tahunan, Koordinasi Monev sehingga Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

g. Pengumpulan, Pengolahan Data Statistik dan Aktualisasi Data Base Pertanian.

Pelaksanaan:

Terupdatenya lahan baku sawah di 24 (dua puluh empat) desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan di Kota Batu, Terkumpulnya data statistik pertanian untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura, hal ini bisa membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan program.

h. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan:

Telah dilaksanakannya sosialisasi gerakan pengendalian OPT di empat desa, terlaksananya gerakan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) yang bisa meningkatkan pengetahuan Petani tentang

pentingnya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara Terpadu dan berwawasan lingkungan, memenuhi kebutuhan petani untuk pengendalian serangan OPT, mengendalikan serangan OPT Utama tanaman pangan dan Hortikultura, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kota Batu.

j. Kegiatan Pengembangan Kualitas dan Mutu Produk Melalui Sistem GAP (Good Agriculture Practices)

Pelaksanaan:

Telah dilaksanakannya Sekolah Lapang GAP Krisan, Sekolah Lapang GAP Anggrek, Pemberian Bantuan Bibit Krisan dan Anggrek, Agar petani mempunyai pedoman dalam melakukan usaha budidaya anggrek dan krisan secara baik dan benar serta bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas dalam menerapkan cara budidaya yang baik dan benar (Good Agriculture Practices), mengenal dan menggali teknologi spesifik lokasi yang memenuhi standar GAP dan berbasis input lokal

k. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna

1. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian

Pelaksanaan:

Telah didistribusikannya Hand tractor, APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik), Chopper, yang bisa memfasilitasi petani dalam

rangka berbudidaya dan pemanfaatan sumberdaya pertanian dan meningkatkan taraf hidup petani sehingga kesejahteraannya juga meningkat

Tabel 24 Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

NO	URAIAN	VOLUME	KELOMPOK TANI/ GAPOKTANPENERIMA
1.	Traktor Tangan	3 Unit	1. Gapoktan “SRI MULYO PENDEM” Ketua : Sopi’i Alamat : Jl. Welirang No. 19 RT. 07 RW.02 Desa Pendem Kec. Junrejo 2. Kelompok Tani “TLOGO TOWO” Ketua : Waris Alamat : Dusun Pandan Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji 3. Gapoktan “BAGUS” Ketua : Edi Wawono, S.Pd Alamat : Jl. Hasanudin RT. 02 RW.06 Dusun Jeding Desa Junrejo Kec. Junrejo
2.	APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik)	3 Unit	3. Gapoktan “MERTA JAYA SARI” Ketua : Lastari Alamat : Jl. Raya Sumbergondo No. 62 Desa Sumbergondo 4. Kelompok Tani “ROJO KOYO” Ketua : Henry Wibowo, ST Alamat : Jl. Trunojoyo I gg. Kemuning No. 18 Kelurahan

			<p>Songgokerto Kecamatan Batu</p> <p>5. Gapoktan “MITRA SEJATI” Ketua : Sulih H. S. Alamat : Jl. Sawahan Dusun Ngujung Desa Pandanrejo</p>
3	CHOPPER	4 Unit	<p>1. Gapoktan “SUMBER URIP” Ketua : Ghofur S. Alamat : Jl. Arjuna 5 Desa Giripurno</p> <p>2. Gapoktan “BEJI MAKMUR” Ketua : Eka Wijayanto Alamat : Jl. Raya Beji No. 73 Desa Beji Kecamatan Junrejo</p> <p>3. Gapoktan “RUKUN SANTOSO” Ketua : Sugito Alamat : Jl. TVRI RT. 01 RW. 03 Dusun Krajan Desa Oro-oro Ombo</p>

Sumber Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2012

2. Pengadaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Pelaksanaan:

Terdistribusikannya Cangkul, doran cangkul, garpu dan sabit, sehingga pemerintah bisa memfasilitasi sarana bercocok tanam untuk buruh tani, meningkatkan taraf hidup petani sehingga kesejahteraannya meningkat pula

Tabel 25 Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat

NO	URAIAN	JENIS ALAT	VOLUME	LOKASI
1.	Sarana dan Prasarana untuk Masyarakat	1.Cangkul 2.Doran Cangkul 3.Garpu 4.Sabit	150 buah 150 buah 150 buah 150 buah	Kecamatan Bumiaji • Desa Tulungrejo • Desa Sumbergondo • Desa Bulukerto • Desa Bumiaji • Desa Pandanrejo • Desa Giripurno

Sumber Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2012

1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pelaksanaan:

- (1). Terlaksananya Pameran The World Orchid Window Asia Africa Expo and Seminar di Gedung Bank Indonesia Jl. Braga – Bandung pada tanggal 8 s/d 13 Mei 2012. Pada pameran ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu bekerjasama dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa Angrek Kota Batu serta Perhimpunan Angrek Indonesia (PAI) Cabang Kota Batu mengambil tema pembibitan angrek sebagai bahan promosi,
- (2). Terlaksananya Pameran Indonesia Agribusiness Expo 2012 di Tunjungan Plaza-Surabaya pada tanggal 5 s/d 9 Juli 2012. Pada pameran ini Pemerintah Kota Batu yang diwakili Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu mengangkat potensi unggulan daerahnya yaitu produk segar dan produk olahan. Produk segar yang dipromosikan diantaranya aneka jenis sayuran organik serta buah

apel, jambu, stroberi dan jeruk keprok batu-55. Sedangkan produk olahan yang dipromosikan diantaranya sari apel, sari alang-alang, jenang apel, tonik apel, cuka apel, kripik buah, kripik kentang, abon lele, dan lain sebagainya. (3). Terlaksananya pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian ke-40 di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur-Surabaya pada tanggal 9 s/d 10 Juli 2012. Pameran ini bersifat regional dengan mengangkat produk segar dan olahan lokal khas Kota Batu sebagai bahan percontohan seperti yang dipromosikan pada Pameran Indonesia Agribusiness Expo 2012. Hal ini bisa ikut membantu meningkatkan pendapatan petani perseorangan maupun yang tergabung dalam kelompok tani dan gapoktan penghasil produk pertanian unggulan khas Kota Batu, baik produk segar maupun olahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

m. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Regional/ Nasional/ Internasional

Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer

Pelaksanaan:

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan stand/lapak/sub grosir di Pasar Induk Puspa Agro Sidoarjo, serta terpenuhinya fasilitas penunjang lain sebagai sarana pemasaran dan penjualan hasil produksi pertanian/perkebunan bagi kelompok tani/Gapoktan pengelola stand/lapak/sub grosir di Pasar Induk Puspa Agro Sidoarjo berupa pengadaan timbangan Digital, sehingga bisa memperkenalkan potensi hasil produksi pertanian Kota Batu di luar

daerah, memperluas jaringan pemasaran hasil produksi pertanian Kota Batu, memfasilitasi petani, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani/ Gapoktan untuk memasarkan hasil produksi pertanian/perkebunannya secara langsung ke luar daerah, meningkatkan pendapatan petani serta mendorong berkembangnya sistem pemasaran yang tepat yang menguntungkan bagi petani yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan keluarga petani di Kota Batu, monitoring dan evaluasi penggunaan lapak di Puspa Agro Sidoarjo.

n. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Produksi Hasil Pertanian

Pelaksanaan:

Terealisasikannya pembangunan 1 (satu) unit Green House sebagai sarana budidaya tanaman hias organik sehingga dapat menjadi percontohan budidaya tanaman hias di Kota Batu. Yang bisa memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas serta mutu hasil pertanian khususnya tanaman hias melalui penyediaan sarana/prasarana budidaya tanaman, membantu mempermudah proses percontohan budidaya tanaman hias secara organik di Kota Batu.

o. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan:

Telah dirancang Buku Hasil Kajian Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengembangan Kawasan Organik di Kota Batu, sehingga pengembangan kawasan organik bisa dikembangkan.

p. Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pelaksanaan:

Telah dilakukan Pemberian Hibah Kepada kelompok tani dari Dana dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang berupa antara lain Sapi PFH 10 ekor, Obat-obatan 1 paket, Pakan 1 paket dan Biogas 1 Paket, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani peternak dan memberdayakan masyarakat/kelompok tani (Laporan Kegiatan DISTANHUT, Tahun 2012, Bab V, Hal 1-36).

Berdasarkan penjelasan mengenai program-program pertanian guna mendukung kebijakan Agropolitan ini yang sudah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai 2012 tersebut, maka kegiatan tersebut masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan dengan berubah-ubahnya kegiatan yang awal mulanya Agropolitan menjadi Pertanian Organik. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan Kota Batu tahun 2013-2018 yaitu Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional yang ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang oleh Sumber daya (Alam, Manusia, dan Budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari sini dapat kita pahami bahwasannya kebijakan mengenai pertanian ini kurang menjadi perhatian dari pemerintahan Kota batu. Selain itu, dari pihak masyarakat yang tergabung kurang melakukan jemput bola terhadap peluang yang ada di pasar. Serta masyarakat sendiri masih kurang

memiliki kemauan dan pemahaman mengenai apa itu agropolitan, karena pola pikir masyarakat yang masih tradisional, tanpa mau memberikan ide-ide baru untuk masuk ke dalam masyarakat, masyarakat juga menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan itu adalah hal yang paling utama alias apa yang dikerjakan itu sudah mencukupi hidup maka itulah yang dinikmati, dan cenderung tidak mau maju untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

b. Keterlibatan dan Peran dari Masyarakat Petani Kota Batu terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Perpisahan Batu dari Kota Malang di tahun 2001 silam telah meningkatkan status administratif batu sebagai wilayah Perkotaan. Di tahun itu pulalah Kota Batu ditetapkan sebagai wilayah Agropolitan (pertanian) mandiri, karena kontur dan mata pencaharian masyarakatnya menjadi seorang petani. Oleh karena itu muncullah tiga produk hukum yang memayungi kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Pertama adalah pembentukan RT/RW Kota Batu 2003-2013, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut lebih ditekankan bagaimana fungsi dan peran Kota Batu yang semakin meningkat, khususnya dalam hal pertanian, serta mengenai pemanfaatan ruang pertanian di Kota Batu.

Produk hukum kedua adalah Perda nomor 7 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. Dalam perda ini dibahas mengenai pembagian struktur wilayah Kota Batu, seperti pembagian fungsi wilayah Pertanian Holtikultura, Perkebunan, Tanaman Hias, serta pembagian mengenai Desa Wisata di Kota batu. Dibentuknya produk hukum

ini sesuai dengan visi Kota Batu di masa itu, yang lebih menekankan Potensi Pertanian, dibalut keindahan desa di Kota Batu, salah satunya desa kungkuk. Hal ini cukup menarik wisatawan lokal maupun asing untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu.

Produk hukum yang ketiga adalah dibentuknya Masterplan Agropolitan Tahun 2012, dimana telah diatur tanggung jawab dari masing-masing dinas dan SKPD yang terkait untuk memajukan Agropolitan di Kota Batu. Salah satunya adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu, BAPPEDA disini bertindak sebagai Ketua 1 yang bertanggung jawab dalam hal pembentukan kebijakan dan arah suatu kebijakan tersebut, dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai *Leading Sector* dalam penterjemahan Kebijakan Agropolitan menuju program/kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan Agropolitan di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sariono, selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian:

“ya mas sejak peningkatan status administratif batu menjadi Kota Batu ini maka Batu sudah ditunjuk sebagai wilayah Agropolitan dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan yang bertindak selaku *Leading Sector* nya” (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013, pukul 13.30 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu)

Berdasarkan penjelasan diatas maka sebuah kebijakan tidak akan bergerak dan berjalan sebagaimana mestinya jika ketiga *Stakeholders* (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) tidak bersatu dan bekerjasama dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu sebuah kebijakan perlu *dishare* kan atau dikomunikasikan kepada semua *stakeholders* khususnya masyarakat. Oleh

karena itu komunikasi yang dilakukan untuk mengembangkan kebijakan Agropolitan dilakukan lebih dari 6 kali dalam kurun waktu 2 tahun, hal ini dibuktikan dengan rapat/koordinasi yang dilakukan di tahun 2007, rapat/koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Pertemuan ini dilakukan sebanyak 6 kali yang mana di setiap pertemuan dilibatkan para motivator-motivator dan fasilitator di Kota Batu. Selain itu pada hari senin, 21 mei 2007 di BPP kecamatan Junrejo dilakukan rapat/koordinasi dalam rangka persiapan pembentukan Gapoktan Padi dan Bawang Merah, dan pada tanggal 28 mei 2007 rapat dilakukan kembali di Bapak Kustomo, SH (Desa Bulukerto) dalam rangka persiapan pembentukan Gapoktan Apel.

Tahun 2008 sendiri telah dilakukannya rapat/koordinasi untuk lebih mengenalkan dan memantapkan Agropolitan di tataran masyarakat, yaitu pada tanggal 28 april 2008 dan 17 Juli 2008 dilakukannya rapat/koordinasi dan sosialisasi antara intansi terkait dengan kelompok tani se Kota batu. Serta adanya acara yang berisikan tentang penyerahan program PLA, PMUK Program agribisnis Hortikultura, dan Sosialisasi Agritech pada tanggal 7 Agustus 2008 di Desa Tulungrejo Bumiaji.

Hal ini dipertegas dengan penjelasan Bapak Sariono selaku kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian

“Untuk Agropolitan ini mas sudah diinteraksikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat petani di Kota Batu dengan pola komunikasi melalui *Hearing*, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan kedepannya dalam mengembangkan pertaniannya. Karena tidak mungkin mas jika kita membuat kebijakan dan ingin mengembangkan pertaniannya tanpa melihat kondisi *real* di lapangan, sehingga jika

kebijakan ini berjalan dengan baik maka pendapatan masyarakat meningkat dan *income* pemerintah juga mengalami peningkatan. Selain itu juga Kota Batu sebagai pusat Agropolitan sudah diterbitkan di website Agropolitan Jawa Timur. (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013, pukul 13.30 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Selain itu Bapak Tavib selaku Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Kota Batu juga menyatakan bahwa”

“Untuk Agropolitan ini sebenarnya sudah diinteraksikan dengan masyarakat petani di Kota Batu. Hal itu dilakukan dengan cara *Hearing*, sehingga jajak pendapat tersebut akan menjadi Musrenbang dan menjadi dasar penetapan dan pengembangan Kebijakan Agropolitan. Selain itu dari pihak pemerintah berkoordinasi dengan dinas pertanian dan kehutanan turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan, sehingga ketika kebijakan ini berjalan maka kedua belah pihak bisa mendapatkan timbal balik khususnya dalam segi ekonomi”. (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2013, pukul 09.00, di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa sebuah Kebijakan Agropolitan bisa berjalan dengan baik jika pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat petani di Kota Batu, walaupun tidak merata ke semua aspek/elemen masyarakat di Kota Batu. Di sisi lain dampak yang bisa diterima dari kedua belah pihak adalah peningkatan dari sisi ekonomi.

Peningkatan terhadap perekonomian tidak akan dirasakan jika ketiga *Stakeholders* tidak bekerjasama untuk merumuskan, menetapkan dan mengembangkan kebijakan khususnya Agropolitan. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *Good Governance*, maka masing-masing *Stakeholders* harus memiliki peran positif dalam rangka mendukung kebijakan Agropolitan ini, diantaranya: Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama

antara daerah sehingga investasi bisa berkembang. Swasta berperan penyedia lingkungan daerah yang kondusif sebagai tujuan investasi (industri, tenaga kerja, pemasaran, produksi) dan lain sebagainya yang berhubungan dengan modal. Ketiga adalah masyarakat sendiri, yaitu adanya peluang untuk melakukan usaha, dan memperoleh ruang negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan ketiga peran tersebut, maka bisa dipahami bahwa ketiga *stakeholders* memiliki peran yang berbeda-beda dalam sebuah kebijakan. Baik itu sebagai regulator (pemerintah), penyedia dana (swasta), serta pelaku/objek kebijakan (masyarakat). Hal ini juga diperkuat pendapat dari bapak Sariono, yang menyatakan bahwa:

“Peran dari ketiga pemegang kepentingan dalam kebijakan Agropolitan cukup banyak mas, untuk pemerintah sendiri memberikan pendanaan, bantuan seperti bantuan pupuk, alat pendukung pertanian, membantu pemasaran, membuka jalur/akses penjualan, seperti pembukaan lapak penjualan di Puspa Agro, sehingga masyarakat bisa memfungsikan lapak tersebut, serta juga melakukan pembinaan khususnya mengenai pertanian sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Kemudian dari masyarakat sendiri, adalah mereka membayar pajak kepada pemerintah, dan mau untuk lebih menggiatkan/lebih rajin lagi dalam kegiatan produksi pertanian karena mereka adalah objek dari kebijakan tersebut. Serta yang terakhir dari pihak swasta, disini swasta perannya masih belum terlihat mas, tapi salah satu swasta yaitu Jatimpark Foundation ini mau ikut mengembangkan wisata dan potensi pertanian di Kota Batu” (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013, pukul 13.30 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Berdasarkan penuturan dari bapak Sariono tersebut, hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tavip selaku sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, beliau mengungkapkan bahwa peran dari ketiga *Stakeholders* tersebut diantaranya:

“untuk peran ketiga *Stakeholders* ini ada beraneka ragam sesuai dengan fungsi mereka, diantaranya dari pemerintah berperan dalam hal ini memberikan alternatif-alternatif baru khususnya dalam pembentukan lumbung-lumbung penyimpanan sehingga harga pasar tentang komoditas tertentu bisa tetap stabil, lalu membentuk POKJA dan tentunya pemberian bantuan pertanian, serta pendirian terminal-terminal agribisnis, dari pihak masyarakat sendiri mereka berperan sebagai penggerak dan objek dalam kebijakan ini. Kemudian dari pihak swasta adalah pemberian bantuan modal dalam rangka untuk mengembangkan kebijakan tersebut, karena APBD juga cukup terbatas, tapi ini semua untuk menuju perkembangan pertanian menuju pertanian organik” (Wawancara pada tanggal 21 Oktober 2013, pukul 09.00, di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Dari wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa peran dari ketiga *stakeholders* adalah sebagai pembuat kebijakan, karena pihak pemerintahan Kota Batu membuat kebijakan agar peningkatan ekonomi, kesejahteraan hidup dari masyarakat di Kota Batu bisa terjadi. Kebijakan tersebut bisa dicetuskan jika dari masyarakat itu sendiri sudah menjalankan pertanian sejak dulu. Serta dari pihak swasta ini sebagai penyedia lingkungan kerja, dan berperan sebagai penyedia dana karena APBD dari pemerintahan Kota Batu cukup terbatas.

Kerjasama dari ketiga *Stakeholders* ini harus bisa dilaksanakan dengan baik, khususnya keterlibatan masyarakat menjadi hal yang paling penting agar sebuah kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kebijakan Agropolitan ini pihak masyarakat yang sering berpartisipasi dan ikut rembung/memberikan usulan kepada pemerintah Kota Batu adalah, pihak sesepuh desa, perwakilan Gapoktan khususnya ketua Gapoktan dan pihak sekretaris Gapoktan di masing-masing kecamatan di Kota Batu yang kemudian disebarluaskan ke seluruh masyarakat desa. Hal ini senada dengan

pernyataan Bapak Sariono selaku Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian BAPPEDA di Kota Batu. Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi disini tidak seluruhnya, cuman dipanggil perwakilan dari Gapoktan seperti ketua Gapoktan, Sekretaris Gapoktan, sesepuh desa, untuk mendukung dan mengembangkan Kebijakan Agropolitan agar berjalan sesuai dengan di lapangan. Setelah itu hasil dari rebug tersebut maka disebarluaskan ke seluruh masyarakat desa, seperti kesepakatan bersama dengan pemerintahan Kota Batu dan bantuan-bantuan yang diterima oleh Gapoktan” (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013, pukul 13.30 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Selain itu hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari wawancara yang telah dilakukan pada Bapak Tavip di tanggal 21 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa perwakilan Gapoktan ikut berpartisipasi dan kemudian disebarluaskan ke seluruh masyarakat di seluruh desa-desa di 3 Kecamatan se Kota Batu. Khususnya di desa Gunungsari dan Sidomulyo.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan ini dilakukan dengan cara melakukan rapat dan dialog-dialog terbuka yang dilakukan langsung di desa-desa baik di desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo atau di seluruh desa yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Batu. Rapat dan koordinasi ini dilakukan ketika ada laporan atau keluhan dari pihak masyarakat baik itu mengenai bantuan bibit, bantuan dana, tata cara penanaman dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat di beberapa desa tersebut. Hal tersebut dilaporkan kepada distanhut selaku *Leading Sector*, sehingga distanhut berkoordinasi dengan Bappeda dalam hal pemberian bantuan dan penyelesaian masalah-masalah di masyarakat petani di Kota Batu. Hal ini sependapat dengan pernyataan Bapak Sariono, yang menyatakan bahwa:

“sudah terjadi adanya dialog dalam rapat yang biasanya dilakukan oleh masing-masing desa yang kemudian dilaporkan ke distanhut dan diteruskan ke BAPPEDA sendiri, dan ketika merumuskan kebijakan Agropolitan ini pemerintah Kota Batu juga sudah memaparkan potensi yang bisa didapat baik itu dari sisi perekonomian di kedua belah pihak dan kesejahteraan hidup masyarakat” (Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2013, pukul 13.30 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu).

Bapak Tavip menambahkan ketika ada laporan dari masyarakat mengenai bantuan dan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian di Kota Batu maka hal tersebut menjadi agenda MUSRENBANG Kota Batu. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pihak pemerintahan Kota Batu melakukan pelatihan-pelatihan atau melakukan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat petani Kota Batu semakin paham mengenai pertanian khususnya Agropolitan di Kota Batu. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan tersebut maka diharapkan masyarakat petani di Kota Batu menjadi semakin tertarik dan mau bergotong royong untuk mengembangkan kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Pelatihan tersebut diantaranya di tahun 2007 adanya pelatihan pengolahan produksi lokal dan limbah tingkat Kota Batu di Balai Desa, Desa Sumberejo tanggal 4-5 April 2007. Adanya sosialisasi STA (Sub Terminal Agribisnis) pada tanggal 10 Desember Tahun 2007, serta pelatihan Operasional STA pada tanggal 11-13 Desember tahun 2007 di Punten. Pelatihan Pasca Panen Tanaman Hias di desa Sidomulyo pada tanggal 27-29 Desember Tahun 2007.

Tahun 2008 terdapat beberapa pelatihan diantaranya Pelatihan Terknologi Pertanian Terpadu yang diselenggarakan di Hotel Mentari pada tanggal 18 Desember Tahun 2008. Sedangkan di Tahun 2009 terdapat pelatihan Urbinan di dusun sekar putih, desa pendem. Adanya koordinasi dan

sosialisasi kegiatan pengembang agribisnis, pengelolaan lahan dan air, serta adanya temu lapang dengan petani untuk evaluasi. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang pertanian. Adanya penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan mengenai pertanian organik. Tahun 2009 juga ada pelatihan manajemen mutu dan keamanan pangan tanggal 7 Desember 2009, pelatihan mengenai pemasaran dan *Labelling* tanggal 8 Desember 2009, pelatihan kewirausahaan tanggal 9 Desember 2009 yang kesemuanya dilakukan di Hotel Aster.

Tahun 2010 juga ada pelatihan-pelatihan mengenai Agropolitan dan pertanian di Kota Batu, diantaranya pelatihan DAS hulu kawasan Hortikultura. Ada juga pelatihan mengenai peningkatan sumber daya khususnya mengenai GAP (*Good Agriculture Practises*) yang disertai dengan kunjungan lapangan. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi tepat guna, pelatihan tentang pengelolaan lahan yang konservatif kepada kelompok tani. Pelatihan kelompok tani melalui 2 paket sekolah lapang konservasi DAS Hulu Kawasan Perkebunan. Sedangkan di tahun 2011 ini lebih banyak kegiatan mengenai pengembangan pertanian menuju ke organik. Karena produk hortikultura dan produk pertanian lain di Kota Batu dilirik pasar. Sedangkan di tahun 2012 kegiatan sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan adalah mengenai pengendalian OPT di empat desa yaitu desa Bulukerto, Sumbergondo, Tulungrejo dan desa pendem. Adanya Sekolah Lapang mengenai *Good Agriculture Practises* (GAP) tentang tanaman krisan dan anggrek.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, dimulai dari tahun 2007-2012 tersebut, ada lebih dari 5 pelatihan yang dilakukan baik itu tata cara penanaman yang baik maupun pengembangan sumber daya manusia khususnya petani di Kota Batu. Serta sudah lebih dikembangkannya pemahaman masyarakat untuk menuju ke pertanian berbasis Organik.

2. Reaksi yang Ditimbulkan oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Sebuah Kebijakan khususnya Kebijakan Agropolitan di Kota Batu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerjasama diantara ketiga *Stakeholders*. Peran masing-masing pihak baik itu sebagai regulator, penyedia dana, dan sebagai penggerak/objek kebijakan harus disatukan, sehingga kebijakan tersebut bisa berkembang dan saling menguntungkan bagi ketiga pihak. Khususnya bagi masyarakat sendiri yang dalam hal ini berperan sebagai penggerak kebijakan.

Peran masyarakat dalam sebuah kebijakan memang sangatlah penting, hal ini dikarenakan masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai pertanian, dan mampu untuk mengembangkan pertaniannya sesuai dengan apa sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu dalam kebijakannya. Selain beberapa hal tersebut masyarakat juga harus memiliki beberapa syarat kondisi, dan syarat perlengkapan yang harus disediakan dan dipenuhi oleh pemerintah Kota Batu. Dengan ketiga hal tersebut maka pemahaman yang dimiliki antara

masyarakat dan pemerintah Kota Batu bisa berjalan secara bersinambung, sehingga masyarakat bisa menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa sebuah pemahaman dan alat pendukung dalam mengembangkan sebuah kebijakan sangatlah penting. Akan tetapi dalam kondisi nyata di lapangan pemahaman masyarakat mengenai Agropolitan kurang merata hanya sebagian masyarakat yang memahaminya, dan juga tidak sedikit yang tidak memahami atau hanya sebatas mengetahui apa itu Agropolitan. Serta dari perlengkapan/peralatan yang tersedia di masing-masing desa masih konvensional tidak semodern menuju Agropolitan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Pak Sayadi Wibowo yang merupakan ketua dari GAPOKTAN Gunungsari Makmur, yang menyatakan bahwa:

“Kalau Agropolitan ya sudah mendengar mas, yang berhubungan dengan hal-hal pertanian khususnya pertanian dalam pertanian dalam perkotaan yang sekarang sudah berkembang menuju pertanian organik. Sedangkan untuk peralatan yang digunakan masih tradisional, cangkuk, selang pengairan, dan pompa diesel air” (Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB di Kediaman Bapak Sayadi Wibowo).

Dari penjelasan bapak Sayadi Wibowo bisa dipahami bahwa masyarakat petani di Kota Batu khususnya di Gunungsari tidak banyak yang mengetahui apa itu kebijakan Agropolitan serta kurang aktif dan kurang kritis mengenai kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Batu. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat di desa gunungsari yang hanya mencari penghasilan melalui pertanian dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa memikirkan bagaimana kebijakan tersebut ada. Hal ini sesuai

dengan penuturan Ibu Inayah dan Ibu Nisa selaku anggota GAPOKTAN Gunungsari Makmur, yang sama-sama menyatakan bahwa dengan adanya Agropolitan ini sudah bisa meningkatkan pendapatan petani walaupun tidak banyak dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Serta untuk peralatannya juga masih menggunakan cangkul, bibit, mesin diesel untuk siram air 2 minggu sekali, gunting, mesin compress. Selain itu hal tersebut senada dengan pendapat dari Bapak Mustakim selaku masyarakat petani di Sidomulyo yang menyatakan bahwa:

“pernah mendengar mas mengenai hal tersebut, tapi gak paham, kalau sebagian besar petani tidak ada yang paham mengenai hal tersebut, pokoknya rutinitas berangkat pagi pulang sore demi mencukupi kebutuhan anak istri. Untuk alatnya ya masih menggunakan cangkul, air, gunting dan lain sebagainya. Tapi sekarang perkembangan menuju pertanian organik mas, sedikit banyak paham tapi belum melaksanakan kesana”. (Wawancara pada tanggal 02 November 2013 pukul 14.00 WIB di Kediaman bapak Nyamani).

Berdasarkan penuturan dari keempat narasumber tersebut, maka bisa dipahami bahwa pola pemikiran masyarakat petani baik itu di Gunungsari, Sidomulyo dan masyarakat petani di Kota Batu masih tradisional. Para petani kurang begitu memahami apa itu Agropolitan dan tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran terbaru mengenai pertanian. Mereka hanya paham mengenai konsep pagi berangkat kerja, sore pulang, jika ada pesanan dari luar daerah maka baru kerja untuk memenuhi pesanan tersebut. Jika dilihat dari peralatan yang digunakan maka alat tersebut masih tradisional masih belum modern. Akan tetapi bukan keseluruhan masyarakat petani seperti itu, ada beberapa masyarakat petani yang paham dan mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan

sebagai *Leading Sector* dalam mendukung kebijakan Agropolitan di Kota Batu, salah satunya penuturan dari Mbak Ainun salah satu anggota kelompok tani di Sidomulyo, yang mengatakan bahwa:

“Untuk kebijakan Agropolitan ini sudah saya dengar mas, hal tersebut berisi tentang pembentukan Kota Tani di Kota Batu ini. Akan tetapi untuk perkembangannya Agropolitan sudah menuju pertanian organik mas, sudah berjalan 1,5 tahun ini, dan perkembangan ini cukup mengalami kendala mas untuk para petani, yaitu bunganya tidak awet gampang layu, jadi saya biasanya tak campur, 60:40 untuk kimia dan organiknya. Sedangkan perkembangannya ini ya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sudah memberikan bantuan bibit, *greenhouse* dan sudah dilakukan SL mas untuk *Good Agriculture Practises*, dan rencananya pihak sini mau mengajukan bantuan alat *Packing House* untuk pertanian di Bapak Subandri” (Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2013, pukul 15.30 WIB, di tempat pengepulan bapak Subandri).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nuryono selaku Ketua Kelompok Tani Krisan di Sidomulyo, beliau menyatakan bahwa:

“Kebijakan Agropolitan ini sudah sering mendengar mas dan memang sering sekali didengung-dengungkan/dipopulerkan sebagai Kota Agropolitan/kota yang berbasis pertanian. Sedangkan untuk perkembangan menuju organik ini sudah berjalan tapi masih belum berani menerapkan karena petani takut rugi mas, makanya pemerintah di sini mulai memberikan contoh dengan menanam krisan secara organik kita lihat jika berhasil insya ALLAH petani akan ngikut dengan sendirinya. Sedangkan perkembangannya ini Dinas Pertanian dan Kehutanan sudah memberikan bantuan mas, diantaranya bantuan pipanisasi, maksudnya air limbah dan air irigasi bisa dipisah dengan adanya pipanisasi ini agar bisa lebih efisien. Terus juga ada PPL dan SL dari pihak pemerintah, untuk swastanya ya hanya memberikan percontohan saja mas tapi untuk dana tidak mas” (Wawancara dilakukan pada tanggal 02 November 2013, pukul 12.30 WIB, di Gazebo sawah milik Bapak Nuryono).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa ada sebagian masyarakat yang memahami apa itu Agropolitan di Kota Batu sehingga dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat bisa lebih mengetahui

instruksi yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan. Bahkan beberapa masyarakat tersebut mengetahui bantuan-bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu ke masyarakat Petani, baik itu berupa alat-alat pendukung untuk pembentukan Kota Batu sebagai Kota Agropolitan, walaupun tidak semua kelompok tani merasakan bantuan tersebut, karena umumnya bantuan pemerintah ditampung dalam GAPOKTAN yang kemudian disebarluaskan atau diambil oleh petani yang bersangkutan untuk kebutuhan pertaniannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka sebuah kebijakan bisa dikatakan berjalan dengan baik, jika ada partisipasi dari masyarakat di daerah tersebut. Khususnya di Kota Batu tingkat partisipasi masyarakat petani untuk mendukung Kebijakan Agropolitan cukup rendah, karena sebagian masyarakatnya menyerahkan segala pengurusan pemerintahan hanya kepada ketua dan perangkat lainnya dalam Gapoktan tersebut, serta melakukan rapat penting jika ada sesuatu hal yang mendesak. Hal senada juga diungkapkan oleh Mbak Inayah selaku petani di Gunungsari yang menyatakan bahwa:

“kalau untuk partisipasi dalam kepengurusan pemerintahan ya saya tidak ikut mas, tapi kalau rapat ya ikut saja mas. Itupun rapat yang dilakukan hanya sangat-sangat mendesak, jika tidak mendesak ya tidak ada rapat mas, lebih sering arisan mas membicarakan info-info pasar, harga bunga dan lain sebagainya yang bisa mendukung pertanian kita. Sedangkan informasi yang didapat dari rapat kepengurusan dengan pemerintah Kota Batu sangat jarang diinformasikan mas kepada masyarakat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2013, pukul 09.00 WIB di Kediaman mbak Inayah).

Berbeda dari pendapat diatas, Bapak Nuryono selaku kepala/ketua kelompok tani Krisan Sidomulyo, sering mengikuti rapat kepengurusan dengan pemerintah Kota Batu dan juga memberikan saran terhadap pemerintah, serta juga menginformasikan apa yang didapat dari rapat tersebut ke sesama petani lainnya, yang menyatakan bahwa:

“sering mas diajak sama dinas-dinas untuk mengikuti studi banding, penyuluhan-penyuluhan, begitupun dengan GAPOKTAN mas yang sudah juga memberikan informasi ke kelompok tani krisan saya mas. Nah ketika melakukan rapat dengan pihak pemerintahan, saya mewakili kelompok tani saya melakukan *Sharing* bersama untuk pelaksanaan kebijakan Agropolitan yang sekarang sudah berkembang ke *Go Organic*, baik itu memberikan saran, pendapat dengan mendatangkan narasumber-narasumber untuk membuat pupuk organik, kemudian cara pemakaiannya pada tanaman, bagaimana tujuan dari organik ini. Salah satu saran yang saya katakan ke pihak pemerintah adalah agar pemkot turun tangan untuk mencontohkan bagaimana penggunaan dan cara penanaman secara organik, bukan hanya menyuruh-nyuruh saja. Karena boleh dibilang *mindset* masyarakat petani Kota Batu cukup sulit untuk dirubah” (Wawancara dilakukan pada tanggal 02 November 2013, pukul 12.30 WIB, di Gazebo sawah milik Pak Nuryono).

Dari penuturan dua responden diatas maka bisa dipahami bahwa para masyarakat tani yang tidak memiliki jabatan alias anggota hanya menyerahkan semuanya rapat ke pemerintahan ke pihak ketua dan struktur penting dalam Gapoktan dan kelompok tani tersebut yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat petani di daerahnya walaupun belum terlaksana sepenuhnya. Berbeda dengan ketua atau yang memiliki jabatan penting dalam sebuah Kelompok Tani maka orang tersebut yang mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat petani di daerahnya. Selain itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di dalamnya pertama adalah pihak pemerintah kurang memperhatikan dan terjun langsung ke masyarakat

apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk mendukung pertanian mereka, hanya menunggu tanpa menjemput bola. Serta faktor peralatan yang kurang memadai dimana masyarakat sebagian besar bertani dengan menggunakan peralatan tradisional/konvensional.

Berdasarkan penjelasan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut, maka bisa dipahami lebih dalam bahwasannya dengan beberapa faktor diatas juga mempengaruhi apakah kebijakan tersebut ditolak atau tidak. dari beberapa penuturan responden mengenai reaksi tentang adanya Agropolitan beraneka ragam, ada yang menolak, dan mendukung. Diantaranya pendapat dari bapak Sayadi Wibowo yang menyatakan bahwa:

“kita tanggapi dengan baik karena memang itu juga membantu petani, jika perkembangan petani menuju organik maka akan sangat membantu petani khususnya dalam hal mengurangi residu tanah yang ditanama, dan yang pasti tetap melaksanakannya” (Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB di Kediaman Bapak Sayadi Wibowo).

Pendapat lain yang tidak sreg mengenai bantuan dan kebijakan Agropolitan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu. Diantaranya pendapat dari mas Arif salah satu petani di Sidomulyo, yang menyatakan bahwa:

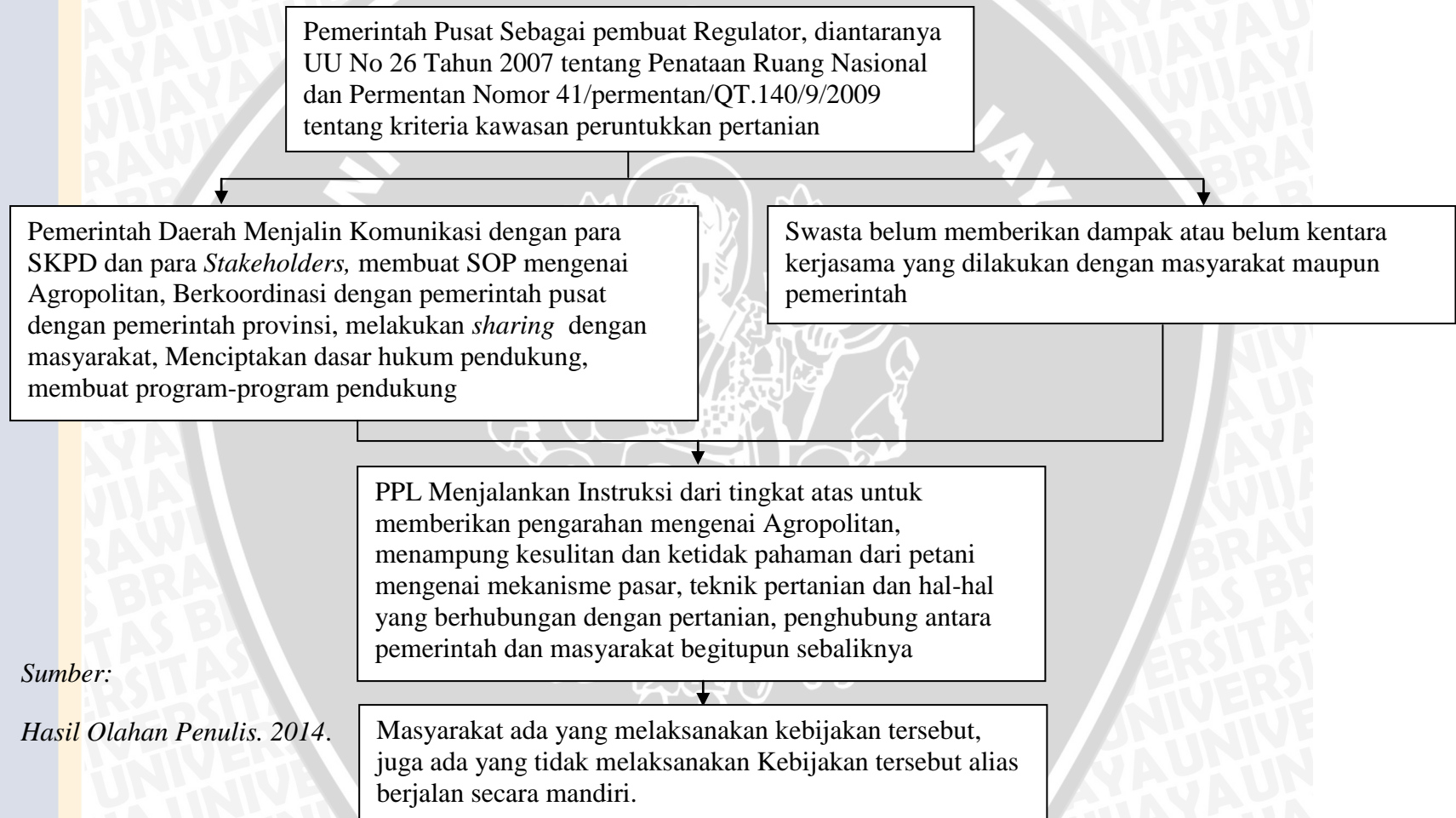
“melaksanakan tapi dengan catatan disesuaikan dengan kondisi petani yang ada, karena cuman disayangkan mas program yang biasanya ditelurkan oleh pemerintah dan dinas tidak tepat sasaran, misalnya bantuan *greenhouse* yang cukup melimpah, karena boleh dibilang masyarakat juga membuat *greenhouse* secara mandiri, nah takutnya *greenhouse* ini tidak terpakai sehingga mengakibatkan harga pasar bisa terpengaruh (Wawancara pada tanggal 02 November 2013, pukul 12.30 WIB di Kediaman mas Arif).

Dari penuturan kedua responden tersebut diatas bisa dipahami bahwa kebijakan Agropolitan bisa mendapat respon positif dan negatif. Itu bisa

dilihat kesesuaian kebijakan dan bantuan mengenai agropolitan tersebut dengan kondisi real di masyarakat, tidak *diawang-awang* saja.



3. Skema/Mapping Antara Perumusan dan Reaksi Masyarakat Petani di Kota Batu, Mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.



Sumber:

Hasil Olahan Penulis. 2014.

C. Analisis Data

1. Proses Perumusan Kebijakan Tentang Agropolitan di Kota Batu.

Kota Batu adalah salah satu kota yang terletak di Jawa Timur yang berbatasan/diapit langsung oleh dua pemerintahan Kota dan Kabupaten, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kota Batu adalah salah satu kota yang memiliki potensi pertanian dan wisata yang menjanjikan karena kontur Kota Batu dekat dengan pegunungan-pegunungan dan terletak di ketinggian di 680-1.200 meter di atas permukaan laut. Serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi yaitu 122,5 mm/bulan dan jumlah hari hujan tertinggi sebanyak 103 hari. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab IV. Sedangkan mengenai suhu di Kota Batu juga cukup dingin yaitu mencapai 15-19 derajat celsius.

Berbicara mengenai potensi, Kota Batu memiliki potensi perekonomian yang pesat. Hal ini didukung dari sektor pertaniannya, baik itu pertanian yang bergerak dalam Holtikultura, Buah-Buahan maupun Tanaman Hias. Diantaranya adalah:

Tabel 26 Produksi pertanian Kota Batu Tahun 2012

Jenis	Komoditas	Produksi (ton,Ku,pot,tangkai)
Hortikultura	Padi	6.815,50
	Jagung	3.909,90
	Kacang Tanah	44,88
	Ubi Kayu	2.253,63
	Ubi Jalar	2.196,96
Sayuran	Kentang	50.842
	Kubis	49.253
	Sawi	50.343
	Wortel	97.105
	Bawang Merah	35.521
	Bawang Putih	14.379
	Brokoli	85.497

	Tomat	67.943
	Cabe Besar	24.816
Hias	Mawar	188.810.496
	Krisan	23.805.290
	Anggrek	613.900
	Anthurium	658.990
	Anyelir	614.503
	Gerbera	194.211

Dengan tabel potensi tersebut maka Kota Batu ditetapkan sebagai salah satu Kota Agropolitan. Khusus di Kota Batu ini berjalan secara mandiri karena *culture*/budaya masyarakat yang sudah melakukan pertanian sebelum kebijakan Agropolitan ini digulirkan. Dalam perkembangannya sendiri kebijakan Agropolitan di Kota Batu memiliki dasar hukum, diantaranya adalah dibentuknya RT/RW tahun 2003 Kota Batu yang berfungsi untuk menguatkan peran dan fungsi dari Kota Batu khususnya dalam bidang pertanian. Kemudian kebijakan berikutnya dibentuk dan ditetapkannya perda Nomor 7 Tahun 2011 yang berisi tentang RT/RW Kota Batu tahun 2010-2030 yang lebih kompleks mengatur peruntukkan wilayah-wilayah di Kota Batu, baik itu wilayah tentang pertanian, peternakan dan perkebunan. Sehingga sebagai tindak lanjut perumusan dan penetapan Kota Batu sebagai Agropolitan maka muncullah pembentukan tim Kelompok Kerja (Pokja) Agropolitan di Kota Batu, yang awal mulanya kebijakan ini berubah dari Surat Keputusan Wali Kota Batu Nomor 180/59/KEP/422.01.23/2007 menjadi Surat Keputusan baru yang berisikan tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu Tahun Anggaran 2012. Dalam SK terbaru tersebut berisikan tentang susunan

keanggotaan kelompok kerja pengembangan kawasan Agropolitan di Kota Batu Tahun Anggaran 2012.

Kebijakan Agropolitan di Kota Batu ini juga didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan

1. pembangunan lumbung/gudang penyimpanan 2 unit dengan luas bangunan 40 m persegi di desa pendem dan mojorejo.
2. Pembangunan kantor kebun di Kebun Dinas pertanian, Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.
3. Pembangunan Screen House di Tahun 2007 sebanyak 2 unit di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo dan di Desa Gunungsari.
4. Pembangunan irigasi masing-masing 1 unit di desa Oro-Oro Ombo dan 2 unit di Desa Tlekung tahun 2007.
5. Bantuan bibit baik itu untuk Hortikultura, Sayur Mayur, Padi Palawija dan Tanaman Hias.
6. Pengadaan BPP di Kelurahan Sisir dan pengadaan 1 unit sepeda motor di tahun 2008.
7. Pembangunan lantai jemur di Dusun Pendem dan Dusun Mojorejo, Desa Pendem tahun 2008.
8. Pemberian bantuan sarana dan prasarana berupa bibit dan alat-alat pendukung pertanian seperti *Hand Tractor*, *Hand Sprayer* dan lain sebagainya di tahun 2008.
9. Pembangunan Lumbung Pangan di Desa Gunungsari di Tahun 2009.

10. Pembangunan jaringan irigasi pertanian, rumah kompos, saung tani, irigasi pada pipa dan lumbung pangan di Kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo Tahun 2009.
11. Pembangunan Kios di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu dan Pengadaan alat Klimatologi di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo di Tahun 2010.
12. Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Pandan, Desa Pandarejo Kecamatan Bumiaji, serta pembangunan Jalan Produksi di Desa Krajan, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu di tahun 2010.
13. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa di Dusun Gangsiran Desa Tlekung Kec. Junrejo, Pembangunan Jaringan Irigasi PIPANISASI di Dusun Krajan (Paket I) Desa Sumberbrantas Kec. Bumiaji di tahun 2010.
14. Dibangunnya jalur irigasi yang tersebar di beberapa desa seperti di desa sumberejo, Junrejo dan daerah lainnya di tahun 2011, dibangun *Screen House* di daerah Sidomulyo.
15. Pengadaan peralatan bantuan pertanian di beberapa kelompok tani yang ada di Kota Batu, tahun 2011.
16. Tahun 2012 pemerintah Kota Batu melakukan realisasi mengenai perbaikan dan penyaluran bantuan-bantuan pertanian ke 3 kecamatan di Kota Batu.

Dari ke 16 pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan Agropolitan. Maka Kota Batu mendapatkan sumber dana/modal dari yaitu dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana tersebut

bisa terlaksana dengan baik, walaupun hasil temuan di lapangan terdapat beberapa desa yang masih kurang tersentuh bantuan seperti desa gunungsari.

Berbicara mengenai sebuah Kebijakan maka perlu ada sebuah kerjasama yang dilakukan baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menjalankan kebijakan tersebut, salah satunya mengenai Agropolitan. Peran dari masing-masing aktor tersebut adalah, pemerintah bertindak sebagai regulator kebijakan, masyarakat sebagai objek kebijakan dan swasta sebagai penyokong dana untuk keberlangsungan kebijakan Agropolitan tersebut. Hasil temuan di lapangan bahwa peran dari ketiga *stakeholders* kurang maksimal. Dari pemerintah sendiri kebijakan mengenai Agropolitan kurang terfokus, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dibentuk untuk mendukung kebijakan tersebut yang tidak sesuai dengan konsep Kota Pertanian. Kemudian dari sisi masyarakat, sebagian besar kurang memahami mengenai apa itu Agropolitan di Kota Batu. Sedangkan dari pihak swasta kurang memberikan bantuan dana untuk mengembangkan kebijakan Agropolitan, hanya terbatas pada dana DAU, DAK dalam APBD.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dan hasil temuan di lapangan, maka bisa dianalisa sesuai dengan teori perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Emritai Etzioni dalam Parson Tahun 2008, dimana model perumusan kebijakan ini menekankan pada 2 sudut pandang (*Mixed Scanning*), yaitu sudut pandang kebijakan tersebut berjalan secara keseluruhan (*Wide Angle*) dan sudut pandang kebijakan ketika kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya (*Zoom Angle*). Dalam hal ini peneliti telah

memaparkan kebijakan Agropolitan secara keseluruhan selama periode 5 tahun (2007-2012), bagaimana kebijakan ini berjalan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan selama periode 5 tahun tersebut. Namun dari pemaparan kegiatan-kegiatan tersebut, banyak yang tidak berjalan dengan baik atau kurang sesuai dengan Agropolitan. Sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam dengan menggunakan sudut pandang kedua (*Zoom Angle*).

Tahun 2007 terdapat 19 kegiatan atau program-program yang dirancang untuk mendukung Kebijakan Agropolitan. Dari beberapa kegiatan tersebut ada 3 kegiatan yang sesuai dengan Kebijakan Agropolitan, diantaranya: Pelatihan pasca panen produk pertanian dan pengoperasian Sub Terminal Agribisnis (STA), dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan merubah sikap petugas dan petani dalam penanganan pasca panen dan pemasaran produksi hasil pertanian sehingga terbentuk sumber daya masyarakat yang handal serta mampu menciptakan terobosan-terobosan di bidang agribisnis dan ketahanan pangan.

Kegiatan kedua adalah penyuluhan dan pendampingan pertanian, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan merubah sikap petugas dan petani sehingga terbentuk SDM yang handal serta mampu menciptakan terobosan-terobosan dibidang agrobisnis dan ketahanan pangan. Kegiatan ketiga adalah pengembangan usaha tani komoditas bernilai tinggi/pengutuhan sentra komoditas unggulan bernilai tinggi dengan 2 sub bidang kegiatan yaitu pengembangan sentra agribisnis Tanaman Hias (mawar potong)/apel/sayur ramah lingkungan yang bertujuan untuk bertujuan untuk

Memperkuat modal petani dalam rangka pengembangan usaha agribisnis hortikultura, meningkatkan produksi dan produktivitas usaha agribisnis, merangsang berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis di Kota Batu, mengembangkan rekayasa teknologi tepat guna, meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok, mengembangkan kelembagaan ekonomi di pedesaan. Serta, pengembangan investasi terpadu hortikultura (FATIH) yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelaku usaha agribisnis hortikultura ke arah berkembangnya suatu kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, mendorong Investasi di bidang Agribisnis Hortikultura, meningkatkan SDM petani di wilayah Kota Batu, meningkatkan pelayanan hortikultura (agroklinik) kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan ketiga kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2007, dan pemaparan tujuannya maka bisa dipahami bahwa ketiga kegiatan tersebut mendukung adanya Aropolitan, khususnya mengenai tingkat pemahaman masyarakat dan tingkat perekonomian masyarakat. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka yang dimaksud dengan kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis. Berdasarkan konsep tersebut maka 3 kegiatan sudah sesuai dengan sasaran sehingga ke tiga kegiatan itu difokuskan untuk pengembangan Agrobisnis. Sedangkan ke 13 kegiatan yang ada kurang terfokus untuk

mendukung adanya sebuah agropolitan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kegiatan yang dirancang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana baik itu berupa jalan, lumbung penyimpanan, dan jalur irigasi, serta pemberian bantuan alat tanpa memperhatikan kesiapan masyarakat di 3 kecamatan tersebut.

Hal tersebut cukup mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena kebijakan yang dirumuskan hanya berjalan satu arah yaitu *Top-Down* atau dari pemerintah ke masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang tidak tinggi karena sebagian masyarakat memiliki jenjang pendidikan SD bahkan TK, dan hanya beberapa orang yang memiliki jenjang pendidikan sampai S1. Sehingga tingkat pemahaman masyarakat mengenai Agropolitan dan dampak yang bisa didapat ketika menjalankan kebijakan ini,

Tahun berikutnya di tahun 2008 terdapat beberapa kegiatan yang sesuai dengan Kebijakan Agropolitan diantaranya. Pertama adalah kegiatan pengembangan fasilitas pelayanan terpadu Agroindustri terpadu, yang dimaksudkan agar para penyuluh mampu mempertemukan seluruh pelaku usaha agribisnis hortikultura ke arah berkembangnya suatu kerjasama dan kesepakatan dagang yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Kedua kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan yang ditujukan agar para penyuluh mampu mendorong peningkatan kemampuan penyuluh sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di Indonesia khususnya Kota Batu, mengembangkan pendekatan model penyuluhan

pertanian partisipatif, meningkatkan kualitas ketenagaan penyuluhan pertanian serta alih informasi dalam rangka pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTB PP).

Ketiga adalah kegiatan mengenai penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis. Kegiatan ketiga ini tetap menitikberatkan pada penyuluh agar para penyuluh lancar dalam administrasi dan koordinasi serta pelatihan petani pelaku agribisnis. Serta lancar dalam memberikan penyuluhan dan pemberian motivasi kepada kelompok tani dan pelaku agribisnis agar selain peningkatan pendapatan diharapkan juga mampu menjaga kelestarian lingkungan baik areal DAS hulu untuk komoditi hortikultura maupun perkebunan. Keempat adalah kegiatan penguatan kelembagaan pembenihan dalam mendukung pengembangan agribisnis. Di kegiatan keempat ini sasarannya adalah kelompok tani penangkar benih tanaman hias dan tanaman apel yang ditujukan untuk memperkuat dan memberdayakan kelembagaan perbenihan yang ada dalam menghasilkan benih bermutu, dengan kegiatan ini diharapkan fungsi dan peran kelembagaan perbenihan dalam menyediakan bermutu semakin meningkat sehingga ketergantungan akan benih impor dan penggunaan benih asalan dapat dikurangi, memperkuat modal petani, meningkatkan produksi dan produktivitas kelompok tani, mengembangkan usaha agribisnis dalam kelompok tani, merangsang berkembangnya lembaga keuangan mikro di tingkat desa, meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.

Kelima adalah kegiatan tentang kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3 dengan sasarannya adalah kelompok tani apel dan tanaman hias di Kota Batu. Di kegiatan kelima ini menarik karena pemerintah Kota Batu mencoba untuk merangsang untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelompok tani, mengembangkan usaha agribisnis dalam kelompok tani, merangsang berkembangnya lembaga keuangan mikro di tingkat desa serta meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok. Sehingga para petani memiliki modal dasar yang kuat untuk mengembangkan pertaniannya. Keenam adalah kegiatan penyediaan dan perbaikan infratraktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis, dengan sasarannya adalah kelompok tani yang memiliki lokasi lahan di sekitar DAS hulu dan memiliki potensi pengembangan pertanian berupa tanaman perkebunan dan hortikulturan, yang bertujuan untuk mencegah degradasi lahan, erosi, banjir, dan lain-lain, melakukan usaha tani konservasi lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu, meningkatkan partisipasi dan kesadaran petani serta generasi muda dalam upaya konservasi sumber daya lahan pertanian dan pelestarian lingkungan, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, pendapatan serta kesejahteraan petani, menekan laju pertambahan lahan kritis.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka keenam kegiatan itu saja yang mendukung adanya kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Kegiatan 1 sampai 3 adalah kegiatan yang dikhususkan bagi para penyuluh pertanian agar para penyuluh mampu memberikan pemahaman mengenai Agropolitan di Kota Batu kepada masyarakat di Kota Batu. Adanya kegiatan keempat ini guna

mendukung penguatan kelembagaan khususnya yang bergerak dalam bidang perbenihan agar bisa menghasilkan benih yang berkualitas bagi para petani. Lalu di kegiatan kelima perlu adanya ransangan modal dari pemerintah Kota Batu agar masyarakat petani di Kota Batu mampu mendirikan lembaga keuangan desa sehingga bisa menciptakan kemandirian di desa-desa tersebut. Selain itu, bagi para petani yang memiliki tempat tinggal di sekitar DAS hulu bisa diberikan pemahaman pertanian mengenai konservasi DAS hulu, sehingga erosi tanah dan banjir tidak terjadi atau bisa diminimalisirkan. Sedangkan kegiatan lainnya selain keenam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Kebijakan Agropolitan karena pemerintah Kota Batu selalu terkonsep pada pembangunan sarana dan prasarana dan pemberian bantuan alat, walaupun pendistribusiannya tidak merata.

Tahun 2009 sendiri juga terdapat beberapa kegiatan untuk memajukan dan mengembangkan kebijakan Agropolitan. Diantaranya pelatihan dan pelaku Agribisnis, peningkatan sumber daya pertanian, pengembangan agribisnis dan agroindustri, penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan, pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. Dengan adanya ke lima kegiatan ini maka agropolitan bisa maju walaupun dari sekian banyak kegiatan hanya 5 yang sesuai. Di tahun ini kegiatan-kegiatan guna mendukung kebijakan tersebut berfokus pada pengembangan sumber daya pertanian, baik itu dari pihak penyuluh dan pihak pelaku atau masyarakatnya. Selain itu, perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pertanian baik itu jalur irigasi, rumah kompos dan pembangunan saung tani di

3 kecamatan. Serta berfokus pada pengembangan bibit pertanian khususnya bibit kopi di Desa Gunungsari.

Tahun 2010, ada beberapa kegiatan yang berfokus mengenai Agropolitan, diantaranya pertama pengembangan sekolah lapang pertanian/perkebunan dengan tujuan untuk meningkatkan SDM petani. Peningkatan SDM petani dalam pengelolaan budidaya tanaman hortikultura dalam hal ini apel dan kubis bunga, tersampainya upaya perubahan pola pikir petani menuju budidaya tanaman sehat dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan prosedur GAP, mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida, meningkatkan mutu, daya saing dan nilai jual produk hortikultura. Kedua pengembangan Agribisnis hortikultura dengan maksud agar meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan terbentuknya kawasan tanaman sayuran di daerah DAS/daerah rawan longsor dan erosi pada kelompok tani / gapoktan tanaman sayuran, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petugas, petani dan kelompok tani dalam penerapan budidaya yang baik dan benar (GAP) dan SOP. Ketiga, sekolah lapang tanaman hias mawar potong dalam rangka penerapan GAP Hortikultura dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tani mengenai agroekonomi sebagai dasar GAP, meningkatkan kemandirian masyarakat tani mengenai pengelollan agroekonomi, dan mengenal dan mengenai penerapan teknologi dalam pengelolaan agroekonomi.

Keempat, pengembangan agribisnis dan agroindustri, yang ditujukan agar masyarakat mengetahui fungsi kawasan DAS khususnya untuk pelestarian lingkungan, memperkuat modal petani, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, penyuluh, petani dan kelompok tani mengenai GAP. Kelima pengembangan agroindustri di Kota Batu, yang dimaksudkan untuk membentuk inisiasi pengembangan kawasan hortikultura yang memenuhi skala ekonomi pedesaan. Keenam pelatihan untuk petani dan pelaku agribisnis, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan SDM petani di bidang keamanan pangan dan penguasaan teknologi agribisnis. Berdasarkan penjelasan keenam kegiatan beserta tujuan dari kegiatan itu, maka terjadi adanya pengulangan kegiatan dari tahun lalu, salah satunya pelatihan dan pengembangan SDM petani. Hasil temuan di lapangan bahwa pemahaman mengenai teknologi Agropolitan masih belum dipahami secara matang oleh para petani di 3 kecamatan.

Tahun 2011, ada 4 kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan Agropolitan, yaitu kegiatan pengembangan agribisnis dan agroindustri, kegiatan peningkatan produksi, produktivitas, dan produk mutu tanaman baik itu tanaman buah maupun tanaman sayuran dan biofarmaka yang berkelanjutan. Serta kegiatan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung. Sedangkan kegiatan lain sudah bergeser dan mendalami teknik pertanian secara organik. Sehingga Agropolitan lambat laun mulai ditinggalkan. Di tahun ini yang menarik adalah pemerintah Kota Batu mulai melakukan sekolah lapang untuk meningkatkan produktivitas tanaman baik itu

tanaman buah, sayur-mayur, padi, palawija dan jagung serta sekolah lapang untuk pengembangan tanaman hias krisan, mawar dan tanaman lainnya. Workshop mengenai peningkatan mutu tanaman juga sudah dilaksanakan agar tanaman yang dihasilkan bisa lebih berkualitas. Sedangkan di tahun 2012. Ini kegiatan Agropolitan sudah tidak lagi diperhatikan. Terlebih kebijakan mengenai Agropolitan yang muncul di tahun ini ditujukan untuk hibah khususnya mengenai peternakan. Baik itu hibah sapi, pakan ternak dan obat-obatan.

Penjelasan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu sebagai *Leading Sector*, maka kebijakan Agropolitan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan. Diantaranya, yang pertama adalah kesiapan masyarakat di Kota Batu, khususnya di 3 kecamatan. Walaupun sebagian besar masyarakat di Kota Batu adalah petani, namun ketidak siapan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Agropolitan menyebabkan Agropolitan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua adalah tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan dari masyarakat petani di Kota Batu, sebagian besar jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Kota Batu khususnya di Sidomulyo dan Gunungsari adalah hanya lulusan SD dan TK. Ini sesuai dengan tabel 8 dan tabel 11. Ketiga adalah sarana dan prasarana pendukung untuk berjalannya kebijakan Agropolitan. Karena sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat petani masih tradisional belum

modern khususnya di Desa Gunungsari, hanya sebatas pembangunan lumbung padi. Sedangkan di Sidomulyo juga sama sarana dan prasarana yang digunakan masih tradisional, hanya sebatas bantuan *Screen House*. Oleh karena itu, setiap kelompok tani tidak mendapatkan bantuan sarana dan prasarana yang sama, ini disebabkan setiap kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan memiliki hak dan kesempatan untuk mengajukan bantuan secara mandiri ke pemerintah melalui dinas pertanian dan kehutanan tanpa menunggu dari pemerintah. Selain itu bantuan yang sangat penting adalah pembangunan stasiun agroklimat guna membantu pemasaran produk hasil pertanian para petani seperti puspa agro di Sidoarjo.

Keempat adalah sumber daya keuangan masyarakat, yang dimaksudkan disini adalah dimana kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih kurang baik, karena masyarakat sendiri masih memiliki pemikiran tradisional, bahwa apa yang dilakukan selama ini pagi berangkat kerja, sore pulang kerja langsung istirahat, yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, istri dan anak-anaknya. Sehingga pemahaman-pemahaman baru khususnya mengenai Agropolitan tidak bisa dipahami oleh para petani. Jika pemahaman mengenai Agropolitan bisa dipahami maka dampak positif yang bisa didapat oleh masyarakat petani salah satunya adalah meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Faktor penghambat terakhir adalah faktor politik di daerah tersebut, yang dimaksud disini adalah setiap kepala daerah yang memimpin

daerah tersebut memiliki kebijakan dan program pendukung sendiri, tanpa mendukung atau mengembangkan kebijakan yang sudah ada.

Faktor penghambat terakhir inilah yang menjadi alasan utama mengapa kebijakan Agropolitan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Walaupun di awal masa pemerintahan sampai sekarang pemerintahan Kota Batu mengusung visi misi Agropolitan di dalamnya. Dalam hal ini Agropolitan sudah tidak menjadi agenda besar dan penting yang perlu untuk lebih dimajukan dan dikembangkan agar masyarakat petani di Kota Batu bisa merasakan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Hal ini disebabkan masing-masing pimpinan daerah memiliki Ego untuk mengembangkan daerah tersebut khususnya di Kota Batu dengan program dan kebijakan sendiri tanpa menetapkan Agropolitan sebagai dasar melakukan pengembangan dan perubahan tersebut di Kota tersebut khususnya di Kota Batu. Walaupun sebenarnya sebuah kebijakan yang ada terbentuk karena adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kota Batu bertahun-tahun lalu, dan berdasarkan kontur wilayah di Kota Batu sehingga dibuatlah peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penemuan di lapangan dan dokumen laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan. Maka tingkat partisipasi masyarakat petani di Kota Batu cukup rendah, karena pemaparan mengenai apa itu dan manfaat dari kebijakan Agropolitan di Kota Batu tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Kota Batu, dan hanya sebagian yang paham mengenai apa itu dan manfaat dengan

adanya Kebijakan Agropolitan. Namun tingkat partisipasi masyarakat khususnya petani di Kota Batu cukup tinggi jika dilakukannya workshop-workshop, sekolah lapangan untuk menunjang pemahaman dan keterampilan para petani di Kota Batu, karena untuk melakukan hal tersebut memang pemerintah Kota Batu telah menentukan tempatnya dan pihak-pihak yang diundang. Akan tetapi sayangnya pemerintah Kota Batu kurang memberikan evaluasi setelah dilaksanakannya workshop, dan sekolah lapangan, hanya membiarkan pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat petani di Kota Batu menguap begitu saja, tanpa mengecek/turun lapangan bagaimana perkembangan yang telah ada di masyarakat Kota Batu.

Berbicara mengenai keterlibatan masyarakat Kota Batu dalam perumusan kebijakan Agropolitan ini, hanya masyarakat tertentu saja yang ikut dalam rapat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat sudah menyerahkan semuanya kepada para kepala GAPOKTAN yang ada di desa-desa. Namun sebenarnya kebijakan Agropolitan baru muncul di akhir-akhir tahun 2007 an karena masyarakat sudah melaksanakan/bermata pencaharian sebagai petani di zaman dahulu. Di tahun 2013 ini kebijakan mengenai Agropolitan sudah bergeser ke dalam kebijakan Go Organik yang berbasis pariwisata. Dalam perumusannya pun kebijakan Agropolitan sudah tidak pernah berkembang atau disinggung lagi untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Perubahan dari kebijakan Agropolitan menuju Organik berbasis pariwisata kurang menarik minat dari masyarakat petani di Kota Batu khususnya di Desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo. Karena pihak masyarakat petani Kota Batu masih belum

memiliki keberanian untuk mencoba hal baru tersebut tanpa adanya dampingan dari pihak pemerintah, dan cenderung untuk mengoplos antara kimiawi dan organik dalam teknik penanaman bunga dan komoditas lainnya di Kota Batu. Sedangkan pola perumusan yang awal mulanya Agropolitan menjadi Organik ini tidak banyak berubah, karena semua bersifat *Top-Down* alias semuanya berasal dari pihak pemerintah baru diimplementasikan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai keterlibatan masyarakat dan pola perumusan serta pola perubahan perumusan kebijakan tersebut di Kota Batu. Maka sesuai dengan *Pentagon Asset* (Aset Penghidupan), kesiapan masyarakat dalam implementasikan Kebijakan Agropolitan cukup rendah walaupun kegiatan pertanian di Kota Batu sudah berlangsung lebih dari berpuluh-puluh tahun lalu. Sesuai dengan Saragih dkk (2007:26-31) bahwa kekuatan masyarakat yang ada bisa dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Saragih juga menambahkan bahwa sebuah masyarakat atau daerah bisa dikatakan makmur atau siap menjalankan sebuah kebijakan, jika dilihat dari 5 aset penghidupan, yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Fisik/Infrastruktur, Sosial Capital, dan Sumber Daya Keuangan.

Kelima aset penghidupan di Kota Batu khususnya di Desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo, maka bisa dispesifikasikan. Pertama adalah Sumber Daya Manusianya, di desa Gunungsari sebagian besar masyarakat yang ada di desa tersebut memiliki pendidikan SD dan ada yang buta aksara. Sedangkan di

Desa Sidomulyo cukup maju tamat pendidikan SD dan pendidikan DI/DII/DIII, hal ini sesuai dengan tabel 8 dan 11. Kedua adalah Sumber Daya Alamnya, kedua desa di Kota Batu ini terletak di kontur pegunungan dan berbukit-bukit sehingga pas sekali jika mata pencaharian sebagai petani menjadi mata pencaharian utama disana. Ketiga adalah aset Fisik/Infrastruktur, di desa Gunungsari aset Fisik/Infrastruktur yang dimiliki cukup memprihatinkan dan hanya lumbung penyimpanan yang disediakan oleh pihak pemerintahan Kota Batu sedangkan infrastruktur jalan masih kurang memadai. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Desa Sidomulyo, karena terletak di jalan utama maka infrastruktur/fisik cukup baik bahkan ada rencana untuk dibangunnya *rest area*. Keempat adalah aset Sosial (Sosial kapital), di dua desa ini karena memiliki GAPOKTAN maka sifat masyarakatnya yang masih guyub juga menjadi nilai positif. Akan tetapi setiap kelompok tani yang tergabung di GAPOKTAN bisa bersaing dengan kelompok tani lainnya untuk mengajukan proposal bantuan, dan yang mampu menangkap peluang pasar.

Kelima adalah Sumber Daya Keuangan, di kedua desa ini setiap masyarakatnya dipersilahkan untuk bersaing dan dipersilahkan untuk menangkap peluang pasar. Jadi siapa yang mampu bersaing tersebut maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi. Selain itu, di kedua desa ini sebagian besar para penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan hanya sebagian saja yang bermata pencaharian sebagai tuan tani. Sehingga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai tuan tani ini memiliki tingkat

kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dari kesemuanya itu masyarakat di Kota Batu khususnya di desa Gunungsari dan desa Sidomulyo sudah mencukupi keempat aset tersebut kecuali aset Sumber Daya Manusianya, karena sebagian besar masyarakatnya berpendidikan dalam jenjang Sekolah Dasar.

2. Reaksi yang Ditimbulkan Oleh Masyarakat Petani Kota Batu Terhadap Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Sebuah kebijakan akan berlangsung dengan baik jika ada komunikasi yang baik khususnya antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat adalah dengan melakukan *Hearing* atau jajak pendapat dengan mengundang perwakilan masyarakat ke balai desa atau sekretariat dewan DPRD Kota Batu. Komunikasi yang dilakukan ini adalah cikal bakal dibentuknya kebijakan Agropolitan, karena pemerintah melihat bagaimana potensi alam, masyarakat dan pasar di Kota Batu, khususnya mengenai pertanian. Sebuah kebijakan akan berjalan dengan teratur dan sesuai tujuan jika ada intervensi secara persuasif di dalamnya. Akan tetapi hasil temuan di lapangan intervensi secara persuasif itu kurang begitu kentara di dalamnya, hanya sebatas memberikan bantuan alat, sekolah lapangan tanpa ada evaluasi di dalamnya.

Tindak lanjut dari adanya komunikasi ini adalah perlu adanya sebuah kerjasama antara ketiga *Stakeholders* yaitu antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam Sedarmayanti tahun 2004, menyatakan bahwa *Good Governance* adalah

penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid, dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, Swasta, dan Masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. *Negara/Pemerintahan*: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. *Swasta*: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan, perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. *Masyarakat*: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Hasil temuan di lapangan, adalah peran dari ketiga *Stakeholders* ini tidak terlihat secara harmonis, hanya 2 pihak saja yang melakukan kerjasama untuk mengembangkan kebijakan ini. Pihak pertama adalah pihak pemerintah Kota Batu. Sesuai dengan kondisi di lapangan pihak ini cukup memberikan banyak andil besar dalam merumuskan, menetapkan dan mengembangkan sebuah kebijakan, khususnya kebijakan Agropolitan. Beberapa hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam kebijakan ini, diantaranya adalah. Membangun sarana dan prasana yang sudah dijelaskan diatas selama tahun

2007-2013, lalu memberikan bantuan bibit, modal, alat-alat pendukung pertanian dan sekolah lapangan untuk penerapan *Good Agriculture Practises* (GAP). Serta membentuk perundangan-undangan yang tertuang dalam perda No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota Batu, perlu digaris bawahi disini adalah pembentukan dan penetapan perda ini melihat kesempatan dan potensi yang ada di masyarakat. Pemerintah melihat bahwa kegiatan pertanian di Kota Batu sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah untuk berinteraksi, maka dibentuklah perda tersebut. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa memberikan keuntungan yang sama satu sama lain.

Pihak kedua adalah pihak masyarakat. Hasil temuan di lapangan, bahwa masyarakat ada yang mendukung, ada yang tidak dan bahkan ada yang tidak mengetahui mengenai Agropolitan. Sebagian masyarakat yang mendukung mengenai apa itu Agropolitan mengetahui dampak yang bisa dia terima, baik itu dari segi penghasilan dan bantuan yang lebih gencar/sering lagi dari pemerintah Kota Batu maupun dari pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan Bapak Nuryono, Bapak Sulkhan dan Bapak Sayadi Wibowo yang mempunyai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik dari masyarakat di sekitarnya dan juga memperoleh bantuan dana, alat pertanian yang lebih modern dari petani di sekitarnya. Sebagian masyarakat yang tidak mendukung ini biasanya masih kurang percaya dengan pemaparan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu, salah satunya adalah Bapak Basori dimana beliau mengetahui Agropolitan dan pertanian Organik, tetapi tidak

melaksanakan jika tidak ada contoh atau pendampingan dari pihak pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan Agropolitan dan Pertanian Organik. Sedangkan yang terakhir adalah masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Agropolitan. Ini terjadi di sebagian masyarakat petani di Kota Batu, karena memang sebagian masyarakat jarang bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam rapat atau perumusan kebijakan Agropolitan. Sehingga mereka tidak ikut menjalankan kebijakan tersebut, karena masyarakat Kota Batu khususnya di Gunungsari dan Sidomulyo sudah menjalankan sistem pertanian secara tradisional dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat pihak Swasta. Namun pihak swasta kurang memberikan andil khususnya dari segi modal. Karena kerjasama dengan swasta baru dilaksanakan dalam tahun 2012.

Kerjasama antara ketiga pihak baik itu antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat ini adalah salah satu syarat terbentuknya *Good Governance*, sesuai dengan pernyataan Lembaga Administrasi Negara dalam buku Sedarmayanti tahun 2004. Setelah ada sebuah kerjasama diantara ke tiga pihak maka, perlu adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Sektor Publik. Menurut Bintoro Tjokroaminoto (2000) dalam Sedarmayanti, menyatakan ada 5 prinsip dalam *Good Governance*, yaitu:

1. Perubahan sistem politik kearah sistem politik yang demokratis, partisipatif, egaliter.
2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) dimaka kekuatan militer ini harus menjadi kekuatan yang profesional dan independen.

3. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman dan pelayanan publik.
4. Reformasi pemerintah yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi.
5. Agenda reformasi lain yang juga strategi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih baik itu dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disiplin dalam penerimaan dan penggunaan uang, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur Negara.

Berdasarkan penjelasan dari Bintoro tersebut, maka peneliti mengambil 2 prinsip yang diterapkan sektor publik untuk mengembangkan kebijakan ini, yaitu sentralisasi ke desentralisasi dan sistem politik otoriter menuju partisipatif dan egaliter. Hasil temuan di lapangan bahwa sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi memang terjadi adanya. Karena kebijakan Agropolitan ada dan dibentuk sejak kepemimpinan bapak Imam Kabul dengan melihat mata pencaharian Kota Batu yang sudah bercocok tanam sejak dulu. Sehingga dibentuklah legalitas dalam bentuk perda yang sudah disebutkan diatas. Dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat untuk direbug bersama dan diputuskan bersama dengan pihak pemerintah Kota Batu. Hal ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Batu untuk mengembangkan kebijakan Agropolitan. Namun hasil temuan di lapangan, walaupun pemerintah Kota Batu sudah membuka diri menuju pemerintahan yang partisipatif, akan tetapi tingkat partisipatif

masyarakat masih cukup rendah. Karena jika ada rapat atau ada praktek sekolah lapangan, hanya perwakilan masyarakat yang turut hadir tidak secara keseluruhan.

Sesuai dengan pernyataan dari Bintoro tersebut bisa dijelaskan bahwa reformasi pemerintah sudah berubah dari sistem yang sentralisasi menuju desentralisasi, karena pemerintah daerah Kota Batu diberikan kesempatan oleh pemerintah Kota Batu untuk menciptakan legalitas untuk mendukung kebijakan itu secara mandiri. Serta sistem pemerintahan Kota Batu sudah bergeser dari sistem yang otoriter menuju partisipatif dan egaliter. Berdasarkan 2 prinsip tersebut maka sebuah pemerintahan khususnya di Kota Batu perlu untuk mengembangkan *Clean and Good Governance* dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *Good Governance*. Beberapa syarat yang diperlukan untuk pembentukan *Clean and Good Governance* menurut Sedarmayanti (2004) adalah:

1. Pembangunan dan oleh untuk masyarakat.
2. Pokok pikiran *Community Information Planning System* dapat diwujudkan dengan “*Sharing*” sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat.
3. Lembaga legislatif perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat.
4. Birokrat harus menjalin kerjasama dengan masyarakat, yaitu dengan membuat program-program yang sesuai.

5. Birokrasi harus berdialog dengan masyarakat.

Sesuai dengan syarat diatas maka ada 5 hal yang harus dilakukan antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat di Kota Batu. Hasil temuan di lapangan, bisa dijelaskan bahwa sebelum dirumuskan kebijakan ini pemerintah melihat adanya potensi pertanian dan sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga perlu adanya legalitas yang baik yang mengatur perjalanan dan perkembangan kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pembangunan dan oleh untuk masyarakat. Syarat kedua adalah *Community Information Planning System* yang bisa diwujudkan melalui “Sharing”. Hasil temuan di lapangan sharing yang terjadi sudah sering dilakukan antara pihak pemerintah dan masyarakat Kota Batu yang masuk dalam Musrenbang dan terjadi pada 5 tahun sekali. Akan tetapi masalahnya disini banyak masyarakat yang kurang tanggap mengenai informasi pertanian dan Agropolitan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Batu di internet. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat Kota Batu masih belum melek Teknologi.

Syarat ketiga adalah pihak legislatif dalam hal ini pemerintah Kota Batu memberikan informasi mengenai potensi pertanian dan dampak dijalankannya kebijakan pertanian tersebut terhadap masyarakat petani Kota Batu. Hasil temuan di lapangan bahwa pihak legislatif sudah memberikan pengertian, dan dampak mengenai kebijakan Agropolitan ini. Akan tetapi meskipun sudah memaparkan mengenai kebijakan tersebut, pemerintah Kota Batu masih kurang memberikan dampingan lebih lanjut untuk

mengembangkan Kebijakan Agropolitan tersebut. Syarat keempat adalah birokrat harus menjalin kerjasama dengan masyarakat, dengan membuat program-program yang sesuai. Hasil temuan di lapangan program-program guna mendukung Kebijakan Agropolitan sudah dibentuk dan dilaksanakan, seperti adanya Sekolah Lapangan, pelatihan dan workshop mengenai *Good Agriculture Practises* (GAP) sesuai dengan penjelasan diatas. Tetapi kurangnya kontrol dan evaluasi setelah kegiatan tersebut masih menjadi kendala yang sering dihadapi oleh kedua pihak. Kelima adalah adanya dialog dengan masyarakat, untuk hal ini sudah terjadi dialog antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya mengenai bantuan apa yang diperlukan untuk kondisi pertaniannya.

Berdasarkan penjelasan diatas sebenarnya untuk pengembangan kebijakan Agropolitan sudah baik. Akan tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya pendampingan, kurangnya kontrol dan evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu dari pihak masyarakat untuk update mengenai informasi pertanian dan kebijakan Agropolitan melalui website di internet masih kurang dan bahkan jarang yang membuka internet untuk sekedar mencari informasi mengenai pertanian.

Pemaparan diatas telah menjelaskan bagaimana perkembangan dan perjalanan dari Kebijakan Agropolitan di Kota Batu ini. Dari itu semua bisa kita tarik bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini. Sesuai dengan definisinya partisipasi adalah keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Temuan di

lapangan berdasarkan definisi partisipasi tersebut, maka tingkat partisipasi masyarakat khususnya para petani di Kota Batu, cukup rendah, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang mau menangkap peluang pasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan masih terpaku pada pemikiran tradisional “berangkat pagi pulang sore, dan kebutuhan hidup tercukupi”.

Menarik disini adalah bentuk partisipasi masyarakat untuk kebijakan Agropolitan ini sudah sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh Ericson dalam Slamet (1994), dalam Jurnal yang ditulis oleh Yulianti Tahun 2012. Dalam jurnal tersebut bentuk partisipasinya diantaranya:

1. Partisipasi dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planning Stage*): tahapan ini masyarakat berpartisipasi dalam memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diberikan.
2. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan (*Implementation Stage*): tahapan ini masyarakat berpartisipasi dalam memberikan tenaga, uang, maupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada kebijakan tersebut.
3. Partisipasi dalam Pemanfaatan (*Utilization Stage*): tahapan ini masyarakat berupa pemanfaatan uang, dan tenaga untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Dari pemaparan Ericson diatas, maka hasil temuan di lapangan sudah sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan, perencanaan kebijakan Agropolitan mulai dari awal tersebut adalah dengan mengajak *Sharing* perwakilan masyarakat Kota Batu, dalam hal ini adalah

para pemimpin GAPOKTAN di masing-masing desa di Kota Batu. Tetapi aspirasi masyarakat dari tahun ke tahun sering mandek. Partisipasi kedua adalah partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dalam hal ini masyarakat sudah melaksanakan pertanian dan mendarah daging sejak Kota Batu tersebut didirikan, hanya saja dasar hukum untuk menguatkan pertanian tersebut baru dibentuk pada tahun 2003 tentang RT/RW Kota Batu tahun 2003-2013 yang kemudian menjadi Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 juga tentang RT/RW Kota Batu Tahun 2010-2030. Partisipasi ketiga adalah dalam pemanfaatan, dalam hal ini masyarakat sudah memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu, khususnya sarana dan prasarana pertanian seperti lumbung padi, peralatan dan bibit berkualitas untuk penunjang pertanian. Sedangkan untuk uang, masyarakat petani Kota Batu masih menggunakan uang/modal sendiri, untuk uang dari pemerintah digunakan jika benar-benar kepepet/terdesak tidak ada pilihan lain, dan uang tersebut dihimpun di GAPOKTAN masing-masing desa.

Berdasarkan tahapan-tahapan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Maka faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan pemaparan teori dari Plumer dalam Suryawan (2004:27) yang ditulis dalam jurnal oleh Yulianti Tahun 2012, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu kebijakan, diantaranya:

1. Pengetahuan dan Keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi.

2. Seluruh lingkungan dari masyarakat tertentu. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.
3. Pekerjaan Masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu.
4. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh pada keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
5. Jenis kelamin. Faktor ini melihat laki-laki dan perempuan memiliki persepsi berbeda terhadap suatu pokok permasalahan khususnya dalam hal partisipasi.
6. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

Berdasarkan pemaparan teori dari Plummer diatas. Maka, menurut fakta di lapangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat ada 5 hal. Diantaranya, yang pertama adalah pengetahuan dan keahlian, hasil temuan di lapangan adalah, pengetahuan dan keahlian masyarakat mengenai petanian baik itu teknik-teknik, pengolahan komoditas dalam bertani sudah baik dan cukup pesat. Karena masyarakat Kota Batu pada dasarnya bermata pencaharian sebagai petani dan ini sudah bertahan lebih dari berpuluh tahun

lamanya. Akan tetapi jika berhubungan dengan Agropolitan pengetahuan dan keahlian masyarakat khususnya Petani Kota Batu masih belum paham betul mengenai hal tersebut. Hal ini karena konsep mengenai Agropolitan hanya diajarkan dan dipaparkan oleh pemerintah Kota Batu secara berkala dan mandiri. Jadi masyarakat diberikan pengetahuan tersebut tanpa pendampingan secara berkala atau pendampingan secara rutin oleh pemerintah Kota Batu, atau hanya menyuruh saja.

Kedua adalah lingkungan dari masyarakat tersebut. Karena lingkungan masyarakat petani Kota Batu, khususnya di Desa Gunungsari masih tradisional jadi mereka belum bisa menerima pemikiran baru dan dampak yang bisa diterima jika Agropolitan bisa diterapkan. Hal ini bisa mempengaruhi masyarakat lain untuk tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan di Sidomulyo meskipun masyarakatnya sudah menuju modern dan terletak di kantor BAPPEDA Kota Batu. Tetapi masih ditemukan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kebijakan Agropolitan tersebut, dan alasan yang sama berupa pendampingan yang tidak rutin dan tidak berkala dari pemerintah Kota Batu tidak sering dilakukan. Sehingga hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat petani Kota Batu untuk menjadi lebih baik lagi.

Ketiga adalah pekerjaan masyarakat. Hasil temuan di lapangan meskipun pekerjaan masyarakat petani Kota Batu adalah sebagai petani. Namun, masyarakat sendiri jika ada hal-hal yang berhubungan dengan rapat atau sekolah lapangan atau workshop yang digelar oleh pemerintah Kota Batu

banyak dari mereka yang tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, cenderung untuk diwakilkan pada ketua GAPOKTAN dan struktur yang ada di GAPOKTAN. Mereka beranggapan bahwa kerja di rumah dan pulang sore hanya untuk menjaga pertaniannya itu lebih baik, ketimbang ikut rapat atau kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kota batu. Sehingga pemikiran dan aliran baru khususnya mengenai Agropolitan tidak bisa masuk dan tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat petani di Kota Batu.

Keempat adalah tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor keempat ini yang memungkinkan masyarakat petani di Kota Batu mau atau tidak mau untuk berpartisipasi. Dari data yang dihimpun diatas khususnya di Gunungsari masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar hanya lulusan SD bahkan ada yang masih buta huruf. Disini bisa diketahui bahwa dengan tingkat pendidikan yang hanya sebatas SD, sedikit banyak akan mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai Agropolitan. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi masyarakat disana untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kebijakan Agropolitan. Sedangkan di Sidomulyo pendidikan SD masih mendominasi, namun untuk lulusan DI/DII/DIII bahkan S1 masih cukup banyak. Hal yang menyebabkan di Sidomulyo sebagian besar masyarakatnya tidak berpartisipasi adalah, selain dengan kurangnya pengetahuan mengenai Agropolitan, juga merangsang masyarakat untuk mencari mata pencaharian selain sebagai petani. Karena lulusan mereka yang notabene lulusan DI/DII/DII dan S1 sebagian besar mereka bekerja sebagai PNS. Mereka

menganggap bekerja sebagai petani tidak menjanjikan dan itu adalah pekerjaan yang tradisional.

Kelima adalah jenis kelamin. Faktor ini tidak begitu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Karena sebagian besar masyarakat masih memiliki unggah-ungguh, yang dimaksud disini adalah laki-laki memiliki hak paling tinggi daripada perempuan. Jadi meskipun ada pertemuan pihak perempuan jarang mau untuk ikut partisipasi di dalamnya dan diwakilkan kepada pihak laki-laki. Pihak perempuan hanya sebatas arisan saja. Walaupun pihak laki-laki terkadang juga ada yang tidak ikut untuk rapat atau pertemuan. Keenam adalah kepercayaan terhadap budaya tertentu. Faktor keenam ini juga tidak begitu mempengaruhi masyarakat petani di Kota Batu untuk berpartisipasi di dalamnya. Namun segi positifnya mereka masih mempercayai budaya untuk bercocok tanam secara tradisional dan percaya mengenai peluang pasar agar tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Batu khususnya di Gunungsari dan Sidomulyo menjadi semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh ketiga *Stakeholders*, syarat-syarat dalam *Clean and Good Governance*, serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah kebijakan khususnya Agropolitan ini. Maka, hasil temuan di lapangan, reaksi masyarakat mengenai kebijakan Agropolitan cukup beraneka ragam. Pertama ada yang tidak setuju dengan kebijakan Agropolitan ini, sebagian besar mereka adalah para buruh tani dan petani kecil. Alasannya adalah:

1. Masyarakat menganggap bahwa adanya kebijakan Agropolitan tidak begitu memberikan dampak terhadap hidupnya.
2. Bantuan yang diterima oleh masyarakat khususnya modal tidak sering diterima oleh masyarakat. Sehingga dari mereka cenderung untuk melakukan pinjaman bantuan melalui rentenir.
3. Masyarakat tidak diberikan evaluasi dan pendampingan secara berkala oleh pemerintah hanya sekali dua kali melalui pelatihan dan sekolah lapangan. Sehingga ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau berpartisipasi.

Kedua adalah yang setuju dengan adanya kebijakan Agropolitan ini, mereka beralasan: (1). Masyarakat tersebut sudah mengetahui peluang pasar dan sebagian besar mereka adalah ketua kelompok tani atau ketua Gabungan Kelompok Tani yang merasakan bantuan langsung dari pemerintah Kota Batu. (2). Sebagai tuan tani, pemilik lahan pertanian yang cukup luas maka mereka bisa merasakan kesejahteraan yang makmur dan lebih baik dari petani kecil yang ada. (3). Tuan tani atau pemilik lahan yang luas bisa bertindak sebagai perantara, yang dimaksud disini adalah para petani kecil ditarik biaya oleh tuan tani agar produksi tani dari petani kecil bisa laku, karena petani kecil tidak memiliki koneksi yang luas seperti tuan tani dalam hal pemasaran produk pertanian.

Berdasarkan pemaparan dan penemuan di lapangan mengenai perumusan dan perkembangan Kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Maka, sesungguhnya kebijakan Agropolitan gagal dalam pelaksanaannya, bahkan

sekarang perubahan menuju “Go Organik” sudah mulai dicanangkan. Perubahan dari *Agroindustry* menuju *Organicindustry* diharapkan bisa lebih meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota Batu, karena Visi Kota Batu 2013 “Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional”. Yang dimaksud disini adalah dengan adanya wisata di Kota Batu diharapkan nantinya para wisatawan bisa menikmati wisata pedesaan, salah satunya melalui wisata petik apel, petik bunga bahkan Agrowisata.

Perbedaan mendasar dari perubahan kedua kebijakan tersebut adalah, teknik penanaman yang dilakukan untuk mengembangkan pertanian dari para petani, dan tentunya dilakukan secara masal. Perbedaan yang paling kentara diantara kebijakan ini adalah pengolahan pertanian, yaitu pengolahan secara organik tanpa pemakaian pestisida dan zat kimiawi lainnya. Oleh karena itu dari kedua kebijakan ini perlu untuk diberikan dukungan salah satunya memasarkan melalui stasiun agroklimat, agar produk olahan para petani bisa dilirik dan laris dijual di pasaran.

3. Skema/Mapping Antara Perumusan dan Reaksi Masyarakat Petani di Kota Batu, Mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu.

Indonesia adalah Negara Agraris yang memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah untuk produk pertanian. Karena Indonesia memiliki luas lahan pertanian kurang lebih 82,71% yang juga memiliki keberagaman jenis tanaman. Hal ini didukung dengan iklim tropis di Indonesia yang sangat baik. Selain itu, sektor pertanian cukup memberikan andil dalam menyumbang perekonomian (PDB) di Indonesia, hal ini seperti yang telah

dijelaskan diatas. Dengan berkembangnya pertanian dan potensi pertanian di Indonesia yang cukup pesat, maka diaturlah sebuah kebijakan untuk mendukung pertanian tersebut, yaitu Kebijakan mengenai Agropolitan. Kebijakan Agropolitan sendiri adalah upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas maka, pemerintah pusat selaku induk pemerintahan menetapkan beberapa dasar hukum untuk menguatkan pembuatan Kebijakan Agropolitan, yaitu diantaranya UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Permentan No 41/permentan/QT.140/9/2009 tentang kriteria kawasan peruntukkan pertanian. Hal ini membuat pemerintah provinsi yang kemudian diteruskan kepada pemerintah Kota Batu untuk menjalankan instruksi tersebut. Dalam tampuk kekuasaan Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, beliau memasukkan agenda pertanian ke dalam Sembilan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 188 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2011. didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Pengembangan Kawasan Agropolitan ini pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan yang bersifat *exclusive* tetapi lebih bersifat *complement* terhadap tiga agenda prioritas pembangunan di Jawa Timur tahun 2009-2014, yaitu:

- d. Meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian di perdesaan
- e. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik* dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- f. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perubahan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang

Berdasarkan agenda pembangunan yang diusung oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Hal ini bisa menjadi jalan potensial untuk mengembangkan potensi pertanian di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu. Potensi pertanian di Kota Batu adalah potensi yang sudah lama dilirik, karena pertanian sudah menjadi darah daging dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Kota Batu sampai saat ini. Selain itu dari letak, kondisi dan iklim Kota Batu yang sangat memadai. Kontur Kota Batu yang pegunungan dan sejuk sudah menjadi syarat yang baik untuk potensi pertanian di Kota Batu. Sehingga di tahun millennium tepatnya di tahun 2002 sejak masa

keperintahan bapak Imam Kabul Kebijakan Agropolitan mulai dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan.

Perumusan mengenai Agropolitan memang menjadi titik penting dalam keberlanjutan kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai titik koordinasi dan komunikasi, bagaimana Pemerintah Daerah Kota Batu mampu mengkomunikasikan dan menjalin kerjasama antar ketiga *Stakeholders* (Masyarakat, pemerintah dan swasta), walaupun dari kerjasama tersebut yang terlihat hanya dari pihak masyarakat dan pemerintahannya saja. Sedangkan untuk pihak swasta tidak begitu kentara kerjasamanya. Dalam tugasnya pemerintah Daerah Kota Batu melakukan *Sharing*, memaparkan potensi alam yang dimiliki Kota Batu, dan tentunya mengadakan dialog yang tertuang dalam musrenbang daerah yang berjalan selama 5 tahun sekali. Hal ini bertujuan agar terwujud *Community Information Planning System* atau sistem informasi yang dihimpun dari masyarakat mengenai rencana Agropolitan agar kedua belah pihak bisa saling menguntungkan dan merumuskan kebijakan untuk masyarakat.

Kebijakan yang dirumuskan tersebut mengundang masyarakat petani yang ada di 3 Kecamatan di Kota Batu. Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut dalam rapat perumusan kebijakan tersebut. Khususnya bagi para pimpinan dan struktur di GAPOKTAN-GAPOKTAN yang tersebar di Kota Batu. Para petani tidak hadir karena beralasan tidak paham dan tidak berdampak pada perkembangan pertaniannya, sehingga lebih memilih absen hadir dan memasrahkan semua pada para pimpinan dan struktur di

GAPOKTAN tersebut. Selain itu kurang percayanya masyarakat petani pada pemerintah daerah Kota Batu karena kurangnya tepatnya janji yang diberikan pemerintah daerah ke masyarakat.

Langkah lebih lanjut adalah setelah dirumuskannya kebijakan tersebut pemerintah daerah Kota Batu membentengi dan mendasarinya dengan dasar hukum guna mendukung Kebijakan Agropolitan tersebut. Dasar hukum tersebut adalah pembentukan RT/RW Tahun 2003-2013, yang kemudian dilanjutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RT/RW Tahun 2010-2030, diteruskan dengan membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) Agropolitan di Kota Batu yang sudah dijelaskan diatas. Setelah pembuatan dasar hukum diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Batu membuat beberapa Program, Kegiatan, Workshop, dan Sekolah Lapangan guna membekali pengetahuan masyarakat mengenai Kebijakan Agropolitan di Kota Batu dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai *Leading Sector*. Walaupun terdapat beberapa kegiatan yang kurang mengena terhadap Agropolitan tersebut. Koordinasi pun dilakukan dengan para PPL/para penyuluh untuk menjelaskan dan memahamkan masyarakat mengenai Agropolitan, mengenai SOP Agropolitan kepada Masyarakat petani di Kota Batu. Namun sekarang fungsi PPL berubah karena PPL cenderung untuk menunggu kesulitan dan *complaint* mengenai masalah pertanian di lapangan yang kemudian disampaikan ke pihak pemerintah Daerah Kota Batu.

Reaksi pun timbul selama pelaksanaan Kebijakan Agropolitan tersebut, ada yang setuju dan mendukung kebijakan tersebut. Hal ini beralasan

bahwa dengan berpartisipasi dalam kebijakan tersebut maka tingkat kesejahteraan hidup mereka bisa lebih meningkat. Lalu ada yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hal ini beralasan bahwa mereka sudah tidak percaya dengan Pemerintah Daerah Kota Batu dan mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai. Selain itu, mereka sudah menjalankan sistem pertaniannya secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah khususnya dari segi modal, dan sebagian besar masyarakat petani Kota Batu yang menolak kebijakan tersebut. Ada hal positif yang bisa ditangkap dari kemandirian tersebut, yaitu masyarakat bisa membantu Negara untuk memangkas uang anggaran yang dianggarkan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa Kebijakan Agropolitan sebenarnya hanya stag atau jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu pertama adalah ketidak siapan masyarakat mengenai perubahan dari pertanian Konvensional ke Agropolitan terlebih tanpa ada pendampingan dari Pemerintah Daerah, kedua tingkat pendidikan masyarakat petani Kota Batu sebagian besarnya masih lulusan SD. Ketiga minimnya pembangunan sarana dan prasaran pertanian di Kota Batu khususnya mengenai pembangunan stasiun Agroklimat. Keempat sumber daya uang yang terbatas dan sistem politik pemerintah yang seringkali berubah tanpa ada agenda besar yang jelas, dan sekarang mulai berubah dari *Agropolitan Industry* menuju *Organic Industry*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan penemuan di lapangan mengenai dinamika perumusan kebijakan perubahan dari pertanian Konvensional ke Agropolitan, bisa ditarik Kesimpulan, diantaranya:

1. Kebijakan Agropolitan adalah sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kota Batu, di awal masa pemerintahan Bapak Imam Kabul. Pemerintah Kota Batu melihat bahwa Kota Batu memiliki potensi Sumber Daya Alam Khususnya Pertanian yang baik. Selain itu mata pencaharian Masyarakat Kota Batu adalah berprofesi sebagai petani. Jadi dengan melihat potensi alam dan manusia yang ada di Kota Batu, maka dilegalkannlah menjadi Kebijakan Agropolitan. Selain itu, Kota Batu juga memiliki kontur yang baik untuk pertanian. Perumusan Kebijakan Agropolitan tersebut juga tidak terlepas dari *Sharing/rembug* bersama antara pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta. Namun, pada kenyataannya kerjasama yang terjadi adalah hanya dari pihak masyarakat dan pemerintah sendiri. Sedangkan swasta kurang begitu memperhatikan potensi pertanian di Kota Batu. Berikut peran dari kedua pihak tersebut, yaitu:
 - a. Pihak Pemerintah, disini memberikan andil yang cukup besar dalam pertanian di Kota Batu, yaitu memberikan bantuan berupa bibit, modal,

alat pertanian dan sekolah lapangan guna mendukung GAP (*Good Agriculture Practises*).

b. Pihak Masyarakat, disini kerjasama yang terjadi adalah pihak masyarakat yang setuju dan mau menjalankan Kebijakan Agropolitan tersebut, karena mereka mengetahui dampak yang diterima dari adanya Agropolitan tersebut. Sedangkan sebagian besar masyarakat yang ada kurang begitu berpartisipasi dalam ikut merumuskan dan menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat kurang percaya dengan masyarakat karena keterlambatan baik itu berupa dana atau pembagian bibit dan bantuan-bantuan lainnya.

c. Pihak Swasta, disini pihak belum memberikan bantuan dan belum mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun masyarakat.

Pada perjalanannya sebelum Kebijakan ini ditetapkan, pihak pemerintah mengajak masyarakat untuk saling berembug apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan untuk mengembangkan pertanian mereka. Namun pola pemikiran masyarakat petani di Kota Batu yang masih tradisional inilah sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi di dalam kebijakan tersebut.

Pola pemikiran tersebut adalah "berangkat pagi, pulang sore dan beristirahat yang penting kebutuhan hidup tercukupi". Pihak masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Agropolitan tersebut adalah pihak yang memiliki struktur dan jabatan dalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang ada. Akan tetapi yang tidak berpartisipasi ini menganggap bahwa mereka tidak mau berbelit-belit lagi

dengan sistem politik yang ada, dan secara mandiri menjalankan pertaniannya yang mana ini bisa berdampak baik pada Pemerintah Daerah Kota Batu, karena anggaran yang ada bisa diminimalisir. Untuk mendukung Kebijakan Agropolitan ini Pihak Pemerintah Kota Batu sudah Menetapkan beberapa Dasar Hukum, diantaranya:

- a. Perumusan dan Penetapan RT/RW Kota Batu Tahun 2003-2013
 - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030, yang memberikan penataan ruang Agropolitan di Kota Batu.
 - c. Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 180/59/KEP/422.01.23/2007 menjadi Surat Keputusan baru yang berisikan tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu Tahun Anggaran 2012.
 - d. Serta pembentukan masterplan Agropolitan Tahun 2012.
2. Selain itu sesuai dengan syarat *Clean and Good Governance* pemerintah sudah melakukan kelima syarat tersebut. Baik itu sudah melakukan *sharing*, sudah ada dialog yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, serta menciptakan program-program untuk masyarakat guna mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan Agropolitan tersebut. Dalam perkembangannya sebagian besar masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan Kebijakan Agropolitan tersebut. Namun dalam partisipasi baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan sudah dilakukan dan dikerjakan oleh masyarakat. Akan tetapi

tingkat pengetahuan, keahlian, lingkungan di sekitarnya, dan tingkat pendidikan cukup mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kebijakan Agropolitan tersebut.

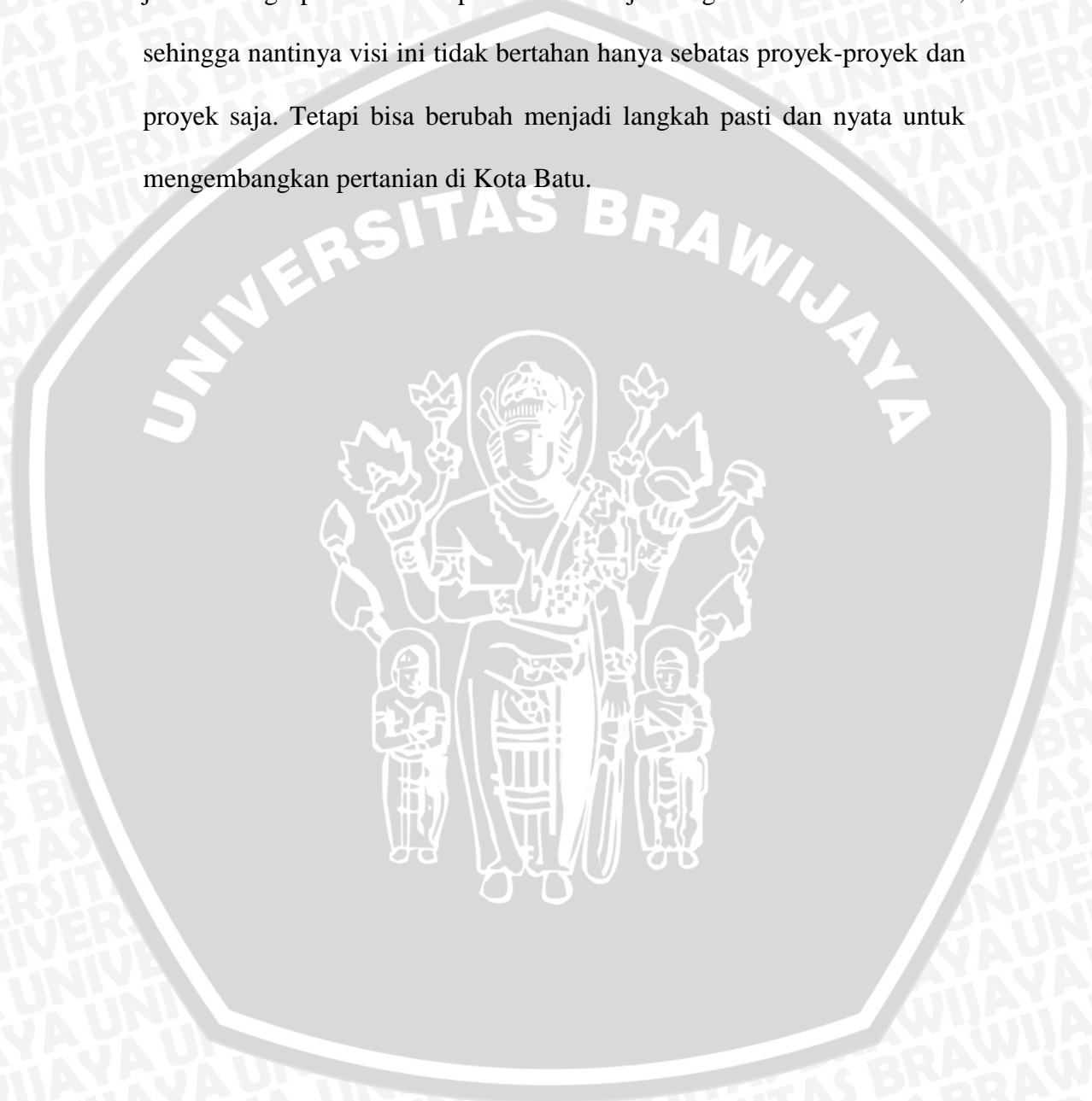
3. Reaksi masyarakat mengenai kebijakan Agropolitan ini pun beraneka ragam, ada yang menolak dan mendukung kebijakan ini. Alasan mereka yang menolak adalah, bantuan modal yang sering molor bahkan tidak ada, tidak memberikan dampak secara signifikan kepada diri mereka sendiri, dan tidak diberikannya pendampingan dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah Kota Batu kepada masyarakat, hanya sekali dua kali. Sedangkan yang menerima kebijakan ini karena mereka sudah merasakan dampak dan manfaat kebijakan tersebut, dan mampu mengetahui peluang pasar dan memiliki koneksi yang banyak dengan pasar sehingga mereka mendukung kebijakan tersebut, dan itu dilakukan oleh pemilik lahan yang luas dan mereka bebas menarik biaya angkut dari petani kecil untuk memasarkan produknya keluar daerah. Boleh dikatakan kebijakan Agropolitan sudah gagal dalam perkembangannya karena ada beberapa faktor penghambat, yaitu pemahaman masyarakat yang kurang mengenai Agropolitan, tingkat pendidikan yang rendah, sumber daya keuangan yang minim, pembangunan sarana dan prasarana yang masih tradisional dan belum modern, serta yang paling penting masih belum dibangunnya stasiun agroklimat guna mendukung pemasaran produk pertanian di Kota Batu. Sehingga sekarang bergeser menuju *organicindustry*.

B. Saran

Berdasarkan penemuan dan pernyataan yang ada diatas, maka guna mengembangkan dan menjalankan sebuah Kebijakan khususnya Kebijakan Agropolitan yang baik, agar pihak masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama mendapatkan keuntungan, diantaranya:

1. Dalam pemaparan mengenai Kebijakan Agropolitan kepada masyarakat, pemerintah perlu secara intens dan lebih sabar untuk memberikan pemahaman, pendampingan dan evaluasi secara berkala tanpa melepas mereka. Karena pemerintah tidak memiliki keberanian tanpa ada contoh dari pemerintah.
2. Harus ada tepat janji, yang dimaksud disini adalah pemerintah ketika memberikan bantuan baik itu berupa modal, pelatihan dan workshop atau bibit berkualitas dan alat pertanian, harus tepat janji agar masyarakat yang ada tidak merasa dipermainkan dan menjadi krisis kepercayaan.
3. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan swasta, karena swasta adalah penyedia modal. Jadi modal bukan hanya dari pemerintah saja namun ada bantuan dana/modal dari pihak swasta.
4. Serta perlu adanya pembangunan Stasiun Agroklimat seperti Puspa Agro di Sidoarjo, hal ini bisa membantu pemasaran produk pertanian yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih hemat dan efisien dalam menggelontorkan dana.
5. Yang terakhir adalah persamaan visi, jadi setiap kepala daerah yang memimpin di Kota Batu tersebut harus memiliki agenda yang sama yaitu

pengembangan pertanian oleh, dan untuk masyarakat, bukan berubah-ubah karena tidak adanya kesepakatan antara kepala daerah yang ada, dan jadikan Agropolitan dan pertanian menjadi agenda besar bersama, sehingga nantinya visi ini tidak bertahan hanya sebatas proyek-proyek dan proyek saja. Tetapi bisa berubah menjadi langkah pasti dan nyata untuk mengembangkan pertanian di Kota Batu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafizh, Mushlihin. 2011. *Sumber Data Dalam Penelitian*. Diakses Melalui: <http://www.referensimakalah.com/2012/09/sumber-data-dalam-penelitian.html> [24-03-2013].

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2011. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*. Surabaya.

Bangkoor. 2012. *Potensi Pertanian Tropika Indonesia*. Diakses Melalui: <http://www.bangkoor.com/2012/07/potensi-pertanian-tropika-indonesia.html> [10-03-2013].

Bryson, John M. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*, rev. ed., San Fransisco: Jossey-Bass.

Departemen, Pertanian. 2008. *Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2007*. Jakarta.

Djunaedi, Achmad. 2000. *Pengantar: Apakah Penelitian Itu?*. Diakses Melalui: <http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/materi/metlit-i/a01-metlit-pengantar.pdf> [15-03-2013]

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.

Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara cetakan ke tiga belas*. Jakarta: bumi aksara

Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.

Kooiman, Jan (ed). 1993. *Modern Governance: New Government Society Interactions*. London: Sage Publications.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Building.

Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. Reading, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Co. Inc.

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pemerintah Kota Batu. 2007. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Batu Bab V, Hal 1-38.

Pemerintah Kota Batu. 2008. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Batu Bab V, Hal 1-39.

Pemerintah Kota Batu. 2009. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Batu Bab V, Hal 49-88.

Pemerintah Kota Batu. 2010. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Batu Bab V, Hal 47-85.

Pemerintah Kota Batu. 2011. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Batu Bab V, Hal 47-80.

Pemerintah Kota Batu. 2012. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kota Batu Bab V, Hal 1-36.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010-2030. Kota Batu.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Surabaya.

Khamsiardi, Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

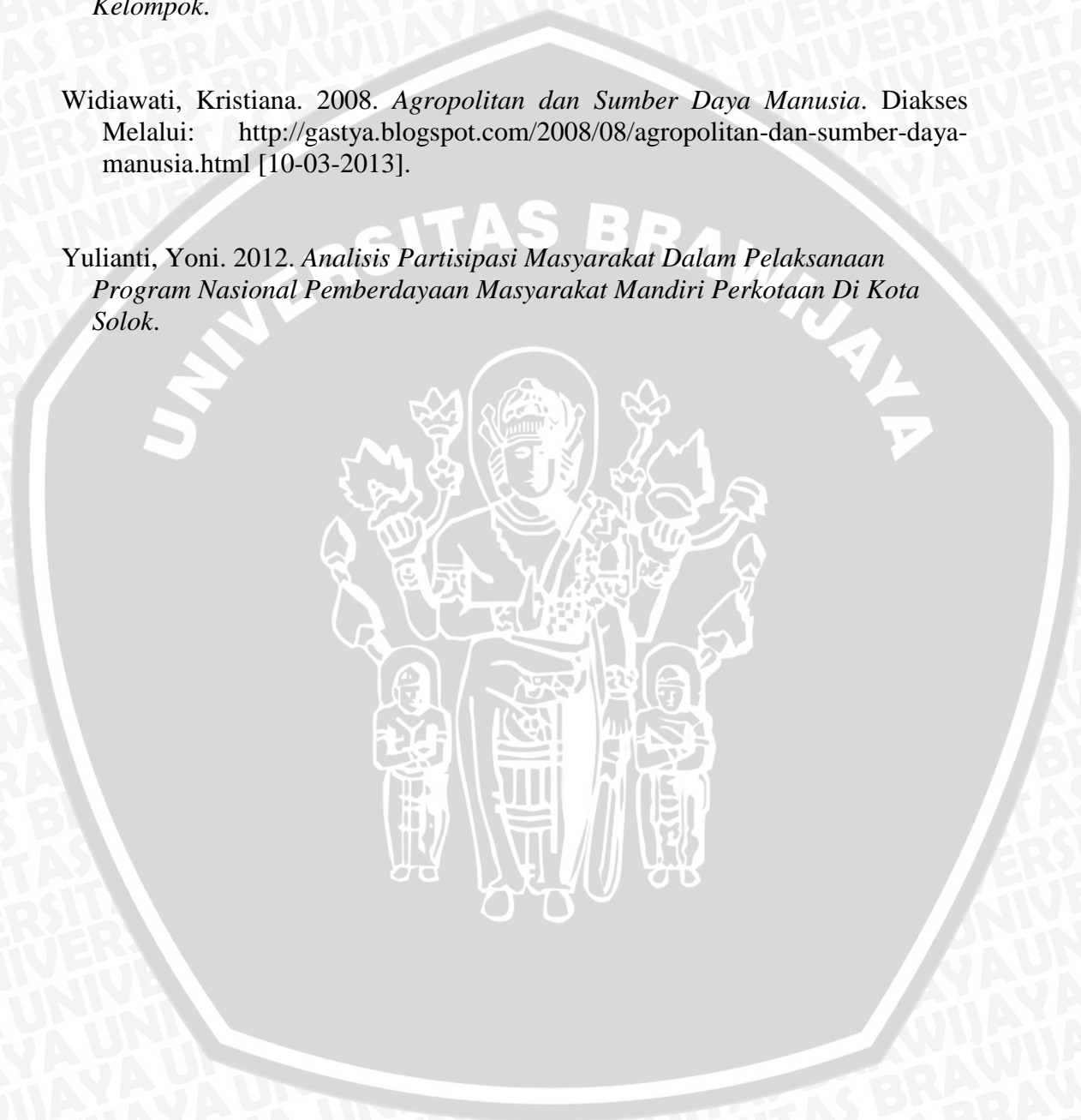
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2003-2013. Kota Batu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010-2030. Kota Batu.

Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*.

Widiawati, Kristiana. 2008. *Agropolitan dan Sumber Daya Manusia*. Diakses Melalui: <http://gastya.blogspot.com/2008/08/agropolitan-dan-sumber-daya-manusia.html> [10-03-2013].

Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Solok*.



Lampiran



WALIKOTA BATU

Keputusan Walikota Batu

Nomor : .../ ... /KEP/...../2012

tentang

**Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan
Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu
Tahun Anggaran 2012**

WALIKOTA BATU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batu; maka perlu didukung dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan.



- b. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009; sehingga keanggotan Kelompok Kerja Agropolitan sebagaimana Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/59/KEP/422.01.23/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kawasan Agropolitan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan Kota Batu Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2023;
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor I / D);
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor IV/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 2 / D);
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 4 / D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 3 / D);
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 5 / D);

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 5/E);
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor Tahun Tentang Perlindungan Pertanian
27. Peraturan Daerah Kota Batu Tentang RPJMD Kota Batu Tahun 2012 – 2017



MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun Anggaran 2013 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Menugaskan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan;
- b. Menyiapkan pedoman teknis dan bahan-bahan informasi;

- c. Mengusulkan pemilihan dan penetapan lokasi kawasan agropolitan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu;
- d. Membantu menyusun perencanaan pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu;
- e. Membagi peran keanggotaan POKJA ke dalam Komisi-komisi Kelompok Pengembangan sesuai dengan tugas-fungsi dan/atau bidang/lapangan kerja masing-masing;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- g. Merumuskan dan menyusun program pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu;
- h. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- i. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- j. Memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan.
- k. Menyusun master plan pengembangan agropolitan Kota Batu

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA didukung oleh Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu, yang mana sekretariat tersebut mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Batu.

KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Sekretariat Pengembangan Kawasan Agropolitan, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2013 dan/atau sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Batu;
b. Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/59/KEP/422.01.23/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kawasan Agropolitan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Batu
pada tanggal :
.....

WALIKOTA BATU

EDY RUMPOKO

pada tanggal : ... Bulan Tahun

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BATU

WIDODO, SH,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19591223 198608 1 002



Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BATU

NOMOR : .../.../ KPTS/.../2012

TANGGAL : ... BULAN 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Walikota Batu
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Batu
3.	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu
4.	Ketua II	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Batu
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu
6.	Anggota-anggota	a. Unsur instansi Pemerintah Kota Batu : 1) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu; 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu; 3) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu; 4) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu; 5) Kepala Dinas Pengairan dan Binamarga Kota Batu; 6) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu; 7) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu; 8) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Batu;

		<p>9) Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu;</p> <p>10) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu;</p> <p>11) Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Sekretariat Daerah Kota Batu;</p> <p>12) Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batu;</p> <p>13) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Batu;</p> <p>14) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu;</p> <p>15) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu;</p> <p>16) Camat Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan.</p> <p>17) Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu;</p> <p>18) Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu;</p> <p>19) Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu;</p> <p>20) Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perencanaan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.</p> <p>b. Unsur masyarakat dan lainnya :</p> <p>1) Gabungan Kelompok Tani Kota Batu;</p> <p>2) Kelompok Sadar Wisata Kota Batu</p> <p>3) Unsur Perbankan Kota Batu;</p> <p>4) Kamar Dagang Indonesia Kota Batu;</p> <p>5) Unsur Perguruan Tinggi;</p>
5.	Sekretariat	Bidang Perencanaan Ekonomi, Badan Perencanaan



	Pembangunan Kota Batu.
--	------------------------

WALIKOTA BATU

EDY RUMPOKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Gubernur Jawa Timur.
 2. Ketua DPRD Kota Batu.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
 4. Sekretariat Kelompok Kerja Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.
 5. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

